

LAPORAN

KEUANGAN

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon I (UAPPAE-1)



AGRO MODERN

**TAHUNAN
2025**

AUDITED



Jl. Raya Ragunan No. 29
Pasarminggu, Jakarta 12540
021 7806202

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

www.brmp.pertanian.go.id

LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2025

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
(Audited)

Jl. Ragunan 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Jakarta, 7 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si., GRCE
NIP 196903141994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.2.1. Belanja Pegawai

B.2.2. Belanja Barang

B.2.3. Belanja Modal

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.2.3.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.4. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

C.1.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.9. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

C.2.8. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

C.2.9. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.10. Properti Investasi

C.2.11. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

- C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
 - C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya
 - C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4.1. Aset Tak Berwujud
 - C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
 - C.4.3. Aset Lain-lain
 - C.4.4. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
 - C.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan
 - C.5.3. Hibah Yang Belum Disahkan
 - C.5.4. Pendapatan Diterima Dimuka
 - C.5.5. Uang Muka dari KPPN
 - C.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya
 - C.6. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2. Beban Pegawai
 - D.3. Beban Persediaan
 - D.4. Beban Barang dan Jasa
 - D.5. Beban Pemeliharaan
 - D.6. Beban Perjalanan Dinas
 - D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - D.10.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
 - D.10.2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar
 - D.10.3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
 - D.10.4. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.3.2. Koreksi Atas Reklasifikasi
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.3.4. Koreksi Lain-lain
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Audited*) sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si., GRCE
NIP 196903141994031001

Laporan Keuangan Badan Perakitan dan Modernisasi Instrumen Pertanian Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp42.932.206.730,00** atau mencapai **143,74%** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp29.867.246.000,00**

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp896.807.943.435,00** atau mencapai **94,69%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp947.074.311.000,00**

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI tidak terdapat koreksi pencatatan sehingga posisi Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 *Audited* adalah tetap.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp44.171.008.360.160,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp30.068.524.860,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp44.013.911.553.923,00**; Properti Investasi (neto) sebesar **Rp13.374.119.262,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp1.608.489.831,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp112.045.672.284,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp13.696.613.137,00** dan **Rp44.157.311.747.023,00**.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebagai berikut :

Nilai Aset per 31 Desember 2025 *Audited* dicatat dan disajikan sebesar **Rp44.172.448.284.392,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp30.970.515.270,00**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp44.014.026.993.923,00**; Properti Investasi (neto) sebesar **Rp13.374.119.262,00**; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar **Rp1.613.233.935,00**; dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp112.463.422.002,00**.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp38.474.314.316,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.014.353.032.519,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-975.878.718.203,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp30.722.531.649,00 dan Rp0,00 sehingga Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengalami mengalami Defisit-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp-945.156.186.554,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga nilai Laporan Operasional per 31 Desember 2025 Audited adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 Audited adalah sebesar Rp38.645.510.899,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.013.119.308.731,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-974.473.797.832,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp30.847.687.093,00 dan Rp0,00 sehingga Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengalami mengalami Defisit-LO pada Tahun 2025 sebesar Rp-943.626.110.739,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp44.242.343.522.698,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp-945,156,186,554,00 , Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp-1.834.336.090,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp861.958.746.969,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp44.157.311.747.023,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan sehingga nilai Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 Audited adalah sebagai berikut :

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp44.242.343.522.698,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp-943,626,110,739,00 , Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp-1.335.541.372,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp862.535.946.969,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp44.159.917.817.556,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 *Audited* disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 *Audited* disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Unaudited			31 Desember 2025 Audited		31 Desember 2024 Audited
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	29.867.246.000	42.932.206.730	143,74	42.932.206.730	143,74	40.148.871.686
Jumlah Pendapatan		29.867.246.000	42.932.206.730	143,74			40.148.871.686
BELANJA	B.2						
Belanja Operasi							
Belanja Pegawai	B.3	288.149.673.000	286.518.181.887	99,43	286.518.181.887	99,43	278.366.436.945
Belanja Barang	B.4	632.493.341.000	584.468.764.111	92,41	584.468.764.111	92,41	516.153.169.697
Jumlah Belanja Operasi		920.643.014.000	870.986.945.998	94,61	870.986.945.998		794.519.606.642
Belanja Modal	B.5						
Belanja Modal Tanah	B.5.1						
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.5.2	25.351.059.000	24.749.800.665	97,63	24.749.800.665	97,63	28.316.782.803
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.5.3	1.061.788.000	1.052.746.772	99,15	1.052.746.772	99,15	5.707.904.544
Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	B.5.4			#DIV/0!		#DIV/0!	21.474.824.658
Belanja Modal Lain-lain	B.5.5	18.450.000	18.450.000	-	18.450.000,00		
Jumlah Belanja Modal		26.431.297.000	25.820.997.437	97,69	25.820.997.437	97,69	55.499.512.005
Jumlah Belanja		947.074.311.000	896.807.943.435	94,69	896.807.943.435		850.019.118.647

Jakarta, 7 Mei 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si., GRCE
NIP 196903141994031001

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Unaudited	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	804.593.634	386.843.916	
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2			347.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.4	4.089.885.877	4.089.885.877	3.609.809.653
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	112.262.500	112.262.500	
Piutang Bukan Pajak	C.7	2.913.291.366	3.514.643.994	4.361.695.016
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.6	(2.020.201.001)	(2.020.201.001)	(1.436.451.936)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.7	16.463.314	16.463.314	16.963.314
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.8	(1.646.331)	(1.646.331)	(1.696.331)
Persediaan	C.9	24.153.875.501	24.872.263.001	14.801.788.839
Jumlah Aset Lancar		30.068.524.860	30.970.515.270	21.352.456.055
Aset Tetap				
Tanah	C.10	42.356.463.039.290	42.356.463.039.290	42.353.446.599.143
Peralatan dan Mesin	C.11	1.499.100.854.633	1.499.100.854.633	1.509.576.255.161
Gedung dan Bangunan	C.12	2.038.879.139.048	2.038.879.139.048	2.038.612.694.811
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.13	323.181.401.656	323.181.401.656	323.357.846.799
Aset Tetap Lainnya	C.14	11.458.381.751	11.458.381.751	11.346.628.479
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.15	2.227.304.532	2.227.304.532	2.370.184.532
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.15.1	(1.400.578.530.932)	(1.400.463.090.932)	(1.396.786.446.533)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.15.2	(642.036.951.922)	(642.036.951.922)	(569.313.763.631)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15.3	(174.783.084.133)	(174.783.084.133)	(160.605.750.031)
Jumlah Aset Tetap		44.013.911.553.923	44.014.026.993.923	44.112.004.248.730
Properti Investasi				
Properti Investasi	C.16	14.137.799.000	14.137.799.000	18.259.544.000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.17	(763.679.738)	(763.679.738)	(606.733.830)
Jumlah Properti Investasi		13.374.119.262	13.374.119.262	17.652.810.170
Piutang Jangka Panjang				
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	715.365.464	720.133.408	842.155.657
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - TP / TGR	C.19	(24.959.913)	(24.983.753)	(104.126.864)
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.20	3.203.385.863	3.203.385.863	3.275.989.901
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.21	(2.285.301.583)	(2.285.301.583)	(2.358.791.341)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		1.608.489.831	1.613.233.935	1.655.227.353
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	C.22	29.472.145.940	29.472.145.940	29.940.204.831
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.23	20.732.378.649	20.732.378.649	7.480.811.324
Aset Lain-lain	C.24	134.625.990.627	135.043.740.345	116.495.016.660
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.25	(72.784.842.932)	(72.784.842.932)	(54.150.836.568)
Jumlah Aset Lainnya		112.045.672.284	112.463.422.002	99.765.196.247
Jumlah Aset		44.171.008.360.160	44.172.448.284.392	44.234.777.128.385

Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 <i>Unaudited</i>	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2024 <i>Audited</i>
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	11.245.999.981	11.245.999.981	8.311.253.041
Hibah Yang Belum Disahkan	C.27	577.200.000		-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.28	1.044.980.272	873.783.689	1.775.162.816
Uang Muka KPPN	C.29	804.593.634	386.843.916	
Utang kepada Pihak Ketiga		23.839.250	23.839.250	
Jumlah Jangka Pendek Lainnya		13.672.773.887	12.530.466.836	10.086.415.857
Jumlah Kewajiban		13.672.773.887	12.530.466.836	10.086.415.857
Ekuitas				
Ekuitas	C.29	44.157.311.747.023	44.159.917.817.556	42.242.343.522.698
Jumlah Ekuitas		44.157.311.747.023	44.159.917.817.556	42.242.343.522.698
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		44.170.984.520.910	44.172.448.284.392	42.252.429.938.555

Jakarta, 7 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si., GRCE
NIP 196903141994031001

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Unaudited	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	38.474.314.316	38.645.510.899	31.889.767.201
JUMLAH PENDAPATAN		38.474.314.316	38.645.510.899	31.889.767.201
Beban Pegawai	D.2	286.463.856.156	286.379.485.773	278.176.614.166
Beban Persediaan	D.3	63.332.634.350	62.899.158.050	40.542.300.690
Beban Barang dan Jasa	D.4	303.984.523.589	303.342.733.704	277.810.572.167
Beban Pemeliharaan	D.5	116.566.588.168	116.563.809.199	109.386.006.236
Beban Perjalanan Dinas	D.6	85.856.051.726	85.813.579.635	87.890.644.228
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	32.538.905.763	32.538.905.763	11.022.852.956
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	125.115.341.932	125.086.481.932	136.782.541.364
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	495.130.835	495.154.675	(112.396.935)
JUMLAH BEBAN		1.014.353.032.519	1.013.119.308.731	941.499.134.872
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(975.878.718.203)	(974.473.797.832)	(909.609.367.671)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	929.447.307	929.447.307	1.512.288.438
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	4.950.816.536	4.950.816.536	4.756.057.498
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	35.565.411.712	35.690.567.156	22.968.097.973
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	821.510.834	821.510.834	1.969.499.460
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		30.722.531.649	30.847.687.093	17.754.829.453
SURPLUS/DEFISIT - LO		(945.156.186.554)	(943.626.110.739)	(891.854.538.218)

Jakarta, 7 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si., GRCE
NIP 196903141994031001

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025 Unaudited	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024 Audited
EKUITAS AWAL	E.1	44.242.343.522.698	44.242.343.522.698	45.034.208.920.591
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(945.156.186.554)	(943.626.110.739)	(891.854.538.218)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.834.336.090)	(1.335.541.372)	(13.079.845.801)
Penyesuaian Nilai Aset				
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	793.668.560	793.668.560	1.402.101.698
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	1.359.386.475	1.359.386.475	278.101.002.922
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.3			
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.4	(3.804.698.709)	(3.718.118.709)	(293.053.735.247)
Lain –lain	E.3.5	(182.692.416)	229.522.302	470.784.826
Transaksi Antar Entitas	E.4	861.958.746.969	862.535.946.969	113.068.986.126
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(85.031.775.675)	(82.425.705.142)	(791.865.397.893)
EKUITAS AKHIR	E.5	44.157.311.747.023	44.159.917.817.556	44.242.343.522.698

Jakarta, 7 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Prof. Dr. Ir. Fadiry Djufry, M.Si., GRCE
NIP 196903141994031001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, telah dilakukan restrukturisasi organisasi Kementerian Pertanian, termasuk perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian melalui pengembangan teknologi, pengujian, produksi dan diseminasi inovasi pertanian diberbagai bidang komoditas. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendukung percepatan transformasi pertanian yang lebih adaptif, inovatif, dan modern.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan berbagai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern
- d. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Sebagai tindak lanjut, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Penataan organisasi ini menggantikan nomenklatur dari unit sebelumnya, yang secara administratif dan substantif berdampak terhadap pelaksanaan program serta sistem pelaporan keuangan, termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pertanian secara menyeluruh dan terintegrasi. Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui pengembangan, pengujian, dan diseminasi berbagai teknologi dan inovasi pertanian, baik di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, sumber daya lahan, mekanisasi, pascapanen, maupun bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Susunan organisasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai Peraturan terdiri atas :

1. Sekretariat Badan;

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perakitan dan Modernisasi Pertanian Pertanian;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, layanan perizinan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- e. Koordinasi perencanaan, perumusan, pemeliharaan standar dan penilaian kesesuaian serta pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian
- f. Koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan kepatuhan internal lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

2. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan;

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian tanaman pangan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerjasama dan penyebarluasan serta modernisasi pertanian tanaman pangan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian tanaman pangan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian tanaman pangan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman pangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan

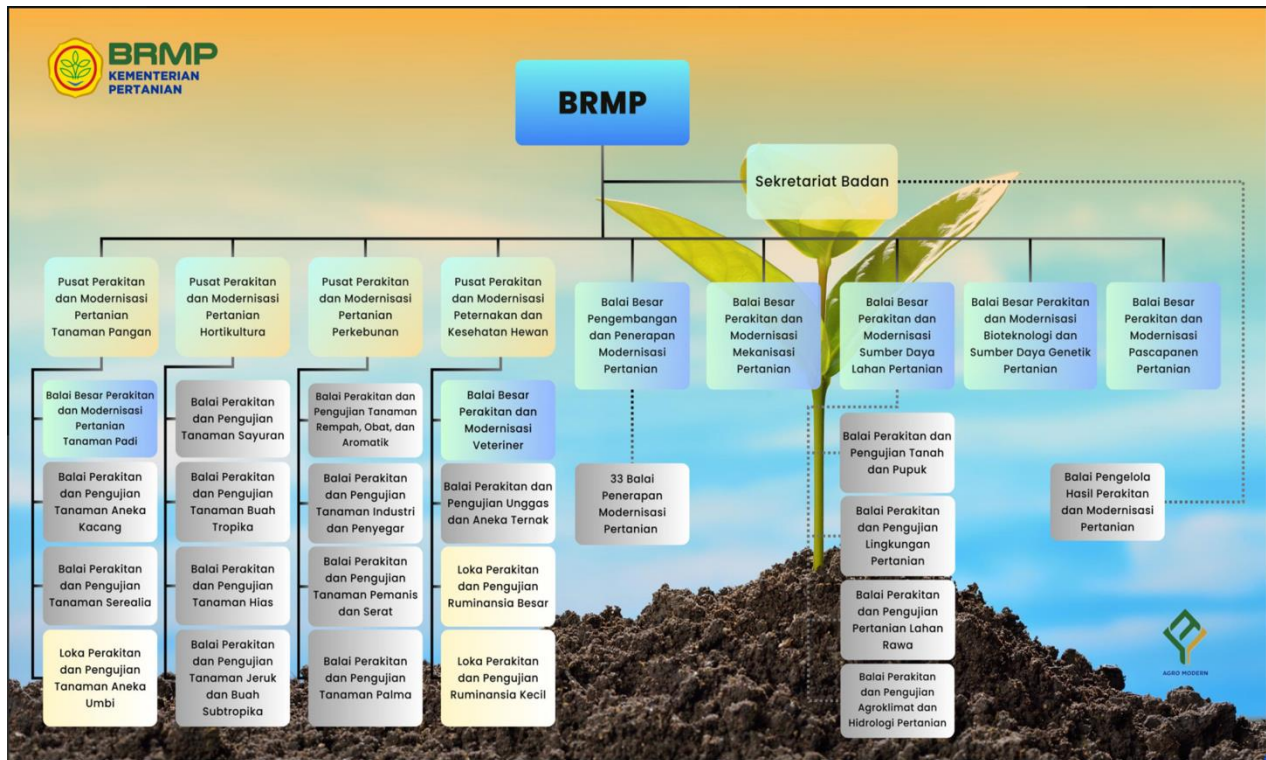
3. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura. dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian hortikultura;
 - b. Pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan serta modernisasi pertanian hortikultura;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian hortikultura, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
4. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian perkebunan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
 - b. Pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian perkebunan;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian perkebunan, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perkebunan; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
5. Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi peternakan dan kesehatan hewan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;

- b. Pelaksanaan tugas di bidang perekayasa dan perakitan teknologi, pengujian produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan Kesehatan hewan;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit, produksi pakan, produk hasil perakitan, kerjasama, dan penyebarluasan serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian
Tugas utama Balai Besar ini adalah mengembangkan dan menguji alat dan mesin pertanian (alsintan) modern. Selain itu, balai ini juga menyusun konsep SNI mekanisasi dan memberikan layanan pengujian kesesuaian alat pertanian
7. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Balai Besar ini berperan dalam perekayasa dan pengembangan teknologi terkait pengelolaan lahan pertanian, termasuk penyusunan informasi geospasial dan mitigasi perubahan iklim. Teknologi yang dihasilkan digunakan untuk optimalisasi penggunaan lahan pertanian secara berkelanjutan.
8. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Balai Besar ini mengemban tugas dalam pengembangan bioteknologi pertanian serta pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik tanaman. Termasuk dalam kegiatannya adalah pengelolaan bank genetik, produksi benih hasil rekayasa genetika, dan penerapan teknologi molekuler.
9. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Balai Besar ini bertanggung jawab dalam perakitan dan modernisasi teknologi pascapanen yang mencakup pengeringan, pengemasan, penyimpanan, dan pengolahan hasil pertanian. Teknologi yang dikembangkan bertujuan menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah produk.
10. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi
Balai Besar ini memiliki tugas utama melaksanakan perekayasa dan perakitan teknologi pertanian tanaman padi. Kegiatan meliputi pengembangan teknologi spesifik lokasi, produksi benih sumber, serta penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia (SNI). Balai ini juga berperan sebagai pusat diseminasi inovasi teknologi padi.
11. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
Balai Besar ini fokus pada perakitan dan modernisasi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Fungsi utamanya meliputi pengembangan teknologi veteriner, pengujian alat dan bahan, serta pemantauan dan evaluasi produk inovasi veteriner untuk mendukung sistem kesehatan hewan nasional.
12. Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
Balai Besar ini bertugas menyusun dan menerapkan paket teknologi spesifik lokasi. Selain itu, balai ini berperan dalam pengembangan model pertanian modern, diseminasi teknologi ke petani, serta pelaksanaan pelatihan teknis. Balai Besar ini membawahi 34 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian di 34 Propinsi Republik Indonesia

Selain 12 Eselon 2, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian juga didukung oleh 52 Eselon 3 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagan organisasi dapat dilihat sebagai berikut :



Visi dimaksud merupakan sasaran umum kebijakan BRMP mendukung Visi Kementerian Pertanian.

MISI BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

adan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nomenklatur menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian dan adanya perubahan program belanja pemerintah serta perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi Pendapatan

Akun	Uraian	Estimasi/Target Awal	Estimasi/Target Setelah Revisi	Naik/ (Turun)
	Pendapatan			
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	9.864.102.000	16.119.633.000	6.255.531.000
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	50.000.000	50.000.000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	881.358.000	881.358.000	0
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	500.000	500.000	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	648.640.000	1.492.369.000	843.729.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	140.000.000	140.000.000	0
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	6.433.530.000	7.281.040.000	847.510.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	47.500.000	1.400.000	-46.100.000
425429	Pendapatan Pengembangan Sumberdaya Manusia Lainnya	54.103.000	50.925.000	-3.178.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	56.000.000	56.000.000	0
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	150.000.000	1.901.141.000	1.751.141.000
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.889.880.000	1.889.880.000	0
	Jumlah Estimasi/Target Pendapatan	20.218.613.000	29.867.246.000	9.648.633.000

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp42.932.206.730,00** atau mencapai 143,74% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp29.867.246.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per Kelompok Akun Pendapatan

Akun	Uraian	Nilai Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	18.546.860.000	26.632.117.308	0	26.632.117.308	143,59
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakkan Hukum	7.421.040.000	7.410.236.032	0	7.410.236.032	99,85
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	2.009.466.000	2.669.254.089	0	2.669.254.089	132,83
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	1.889.880.000	1.933.511.125	0	1.933.511.125	102,31
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan	0	1.597.243.199	0	1.597.243.199	0,00
4258	Pendapatan Denda	0	55.775.639	0	55.775.639	0,00
4259	Pendapatan Lain-lain	0	2.636.199.338	2.130.000	2.634.069.338	0,00
	Jumlah	29.867.246.000	42.934.336.730	2.130.000	42.932.206.730	143,74

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
per Akun Pendapatan

Akun	Uraian	Nilai Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengembalian	Pendapatan Netto	%
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	16.119.633.000	21.610.342.504	0	21.610.342.504	134,06
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	50.000.000	0	0	0	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	595.284.307	0	595.284.307	0,00
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	334.163.000	0	334.163.000	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	881.358.000	1.703.233.171	0	1.703.233.171	193,25
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000	400.000	0	400.000	13,33
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	500.000	0	0	0	0,00
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	33.936.800	0	33.936.800	0,00
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.492.369.000	2.354.757.526	0	2.354.757.526	157,79
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	140.000.000	50.000.000	0	50.000.000	35,71
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	7.281.040.000	7.360.236.032	0	7.360.236.032	101,09
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.400.000	1.600.000	0	1.600.000	114,29
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	50.925.000	132.093.000	0	132.093.000	259,39
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	56.000.000	495.698.000	0	495.698.000	885,18

Akun	Uraian	Nilai Estimasi	Pendapatan Bruto	Pengemb alian	Pendapatan Netto	%
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	2.000.000	0	2.000.000	0,00
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.901.141.000	2.037.863.089	0	2.037.863.089	107,19
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	15.480.000	0	15.480.000	0,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.889.880.000	1.918.031.125	0	1.918.031.125	101,49
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1.188.033	0	1.188.033	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	1.245.411.887	0	1.245.411.887	0,00
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	43.000.000	0	43.000.000	0,00
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	307.643.279	0	307.643.279	0,00
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	53.966.639	0	53.966.639	0,00
425839	Pendapatan Denda Lainnya		1.809.000	0	1.809.000	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.782.177.760	2.130.000	1.780.047.760	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	745.720.001	0	745.720.001	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	9.896.286	0	9.896.286	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	25.131.990	0	25.131.990	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	73.273.301	0	73.273.301	0,00
	Jumlah	29.867.246.000	42.934.336.730	2.130.000	42.932.206.730	143,74

Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 Neto	Realisasi 31 Desember 2024 Neto	Naik/ Turun
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	21.610.342.504	15.260.582.513	6.349.759.991
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	459.529.548	(459.529.548)

Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 Neto	Realisasi 31 Desember 2024 Neto	Naik/ Turun
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	123.196.432	(123.196.432)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	595.284.307	882.397.231	(287.112.924)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	334.163.000	506.694.775	(172.531.775)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.703.233.171	3.552.200.439	(1.848.967.268)
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	400.000	9.800.886	(9.400.886)
425133	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	33.936.800	0	33.936.800
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.354.757.526	969.925.000	1.384.832.526
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	50.000.000	128.300.000	(78.300.000)
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	7.360.236.032	7.104.541.000	255.695.032
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.600.000	3.000.000	(1.400.000)
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	132.093.000	125.411.000	6.682.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	495.698.000	222.984.000	272.714.000
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	2.000.000	0	2.000.000
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	2.037.863.089	2.829.033.300	(791.170.211)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	15.480.000	6.610.000	8.870.000
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.918.031.125	2.307.707.227	(389.676.102)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.188.033	6.772.794	(5.584.761)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1.245.411.887	427.428.357	817.983.530
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	43.000.000	180.639.737	(137.639.737)
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	307.643.279	147.243.831	160.399.448
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	53.966.639	48.691.059	5.275.580
425839	Pendapatan Denda Lainnya	1.809.000	0	1.809.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.780.047.760	3.500.458.276	(1.720.410.516)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	745.720.001	1.166.561.988	(420.841.987)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	9.896.286	174.948.748	(165.052.462)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	25.131.990	0	25.131.990
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	73.273.301	4.213.545	69.059.756
	Jumlah	42.932.206.730	40.148.871.686	2.783.335.044

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBPN periode 31 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya senilai Rp21.610.342.504,00, merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil Pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan

ternak dan hasil sampingnya (benih tanaman afkir, ternak afkir, telur, susu, daging, dll).

2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya senilai Rp7.360.236.032,00, merupakan penerimaan yang bersumber dari layanan Jasa layanan pengujian dan analisis, diantaranya:
 - a. Pengujian Mutu Pestisida
 - b. Pengujian Pupuk
 - c. Pengujian Hama dan Penyakit
 - d. Pengujian Laboratorium Virologi
 - e. Analisis Pakan Ternak dan Produk Pangan
 - f. Diagnosis Penyakit Hewan
 - g. Pengujian Mutu Pakan
 - h. Jasa Analisis Laboratorium Kimia, Biologi, Fisika, dan Mineral
 - i. Pengujian Alat Mesin Pertanian
 - j. Pengujian Laboratorium Fisiologi Hasil
 - k. Pengujian Mutu Gabah dan Mutu Beras
 - l. Analisis Gas Rumah Kaca
 - m. Analisis Pangan Olahan dan Bahan Pertanian
 - n. Pengujian Laboratorium Biomolekuler/ Bioteknologi
 - o. Pengujian Bakteriologi
 - p. Pengujian Virologi
 - q. Pengujian Patologi
 - r. Pengujian Toksikologi dan Mikologi
 - s. Pengujian Parasitologi
 - t. Jasa layanan pengujian dan analisis bagi pelajar dan mahasiswa (relaksasi tarif)
3. Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual senilai Rp2.037.863.089,00 yang berasal dari pembayaran royalti dari lisensor pada Satker Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
4. Pendapatan Jasa Lainnya senilai Rp1.918.031.125,00 yang berasal dari setoran biaya perjalanan dinas dalam rangka layanan pengujian yang dibebankan kepada pengguna jasa.
5. Untuk realisasi pendapatan per 31 Desember 2025, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian masih terdapat pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) senilai Rp1.188.033,00 pada 7 Satker antara lain sebagai berikut:
 - a) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian senilai Rp386.424,00 berasal dari:
 - 1) Rekening Hibah AFACI senilai Rp83.302,00 setor pada tanggal 12 Februari 2025
 - 2) Rekening Kegiatan Kerjasama Hibah KOAT senilai Rp184.802,00 setor pada tanggal 6 Agustus 2025
 - 3) Rekening Kegiatan SID Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp32.571,00 setor pada tanggal 29 Desember 2025
 - 4) Rekening Kegiatan SID Jambi senilai Rp85.749,00 setor pada tanggal 29 Desember 2025
 - b) Balai Perakitan Dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik senilai Rp48.637,00 berasal dari:

- 1) RPL senilai Rp21.589,00 setor pada tanggal 6 Oktober 2025
- 2) RPL senilai Rp13.974,00 setor pada tanggal 4 November 2025
- 3) RPL 023 KS BPPTROA U Aman Aset Tnh senilai Rp2.417,00 setor pada tanggal 2 Desember 2025
- 4) RPL 023 KS BPPTROA Utk ICR ATSIRI senilai Rp6.219,00 setor pada tanggal 2 Desember 2025
- 5) RPL 023 KS BPPTROA Utk ICR ATSIRI senilai Rp4.438,00 setor pada tanggal 30 Desember 2025
- c) Balai Perakitan Dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa senilai Rp44.295,00 berasal dari:
 - 1) Penutupan RPL senilai Rp11.599,00 setor pada tanggal 26 November 2025
 - 2) RPL senilai Rp32.696,00 setor pada tanggal 31 Oktober 2025
- d) Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian senilai Rp21.192,00 berasal dari Rekening Dana Hibah AFACI RPL 139 KS BPMP untuk Kegiatan Evaluasi setor pada tanggal 19 Agustus 2025
- e) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian senilai Rp158.710,00 berasal dari:
 - 1) Rekening Hibah UNESCAP senilai Rp55.197,00 disetor pada tanggal 26 Februari 2025
 - 2) RPL senilai Rp103.513,00 setor pada tanggal 31 Desember 2025
- f) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta senilai Rp230.315,00 berasal dari:
 - 1) Rekening Kegiatan Kemitraan senilai Rp225.254,00 setor pada tanggal 29 Desember 2025
 - 2) Rekening Kegiatan ICARE senilai Rp5.061,00 setor pada tanggal 30 Desember 2025
- g) Balai Perakitan Dan Pengujian Tanah dan Pupuk senilai Rp298.460,00 berasal dari:
 - 1) Rekening Kegiatan Pagar Taman Bogo Lampung senilai Rp4.557,00 setor pada tanggal 22 Desember 2025
 - 2) Rekening Kegiatan Kerjasama ICare senilai Rp160.199,00 setor pada tanggal 23 Desember 2025
 - 3) Rekening Kegiatan Hibah Dalam Negeri Petroganik senilai Rp133.704,00 setor pada tanggal 23 Desember 2025
6. Selain itu terdapat setoran dengan akun 425918 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp185.000,00 pada Satker BPMP Jakarta yang seharusnya menggunakan akun 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, sudah dilakukan ralat akun.
7. Pendapatan lain-lain sebesar Rp2.634.069.338,00 dijelaskan pada tabel berikut.

Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 Neto	Rincian Setoran	Keterangan
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.780.047.760	1.613.184.888	Setoran pengembalian kelebihan Tunjangan Fungsional (Piutang Lainnya)
			166.862.872	Pengembalian Belanja 2024

Akun	Uraian	Realisasi 31 Desember 2025 Neto	Rincian Setoran	Keterangan
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	745.720.001	745.720.001	Pengembalian Belanja 2024
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	9.896.286	200.000	Pengembalian Kelebihan Biaya Penyediaan Air dan Listrik
			1.740.000	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pembelian Peralatan Safety
			4.247.421	Pengembalian Kelebihan Bayar Keg. Pembangunan & Pengaspalan Jalan
			3.708.865	Pengembalian Kelebihan Bayar Pembangunan Pagar Gedung Kantor
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	25.131.990	25.131.990	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras (BBRP Padi)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	73.273.301	128.920	Jasa Giro atas Rekening RPL Kegiatan Icare (BBRM Veteriner)
			828.000	Setoran pendapatan lain-lain berupa penjualan sisa pemusnahan arsip (BRP Taka)
			60.500.500	Setor ke Kas Negara Pendapatan Hasil Penjualan Benih Jagung Kelas FS, Ubi Kayu dan Buah Jeruk sesuai Rekomendasi Hasil Audit Tujuan Tertentu tahun 2025 tanggal 22 Desember 2025 (BPMP Babel)
			10.791.280	Pembayaran tagihan listrik ATM BRI bulan Juli sd Desember 2024 Rp4.304.268,00 (BBRM Mektan)
			1.000.000	Kelebihan pembayaran pengambilan contoh pupuk (BPMP Yogyakarta)
			24.601	BPMP Sulut
	Jumlah	2.634.069.338	2.634.069.338	

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan senilai Rp2.783.335.044,00 atau 6,48% dibandingkan per 31 Desember 2024.

Rincian realisasi PNBP periode 31 Desember 2025 per jenis penerimaan sebagaimana **terlampir** dalam Laporan PNBP MonSAKTI.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo LRA PNBP adalah tetap.

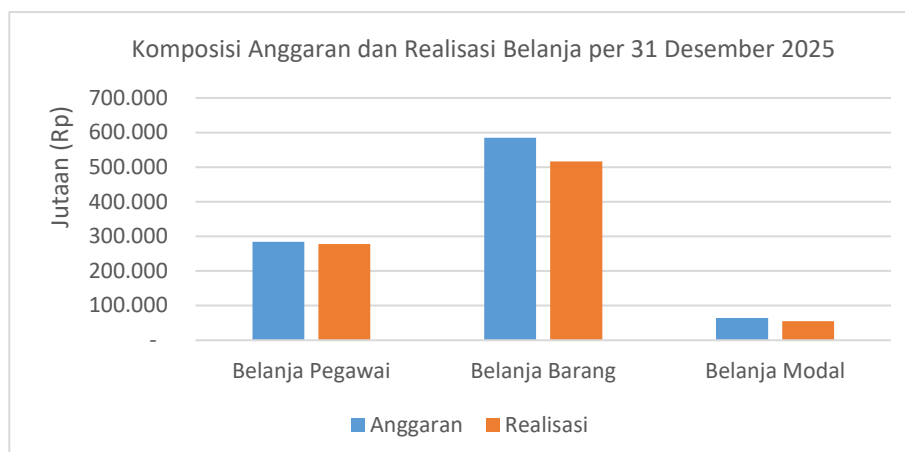
B.2 BELANJA

Realisasi Belanja per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp896.807.943.435,00 atau 94,69% dari anggaran belanja sebesar Rp947.074.311.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	288.149.673.000	286.518.181.887	99,43	278.366.436.945
Belanja Barang	632.493.341.000	584.468.764.111	92,41	513.967.863.953
Belanja Modal	26.431.297.000	25.820.997.437	97,69	55.240.331.880
Total Belanja	947.074.311.000	896.807.943.435	94,69	847.574.632.778

Komposisi anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Gambar berikut:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program per 31 Desember 2025 ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel B.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 berdasarkan Program

Uraian Program dan Kegiatan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Perakitan dan Modernisasi Pertanian	47.015.422.000	46.360.653.426	98,61	
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian				145.190.508.150
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	164.570.254.000	147.775.827.448	89,79	21.957.961.704
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	735.488.635.000	702.671.462.561	95,54	680.426.162.924
JUMLAH	947.074.311.000	896.807.943.435	94,69	847.574.632.778

Dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,8%. Hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan manajemen dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 sehingga mendorong realisasi belanja lebih optimal dibandingkan Tahun 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp286.518.181.887,00 dan Rp278.366.436.945,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, ASN (PNS dan PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,93% dari TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan P3K lingkup BRMP sebanyak 396 pegawai dan penerimaan CPNS lingkup BRMP sebanyak 358 pegawai.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

Uraian Belanja Pegawai	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	263.635.419.000	262.398.503.596	99,53	267.551.079.976
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	19.345.975.000	19.110.415.491	98,78	5.077.030.969
Belanja Lembur	5.168.279.000	5.009.262.800	96,92	5.738.326.000
Jumlah Belanja	288.149.673.000	286.518.181.887	99,43	278.366.436.945

Sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah pegawai Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian adalah 6.098 pegawai yang terdiri dari

yang terdiri dari 3.226 PNS (52,90%), 358 CPNS (5,87%), 596 PPPK Penuh Waktu (9,77%) dan 1.918 PPPK Paruh Waktu (31,45%), dengan rincian 119 struktural (1,95%) dari eselon I sampai dengan eselon IV; 1.980 orang pejabat fungsional tertentu (32,47%) yang terdiri dari Analis Standardisasi, Penyuluh Pertanian, Perekayasa, Analis Kebijakan dan JungSIONal Tertentu lainnya; serta 3.999 orang Pelaksana (65,58%).

Jumlah Pegawai Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025

STRUKTURAL	FUNGSIONAL KHUSUS	FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH
119	1.980	3.999	6.098

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Pegawai Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp584.468.764.111,00 dan Rp516.153.169.697,00. Realisasi belanja barang pada TA 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh adanya perbaikan manajemen dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 sehingga mendorong realisasi belanja barang lebih optimal dibandingkan Tahun 2024. Selanjutnya kenaikan realisasi yang cukup signifikan pada triwulan 4 dibandingkan triwulan 3 disebabkan oleh baru diperolehnya persetujuan pembukaan blokir terutama pada anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan PNPB di akhir triwulan 3. Dengan persiapan pelaksanaan kegiatan yang cukup matang maka setelah diperolehnya persetujuan pembukaan blokir makan satker fokus pada penyelesaian kegiatan. Hal ini mendorong percepatan realisasi belanja barang pada triwulan 4.

Tabel B.2.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian Belanja Barang	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang Operasional	125.572.090.000	124.757.615.252	99,35	128.539.711.561
Belanja Keperluan Perkantoran	103.878.217.000	103.200.388.986	99,35	105.540.953.553
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.163.558.000	1.148.020.237	98,66	1.638.807.219
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	163.124.000	156.075.561	95,68	192.529.668
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	5.991.333.000	5.909.450.999	98,63	7.393.483.714
Belanja Barang Operasional Lainnya	14.375.858.000	14.343.679.469	99,78	13.773.937.407
Belanja Barang Non Operasional	82.261.733.000	78.318.985.535	95,21	84.427.327.403
Belanja Bahan	35.201.882.000	32.427.824.689	92,12	42.430.556.208
Belanja Honor Output Kegiatan	2.033.176.000	2.008.536.000	98,79	2.917.458.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	44.509.042.000	43.881.675.208	97,47	39.058.928.455
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	393.305.000	387.556.138	98,54	20.384.740
Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	113.434.000	113.393.500	99,96	0
Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	10.894.000	0	-	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	-	746.304.000
Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust			-	746.304.000
Belanja Barang Persediaan	53.310.411.000	52.497.157.567	98,47	41.338.233.211
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.968.795.000	25.220.732.851	97,12	24.895.405.937
Belanja Barang Persediaan bahan baku	16.121.062.000	16.056.650.430	99,60	926.652.220
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	-	15.516.175.054
Belanja Barang Persediaan Lainnya	11.220.554.000	11.219.774.286	99,99	
Belanja Jasa	105.977.142.000	101.135.283.464	95,43	64.166.059.104
Belanja Langganan Listrik	29.135.320.000	28.786.684.220	98,80	28.700.438.765
Belanja Langganan Telepon	1.161.246.000	1.112.524.395	95,80	1.493.926.255
Belanja Langganan Air	1.844.743.000	1.753.134.952	95,03	1.934.873.422
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.262.022.000	7.245.727.467	99,78	6.760.382.842
Belanja Jasa Pos dan Giro	16.936.000	16.624.800	98,16	11.358.725
Belanja Jasa Konsultan	4.666.020.000	1.482.902.751	31,78	806.612.580
Belanja Sewa	8.591.030.000	8.333.458.485	97,00	3.074.425.382
Belanja Jasa Profesi	4.009.115.000	3.650.236.000	91,05	5.234.283.500
Belanja Jasa Lainnya	49.290.710.000	48.753.990.394	98,91	16.149.757.633
Belanja Pemeliharaan	113.609.033.000	113.234.029.212	99,67	108.980.469.441
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.730.638.000	54.671.573.742	99,89	59.417.345.867
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	387.150.000	387.009.701	99,96	558.929.946
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.100.628.000	1.100.258.934	99,97	2.052.161.492
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.439.595.000	52.135.458.835	99,42	42.188.761.259
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	96.980.000	93.910.930	96,84	118.266.210
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.634.000	390.088.193	99,86	387.871.870
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	633.397.000	633.389.849	100,00	216.657.000
Belanja Pemeliharaan Irigasi	342.500.000	342.089.470	99,88	398.185.000
Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.575.272.000	1.570.568.218	99,70	1.696.474.027
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	144.066.000	143.912.390	99,89	251.547.496
Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.768.173.000	1.765.768.950	99,86	1.694.269.274
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	115.772.411.000	85.387.720.781	73,75	87.016.540.114
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	98.698.560.000	71.865.711.396	72,81	68.065.345.023
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.158.738.000	4.003.878.000	65,01	7.841.269.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.026.127.000	919.717.778	89,63	2.715.977.174
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.888.986.000	8.598.413.607	86,95	8.393.948.917
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.990.521.000	468.330.945	23,53	938.524.863
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	428.173.000	427.965.945	99,95	333.131.484
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.562.348.000	40.365.000	2,58	605.393.379
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	10.376.692.000	8.676.646.248	83,62	0
Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	10.376.692.000	8.676.646.248	83,62	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	23.623.308.000	19.992.995.107	84,63	0
Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan	23.623.308.000	19.992.995.107	84,63	0
Jumlah Belanja	632.493.341.000	584.468.764.111	92,41	516.153.169.697

Dari tabel B.2.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang, dapat dilihat bahwa terdapat nilai realisasi belanja yang signifikan yaitu:

1. Belanja Barang Operasional senilai Rp124.757.615.252,00

Belanja Barang Operasional tersebut digunakan untuk mencatat pembiayaan keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian namun tidak

menghasilkan barang persediaan yang terdiri antara lain Honor Pelaksana Teknis, Satpam, Cleaning Service, Pengadministrasi Umum; pengiriman surat, paket dan dokumen lainnya, barang cetakan dan keperluan rumah tangga kantor; operasional satpam/pengamanan, langganan internet dan zoom (video conference), biaya keanggotaan publikasi internasional, keperluan sehari-hari perkantoran, pembelian materai, bahan pendukung keperluan perkantoran habis pakai, jamuan/delegasi/misi/tamu, pembelian bahan pengamanan dan perawatan kebun, serta pakaian dinas pegawai.

2. Belanja Pemeliharaan senilai Rp113.234.029.212,00

Belanja Pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum dalam rangka mempertahankan Aset Tetap dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2 % serta pengeluaran untuk pemeliharaan/perawatan agar berada dalam kondisi normal.

3. Belanja Jasa senilai Rp101.135.283.464,00

Belanja jasa digunakan untuk membeli layanan atau manfaat non-fisik (tidak berwujud) guna mendukung kelancaran operasional kantor. Berdasarkan total nilai realisasi belanja jasa tersebut, terdapat realisasi belanja jasa yang nilainya cukup signifikan yaitu realisasi Belanja Jasa Lainnya (522191) pada BRMP senilai Rp48.753.990.394,00, sebagian besar merupakan kegiatan ICARE berupa Competitive Grant senilai Rp29.896.932.448,00 dan kegiatan kerjasama kemitraan senilai Rp13.065.831.954,00, sisanya sebanyak Rp5.791.225.992,00 merupakan belanja Jasa Lainnya seperti surveillance manajemen ISO, dan lain-lain.

Dari tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025, sebesar Rp53.122.144.199,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025
Berdasarkan Jenis yang menghasilkan Barang Persediaan**

Uraian Belanja Barang	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25.968.795.000	25.220.732.852	97,12	24.171.660.219
Belanja Barang Persediaan bahan baku	16.121.062.000	16.056.650.430	99,60	926.652.220
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	-	-	0,00	
Belanja Barang Persediaan Lainnya	11.220.554.000	11.219.774.286	99,99	15.516.175.054
Total 1 (Belanja Barang Persediaan)	53.310.411.000	52.497.157.568		40.614.487.493
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	387.150.000	387.009.701	99,96	558.929.946
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96.980.000	93.910.930	96,84	118.266.210
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	175.628.000	144.066.000	82,03	251.547.496
Total 2 (Belanja Persediaan Pemeliharaan)	659.758.000	624.986.631		928.743.652
Jumlah Belanja (Total 1 + 2)	53.970.169.000	53.122.144.199	98,43	41.543.231.145

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Barang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.669.641.355,00 atau 84,32% dari anggaran sebesar Rp34.000.000.000,00. Kegiatan ini merupakan Bantuan Permodalan *Matching Grant Project* ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment*) berupa barang yang merupakan Program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan *World Bank* yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian secara berkelanjutan dan inklusif di lokasi-lokasi terpilih pada 9 satker sebagai PIU (*Project Implementation Unit*) antara lain :

No	Nama Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Barat	5.262.884.000,00	4.932.934.150,00	93,73
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Tengah	952.638.000,00	278.075.499,00	29,19
3	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Jawa Timur	2.796.274.000,00	2.780.857.491,00	99,45
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Barat	3.708.705.000,00	3.693.056.291,00	99,58
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung	2.609.929.000,00	2.600.293.008,00	99,63
6	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) NTB	6.151.395.000,00	5.260.141.700,00	85,51
7	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Selatan	2.204.713.000,00	2.139.894.464,00	97,06
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Tenggara	3.814.749.000,00	3.601.042.100,00	94,40
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara	6.498.713.000,00	3.383.346.652,00	52,06
Grand Total		34.000.000.000,00	28.669.641.355,00	84,32

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.820.997.437,00 dan Rp55.240.331.880,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024. Pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat belanja modal dalam dokumen perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut memperhatikan keterbatasan anggaran serta prioritas penggunaan anggaran yang mendukung target kinerja Unit Eselon I. Dengan demikian, rencana pengadaan atau pembangunan yang bersifat investasi jangka panjang belum dapat diakomodasi pada tahun anggaran 2025.

Tabel B.2.3.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.351.059.000	24.749.800.665	98	28.136.198.399
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin				0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin				65.400.000
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin				74.746.904
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.532.000	34.532.000	100	1.753.831.895
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan				22.534.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.027.256.000	1.018.214.772		3.712.796.024
Belanja Modal Lainnya	18.450.000	18.450.000		
Belanja Modal Irigasi	0	0	0	19.644.973.058
Belanja Modal Jaringan				1.829.851.600
Jumlah	26.431.297.000	25.820.997.437	98	55.240.331.880

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Modal Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.3.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada realisasi belanja modal tanah baik per 31 Desember 2024 maupun 31 Desember 2025.

Tabel B.2.3.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal tanah per 31 Desember 2025

Uraian Belanja Modal Tanah	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Modal Tanah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.3.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.749.800.665,00 dan Rp28.276.345.303,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 karena prioritas penggunaan anggaran yang mendukung target kinerja Unit Eselon I.

Tabel B.2.3.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.351.059.000	24.749.800.665	98	28.136.198.399
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0	65.400.000
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0	74.746.904
Jumlah	25.351.059.000	24.749.800.665	98	28.276.345.303

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.3.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.052.746.772,00 dan Rp5.489.161.919,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024.

Tabel 2.3.3.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.532.000	34.532.000	100	1.753.831.895
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan				22.534.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1.027.256.000	1.018.214.772	99	3.712.796.024
Jumlah	1.061.788.000	1.052.746.772	99	5.489.161.919

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.3.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp19.644.973.058,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3.4.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Irigasi	0	0	0	19.644.973.058
Belanja Modal Jaringan	0	0	0	1.829.851.600
Jumlah	0	0	0	19.644.973.058

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

B.2.3.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp18.450.000,00 dan Rp0,00.

Tabel 2.3.5.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Lainnya	18.450.000	18.450.000	0	0
Jumlah	18.450.000	18.450.000	0	0

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga Realisasi Belanja Modal Lainnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp44.171.008.360.160,00 dan Rp44.252.429.938.555,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp81.421.578.395,00 atau 0,18%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Rincian Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	30.068.524.860	21.352.456.055
Aset Tetap	44.013.911.553.923	44.112.004.248.730
Properti Investasi	13.374.119.262	17.652.810.170
Aset Teta Belum Diregister	0	0
Piutang Jangka Panjang	1.608.489.831	1.655.227.353
Aset Lainnya	112.045.672.284	99.765.196.247
Jumlah	44.171.008.360.160	44.252.429.938.555

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo asset Lancar dengan mutasi tambah sebesar Rp1.319.740.128,00 dan mutasi kurang sebesar Rp417.749.718,00 sehingga nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebesar Rp30.970.515.270,00. Aset Tetap dengan mutasi tambah sebesar Rp115.440.000,00 sehingga nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebesar Rp44.014.026.993.923,00. Piutang Jangka Panjang dengan mutasi tambah sebesar Rp4.767.944,00 dan mutasi kurang sebesar Rp23.840,00 sehingga nilai Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebesar Rp1.613.233.935,00 dan saldo Aset Lainnya dengan mutasi tambah sebesar Rp417.749.718,00 sehingga nilai saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebesar Rp112.463.422.022,00 dengan demikian Saldo Aset Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 *Audited* adalah sebesar Rp44.172.448.284.392,00

Uraian	31 Desember 2025 <i>Audited</i>	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lancar	30.970.515.270	30.068.524.860	21.352.456.055
Aset Tetap	44.014.026.993.923	44.013.911.553.923	44.112.004.248.730
Properti Investasi	13.374.119.262	13.374.119.262	17.652.810.170
Piutang Jangka Panjang	1.613.233.935	1.608.489.831	1.655.227.353
Aset Lainnya	112.463.422.002	112.045.672.284	99.765.196.247
Jumlah	44.172.448.284.392	44.171.008.360.160	44.252.429.938.555

C.1. ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp30.068.524.860,00 dan Rp21.352.456.055,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.409.434.480,00 atau 39,38%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	804.593.634	
Kas di Bendahara Penerimaan		347.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.089.885.877	3.609.809.653
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	112.262.500	0
Piutang Bukan Pajak	2.913.291.366	4.361.695.016
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	16.463.314	16.963.314
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(2.021.847.332)	(1.436.451.936)
Persediaan	24.153.875.501	14.801.788.839
Jumlah	30.068.524.860	21.352.456.055

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp1.319.740.128,00 dan koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp417.749.718,00 sehingga nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 *Audited* adalah senilai Rp30.970.515.270,00. Rincian saldo Aset Lancar *Audited* per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	386.843.916	
Kas di Bendahara Penerimaan		347.500
Kas Lainnya dan Setara Kas	4.089.885.877	3.609.809.653
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	112.262.500	0
Piutang Bukan Pajak	3.514.643.994	4.361.695.016
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	16.463.314	16.963.314
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(2.021.847.332)	(1.436.451.936)
Persediaan	24.872.263.001	14.801.788.839
Jumlah	30.970.515.270	21.352.456.055

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp804.593.634,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 terdapat kenaikan sebesar Rp804.593.634,00, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 yang nilainya nihil/nol. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Kas UP	-	-
Kas TUP	804.593.634	
Jumlah	804.593.634	-

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan mutasi kurang senilai Rp417.749.718,00, sehingga nilai akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 *Audited* yakni sebesar Rp386.843.916,00. Rincian Sumber Kas di Bendahara Pengeluaran Audited disajikan pada tabel berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Kas UP	-	-
Kas TUP	386.843.916	
Jumlah	386.843.916	-

Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sesuai dengan tabel diatas senilai Rp386.843.916,00 merupakan saldo yang terdapat pada satker Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara. Saldo kas tersebut telah dilakukan penyetoran seluruhnya ke Kas Negara pada bulan Januari 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 2 Januari 2026 telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp4.579.474,00 berdasarkan NTPN 9A3427NAV0PAMLVO (Setoran TUP PNBPN);
2. Tanggal 5 Januari 2026 telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp675.249,00 berdasarkan NTPN 739C7397D99K722P (Setoran TUP Pinjaman Luar Negeri);
3. Tanggal 7 Januari 2026 telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp374.859.576,00 berdasarkan NTPN 1FFCE0JUTPIF037I (Setoran TUP RM);
4. Tanggal 20 Januari 2026 telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp4.729.617,00 berdasarkan NTPN EC7282CQ01G2F2AS (Setoran TUP RM), dan
5. Tanggal 27 Januari 2026 telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp5.000.000,00 berdasarkan NTPN F5F5A2CQ01IEPC36 (Setoran TUP RM).

Monitoring daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Daftar rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dapat disajikan pada **Lampiran**

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp347.500,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan Rp347.500,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut

Perbandingan Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Satker	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	BRMP Pasca Panen	0	347.500	347.500
	Jumlah		347.500	347.500

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan saat periode pelaporan keuangan 31 Desember 2025 telah nihil pada satker BBPSI Pasca Panen yang merupakan pendapatan PNB yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas kerjasama BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai lembaga pemeriksa/pengujian kehalalan dengan BPJPH. Pendapatan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 10 Januari Tahun 2025 dengan NTPN AEC7A48VVNNNOA60 (Bukti Penerimaan Negara terlampir).

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Kas di Bendahara Penerimaan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited dan Audited* adalah tetap.

Daftar rekening Bendahara Penerimaan dapat disajikan pada **Lampiran**

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp4.089.885.877,00 dan Rp3.609.809.653,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan

sebesar Rp480.076.224,00 atau 13,30%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	Satker	30 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	BRMP Gorontalo	2.082		2.082
	BRMP Rawa	5.196		5.196
	BBRMP Mektan	0	55.197	(55.197)
	BPMP Sulawesi Utara	23.839.250	0	23.839.250
	BPMP Tanah & Pupuk	9.405		9.405
Jumlah		23.855.933	55.197	23.800.736
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	BRMP Tan Sayuran	187.732.882	743.387.644	(555.654.762)
	BBRMP Biogen	862.124.171	17.276.887	844.847.284
	BBRMP Tan. Padi	691.000.000		691.000.000
	BBRMP SDLP	1.268.795.776	868.088.184	400.707.592
	BRMP TROA		237.225.000	(237.225.000)
	BRMP TAS	1.820.266	218.686.560	(216.866.294)
	BRMP Hias	4.163.160	468.987.842	(464.824.682)
	BRMP TAKA	216.405.891	159.917.807	56.488.084
	BBRMP Mektan	201.535	260.505	(58.970)
	BBRMP Pasca Panen	832.329.713	270.319.604	562.010.109
	BBPPMP	0.00	451.612.180	(451.612.180)
	BRMP Jestro	1.456.550	173.992.243	(172.535.693)
Jumlah		4.066.029.944	3.609.754.456	456.275.488
Total		4.089.885.877	3.609.809.653	480.076.224

Berdasarkan tabel diatas, Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari 2 akun yakni akun Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah. Sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 kedua akun tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp23.855.933.00.
 Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan saldo kas selain yang berasal dari Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dengan rincian penjelasan sebagai berikut:
 - a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.082 terdapat pada satker BRMP Gorontalo merupakan saldo bunga bank direkening yang berasal dari kegiatan ICARE yang telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 27 Januari 2026 dengan nomor NTPN: 0D77C6U8FGPEODAN.
 - b. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 5.196 terdapat pada satker BRMP Lahan Rawa merupakan saldo saldo jasa giro/bunga dari kegiatan kerjasama ICARE.
 - c. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 23.839.250,00 pada satker BRMP Sulawesi Utara merupakan

uang pajak dari kegiatan ICARE yang sampai dengan periode 31 Desember belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara, namun telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada bulan Januari 2026 (bukti setor terlampir).

- d. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 senilai Rp9.405,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk merupakan saldo jasa giro/bunga bank berasal dari kegiatan ICARE yang telah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 2 Januari 2026 dengan nomor NTPN: B3BAF61QVM6ALGT6 .

2. Kas Lainnya di K/L dari hibah senilai Rp4.066.029.944,00.

Nilai Kas Lainnya tersebut merupakan sisa dana hibah luar negeri terdapat pada 10 satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang disajikan pada penjelasan sebagai berikut:

- a. Saldo Kas hibah luar negeri dari satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran senilai Rp187.732.882,00 merupakan Hibah dari ONIONS NZ dengan nomor register 2WM1TC7A digunakan untuk membiayai proyek *Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia* dengan periode kegiatan mulai dari tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor '088701000087305 pada Bank BRI KC Lembang dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp284.306.988,00.
- b. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Biogen merupakan Hibah dari FAO dengan nomor register 2LY44N2A digunakan untuk membiayai *proyek Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia*. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1330028384139 pada Bank Mandiri KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp862.124.171,00
- c. BBRMP Tanaman Padi memperoleh dana hibah luar negeri dari 2 Pendorong dan 2 Kegiatan yang telah dilakukan pengesahan yaitu:
 - Hibah dari AFACI dengan nomor register 2UERPT5A, digunakan untuk membiayai kegiatan *Asia Regional FAW and BPH Diagnostics and Monitoring and Surveillance Program* dengan periode kegiatan mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Dana hibah tersebut ditampung di rekening nomor 035501002482300 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp483.900.000,00.
 - Hibah dari AFACI dengan nomor register 2BT3NKSA, digunakan untuk membiayai *Accelerate Variety Registration and Seed Distribution of Stress- Tolerant Rice Varieties by AFACI Member Countries* dengan periode 2025 sampai dengan 2026. Dana hibah tersebut ditampung di rekening nomor 035501002743308 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.100.000,00.
- d. BBRMP Sumber Daya Lahan Pertanian (SDLP) memperoleh dana hibah terdiri dari 3 Pendorong dan 3 Kegiatan dengan saldo per 31 Desember 2025 yang telah dilakukan pengesahan antara lain :
 - Hibah dari ACIAR dengan nomor register 2W2H8PDA untuk kegiatan *Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chilli-Rice Cropping System In Coastal Indonesia* dengan periode kegiatan mulai Juni Tahun

- 2025 sampai dengan Januari Tahun 2026. Dana hibah tersebut ditampung direkening nomor 001201004016301 pada Bank BRI KC Bogor, dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp344.867.494,00
- Hibah dari *Korean Agriculture Technology Promotion Agency (KOAT)* dengan nomor register 2JL7VCNA digunakan untuk kegiatan proyek Indonesia *Testbed Project* dengan periode kegiatan mulai dari Agustus Tahun 2024 sampai dengan Desember Tahun 2025. Dana hibah tersebut ditampung direkening nomor 001201004887304 pada Bank BRI KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp588.937.966,00
 - Hibah dari AFACI dengan nomor register 2227WN8A digunakan untuk kegiatan/proyek *National Soil Information Systems to Support The Transformation of Agrifood Systems* dengan periode kegiatan mulai September 2023 sampai dengan September 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 001201004790303 pada Bank BRI KC Bogor dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp344.867.494,00.
- e. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat memperoleh Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 29KPWDNA digunakan untuk membiayai proyek *Bio-Prospective of Indonesian Undomesticated -Nicotiana, Hibiscus, Ceiba, Ricinus and Sesame Plants as New Resources of Novel Bioactive Compounds for Pharmaceuticals, Toiletry and Cosmetic Products* dengan. Periode kegiatan hibah luar negeri ini mulai September 2021 sampai dengan Desember 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1327421375 pada Bank BNI KC ITN2 Tasikmadu dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp1.820.266,00.
- f. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias yang terdiri dari 2 Pendorong dan 2 Kegiatan hibah luar negeri sampai dengan periode 31 Desember senilai Rp4.163.160,00 antara lain yakni sebagai berikut:
- Hibah dari SAKATA dengan nomor register 2RG22RNA digunakan untuk membiayai kegiatan *Cooperation Expedition Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants* dengan periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2029. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 946300929 pada Bank BNI KC Cipanas dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp607.660,00
 - Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2TBZWZ2A digunakan untuk kegiatan *Plant Extracts and Their Essential Oils as Potential Antimicrobial Agents for Food Coloring, Cosmetics & Toiletry, and Pharmaceutical Uses* dengan periode September 2021 sampai dengan Desember 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1371403691 pada Bank BNI KC Cipanas dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp3.555.500,00.
- g. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang memperoleh dana hibah luar negeri dari 2 Pendorong dan 2 Kegiatan yang telah dilakukan pengesahan antara lain:
- Hibah dari *AVDRC-World Veg Center* dengan nomor register 272ZYD9A digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek *International Mungbean Improvement Network* dengan periode kegiatan mulai dari Januari 2021

sampai dengan Desember 2025. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 1440044022280 pada Bank Mandiri KC Malang dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp177.226.422,00.

- Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2G9MNV1A digunakan untuk membiayai proyek *Exploration and Mass Production Technology for Maximizing Beneficial Compounds of Indigenous Under Utilized Legume and Tuber Crops as Natural Colorant, Pharmacy, Functional Food and Food Industries*. Dana Hibah tersebut ditampung direkening nomor 5101003613302 pada Bank BRI KC Malang dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp39.179.469,00.
- h. BBRMP Mekanisasi Pertanian memiliki saldo Hibah dari *United Nation Economic & Social Commission For Asia Pacific* (UNESCAP) dengan nomor register 24PMKT7A dan untuk proyek/kegiatan *Strengthening Mechanization-based solutions for climate-smart crop residue management in Cambodia, Indonesia and Nepal* dengan periode September 2024 sampai dengan Januari 2025. Namun dana hibah tersebut sampai dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp260.505,00.
- i. BBRMP Pascapanen memiliki saldo Hibah dari AFACI dengan saldo per 31 Desember 2025 senilai Rp832.329.713,00 dengan nomor register 272GNQ2A digunakan untuk membiayai *proyek Quality Improvement of Asian Food Composition Database* dengan periode kegiatan mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2027 yang dananya ditampung pada nomor rekening 1885097246 pada Bank BNI KC Merdeka Bogor.
- j. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Tanaman Jeruk Sub Tropika memiliki saldo dana Hibah dari HIRATA CORPORATION dengan nomor register 2QX5LUAA. Hibah tersebut digunakan untuk proyek *Development of Potent Food Supplement from Citrus and Its Wild Relative* dengan periode kegiatan mulai bulan April 2020 sampai dengan Desember 2026. Dana Hibah tersebut ditampung direkening dengan nomor 1440022403213 pada Bank Mandiri KC Batu dengan saldo sampai dengan per 31 Desember tahun 2025 senilai Rp129.500.243,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Unaudited dan Audited per 31 Desember 2025 adalah tetap. Namun terdapat penjelasan tambahan yakni berdasarkan saldo Kas Lainnya dan Setara Kas yang tercatat dalam Neraca Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian TA 2025 sebesar Rp4.089.885.877,00, terdapat beberapa perbedaan data dengan data SPRINT Kementerian Keuangan per 31 Desember 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp40.000.000 pada rekening satker BBRMP Tanaman Padi RPL 021 KS BBPTP SUKAMANDI UNTUK KEMITRAAN BALITBANGTAN dengan Nomor Rekening 35501002248308, nilai tersebut telah dilakukan penihilan pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga saldo pada rekening tersebut adalah Rp0,00.
2. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp4.927,00 pada rekening satker BBRMP Veteriner RPL 023 KS BBPMV UNTUK ICARE dengan Nomor Rekening 1201004968304, nilai tersebut merupakan jasa giro dan telah disetorkan pada

- tanggal 31 Desember 2025 sehingga saldo rekening tersebut pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.
3. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp109.187,00 pada rekening satker Sekretariat BRMP RKK BALITBANG KEMENTAN OPS dengan Nomor Rekening 1057215719. Rekening tersebut merupakan rekening induk Eselon I BRMP untuk BSI. Namun pada 31 Desember 2025 nilai pada dashboard BSI telah nihil, sehingga saldo rekening tersebut pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.
 4. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp3.236.788.294,00 pada rekening satker Sekretariat BRMP RKK SEKRETARIAT BPMP dengan Nomor Rekening 989991416. Rekening tersebut merupakan rekening induk Eselon I BRMP untuk BNI. Namun pada 31 Desember 2025 nilai pada dashboard BNI telah nihil, sehingga saldo rekening tersebut pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.
 5. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp4.106.806.855,00 pada rekening satker Sekretariat BRMP RKK SEKRETARIAT BPMP dengan Nomor Rekening 33901002234309. Rekening tersebut merupakan rekening induk Eselon I BRMP untuk BRI. Namun pada 31 Desember 2025 nilai pada dashboard BRI telah nihil, sehingga saldo rekening tersebut pada 31 Desember 2025 adalah Rp0,00.
 6. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp4.110,00 pada rekening satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang RPL 032 KS BPPTAK UTK BRMP dengan Nomor Rekening 5101004858303, nilai rekening tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.110,00 dan telah dilakukan penihilan pada Januari 2026.
 7. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp1.027,00 pada rekening satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan 023 RPL PS BPMPTP UEKSP HILIRISASI dengan Nomor Rekening 1201005011304, nilai tersebut telah dilakukan penihilan pada tanggal 31 Desember 2025 sehingga saldo pada rekening tersebut adalah Rp0,00.
 8. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp71.934.705,58 pada rekening satker LRP Ruminansia Kecil RPL 124 KS LPPRK UNTUK BBPPMP dengan Nomor Rekening 1050022064087, nilai tersebut pada 31 Desember 2025 pada rekening adalah Rp71.934.705,58 merupakan dana kemitraan untuk kegiatan Implementasi Teknologi Budidaya Kambing Perah yang telah direalisasikan secara fisik pada 6 Januari 2026.
 9. Terdapat saldo pada data SPRINT senilai Rp47.000.000 pada rekening satker Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil RPL 124 KS LPPRK UNTUK BBPPMP dengan Nomor Rekening 1050021550615, nilai tersebut pada 31 Desember 2025 pada rekening adalah Rp47.000.000, merupakan dana kemitraan kegiatan Pendayagunaan Teknologi Kambing Boerka yang telah direalisasikan secara fisik pada 6 Januari 2026.
 10. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp1.820.266,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat RPL 140 PDHL BALITTAS untuk 29KPWDNA dengan Nomor Rekening 1327421375 namun pada data SPRINT per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo tersebut.
 11. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp3.555.500,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias RPL 140 PDHL BALITHI untuk 2TBZWZ2A dengan Nomor Rekening 1371403691, namun pada data SPRINT per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo tersebut.
 12. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp607.660,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias RPL 140 PDHL BALITHI untuk 2RG22RNA dengan Nomor Rekening 946300929, namun pada data SPRINT per 31 Desember 2025 saldo bernilai Rp485.432.948,00.

13. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp39.179.469,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang RPL 140 PDHL BALITKABI untuk 2G9MNV1A dengan Nomor Rekening 5101003613302, namun pada data SPRINT per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo tersebut.
14. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp832.329.713,00 pada satker BBRM Pascapanen RPL 140 PDHL PASCAPANEN UNTUK 272GNQ2A dengan Nomor Rekening 1885097246, namun pada data SPRINT per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo tersebut.
15. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di K/L dari Hibah senilai Rp201.535,00 pada satker BBRM Mekanisasi Pertanian RPL 140 PDHL BBPSI MEKTAN UNTUK 24PMKT7A dengan Nomor Rekening 217101000540304, namun pada data SPRINT saldo per 31 Desember 2025 adalah Rp103.513,00.
16. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp1.000.000,00 pada satker BRMP Sulawesi Utara RPL 049 KS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SULUT dengan Nomor Rekening 1433783311, nilai rekening tersebut pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp1.000.000,00.
17. Terdapat saldo pada Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran senilai Rp5.196,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Lahan Rawa RPL 045 KS BALAI PPP LHN RAWA UTK ICARE dengan Nomor Rekening 1976651230, namun pada data SPRINT per 31 Desember 2025 tidak terdapat saldo tersebut.

Rincian daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan pada **Lampiran**.

C.1.4. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing senilai Rp112.262.500,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Pendapatan yang Masih Harus periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

**Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2025 dan 2024**

Satker	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
BBPMP Tan. Padi	Pandapatan yang Masih Harus Diterima	112.262.500,00	0,00	112.262.500,00
		112.262.500,00	0,00	112.262.500,00

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima tersebut terdapat pada satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi Sukamandi. Nilai pendapatan sebesar Rp112.262.500,00 merupakan penerimaan yang masih harus diterima entitas atas sewa gedung koperasi, RMU, dan sewa kantin.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap

C.1.5. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.913.291.366,00 dan Rp4.361.695.016,00. Saldo Piutang bukan pajak per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.448.403.650,00 atau 33.21% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/Penagihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PNBP Lainnya					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	SEKRETARIAT BRMP	2013	92.772.880	92.772.880	-
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	BRP UAT	2019	100.964.310	106.964.310	(6.000.000)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	BRP T.SEREALIA	2019	192.925.875	192.925.875	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP SULUT	2019	-	58.868.200	(58.868.200)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	BPHMP	2019	1.368.927.992	1.541.305.460	(172.377.468)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP RIAU	2019	265.378.115	265.378.115	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP NTB	2017	73.251.288	73.251.288	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP SULTENG	2020	14.877.000	14.877.000	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	BRMP SUMBAR	2024	-	9.660.000	(9.660.000)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	BRMP SUMBAR	2024	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP PAPUA	2024	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	PRMP HORTIKULTURA	2024	51.340.000	59.840.000	(8.500.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAMAN SAYURAN	2024	9.940.000	109.840.000	(99.900.000)

Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/Perkiraan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRM SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	2024	20.205.000	33.380.000	(13.175.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	PRMP PERKEBUNAN	2023	1.750.000	13.750.000	(12.000.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP LINGKUNGAN PERTANIAN	2024	21.350.000	57.950.000	(36.600.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP PERTANIAN LAHAN RAWA	2024	30.075.000	55.790.000	(25.715.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAMAN PALMA	2024	76.755.000	108.240.000	(31.485.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAMAN ANEKA KACANG	2024	-	50.580.000	(50.580.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KEPULAUAN BANGKA	2023	-	63.758.375	(63.758.375)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP GORONTALO	2024	-	33.545.000	(33.545.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI BARAT	2024	-	44.400.000	(44.400.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP JAWA BARAT	2024	-	20.850.000	(20.850.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP JAWA TENGAH	2022	-	7.280.000	(7.280.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP ACEH	2024	-	75.675.000	(75.675.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA UTARA	2024	-	81.325.000	(81.325.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP RIAU	2024	-	46.315.000	(46.315.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA SELATAN	2024	-	35.127.093	(35.127.093)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KALIMANTAN TIMUR	2024	-	39.645.000	(39.645.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI TENGAH	2024	-	93.815.000	(93.815.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SULAWESI TENGGARA	2024	-	88.810.000	(88.810.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP PAPUA	2024	-	1.680.000	(1.680.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP DKI JAKARTA	2024	-	77.022.920	(77.022.920)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP DI YOGYAKARTA	2024	-	75.143.000	(75.143.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP BALI	2024	-	146.540.000	(146.540.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP BENGKULU	2024	-	21.600.000	(21.600.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KALIMANTAN SELATAN	2024	-	18.905.000	(18.905.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI UTARA	2024	-	28.890.000	(28.890.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP NTB	2024	-	1.550.000	(1.550.000)

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/Perkiraan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRM PASCAPANEN PERTANIAN	2024	16.759.000	109.437.500	(92.678.500)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBPRMP	2024	-	8.698.000	(8.698.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAH DAN PUPUK	2024	64.670.000	121.310.000	(56.640.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	2024	59.600.000	109.520.000	(49.920.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LRP RUMINANSIA BESAR	2024	-	29.805.000	(29.805.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LRP RUMINANSIA KECIL	2024	41.840.000	130.240.000	(88.400.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRMP TANAMAN PADI	2024	-	185.000	(185.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA BARAT	2024	-	2.220.000	(2.220.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP MALUKU UTARA	2024	-	2.660.000	(2.660.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP PAPUA BARAT	2024	-	370.000	(370.000)
42591	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBP2MP		409.909.906	-	409.909.906
TOTAL				2.913.291.366	4.361.695.016	(1.448.403.650)

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian Eselon I	Uraian Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Piutang PNB	648.673.500	108.897.880	90.653.200	666.918.180
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Piutang Lainnya	3.713.021.516	425.934.051	1.892.582.381	2.246.373.186
	Total		4.361.695.016	534.831.931	1.983.235.581	2.913.291.366

Saldo Piutang Bukan Pajak berdasarkan tabel diatas berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak senilai 666.918.180,00 dan Piutang Lainnya senilai Rp2.246.373.186,00. Adapun satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang memiliki saldo Piutang per 31 Desember 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Rincian Satker Piutang PNB dan Piutang Lainnya dan jenis piutangnya antara lain:

Rincian Satker dan Sumber Piutang PNB
Per 31 Desember 2025

No.	Kode SATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	237263	BRMP UAT	100.964.310	Pendapatan hasil samping ternak unggas
2	237238	BRMP SEREALIA	192.925.875	Pendapatan hasil kerja sama Uji Adaptasi Calon Varietas Jagung Hibrida antara Balitsereal dan PT. Java Seed Indonesia
3	411971	SEKRETARIAT BRMP	92.772.880	Piutang denda Keterlambatan PT. Malacca
4	237263	BRMP Riau	265.378.115	Piutang Pendapatan berupa denda keterlambatan pekerjaan pembangunan KP Siak
5	567673	BRMP Sulawesi Tengah	14.877.000	Piutang kepada PT Socio Komunikasi Indonesia
Total			666.918.180	

Rincian Satker dan Sumber Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2025

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	25227	PRMP HORTIKULTURA	51.340.000	Kelebihan Tun. Fungsional
2	237217	BRP TANAMAN SAYURAN	9.940.000	Kelebihan Tun. Fungsional
3	237242	BBRM SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	20.205.000	Kelebihan Tun. Fungsional
4	237291	PRMP PERKEBUNAN	1.750.000	Kelebihan Tun. Fungsional
5	237380	BRMP LINGKUNGAN PERTANIAN	21.350.000	Kelebihan Tun. Fungsional
6	237931	BRMP PERTANIAN LAHAN RAWA	30.075.000	Kelebihan Tun. Fungsional
7	238027	BRMP TANAMAN PALMA	76.755.000	Kelebihan Tun. Fungsional
8	500941	BPHPMP	1.368.927.992	PNBP Royalti
9	634040	BRMP NTB	73.251.288	Denda Keterlambatan
10	648669	BBRM PASCAPANEN PERTANIAN	16.759.000	Kelebihan Tun. Fungsional
11	648673	BBP2MP	409.909.906	Dana Icare
12	648680	BRPMP TANAH DAN PUPUK	64.670.000	Kelebihan Tun. Fungsional
13	648694	BRMP AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	59.600.000	Kelebihan Tun. Fungsional
14	648737	LR PRUMINANSIA KECIL	41.840.000	Kelebihan Tun. Fungsional
TOTAL			2.246.373.186	

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Piutang Bukan Pajak dengan mutasi tambah senilai Rp601.352.628,00, sehingga nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 Audited yakni sebesar Rp3.514.643.994,00. Nilai piutang tersebut terdiri dari Piutang PNPB senilai Rp666.918.180,00 ; dan Piutang Lainnya senilai Rp2.847.725.814,00. Perubahan koreksi nilai ini merupakan tindak lanjut terhadap catatan pemeriksaan BPK sebagai berikut:

1. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BBRMP BIOGEN terdapat kelebihan Pembayaran belanja gaji 13 dan THR (Pembulatan gaji PNS) senilai Rp248,00
2. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Tanaman Padi terdapat kelebihan Pembayaran belanja uang makan PNS dan PPPK, kelebihan pembayaran Tunjangan Umum PNS dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas seluruhnya senilai Rp6.284.227,00
3. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BBRMP Sumber Daya Lahan Pertanian terdapat kelebihan pembayaran belanja uang makan PNS , PPPK dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas seluruhnya senilai Rp16.225.353,00
4. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BBRMP Veteriner terdapat kelebihan pembayaran belanja gaji dan belanja uang makan PNS, PPPK seluruhnya senilai Rp3.754.532,00
5. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker Sekretariat BRMP terdapat kelebihan pembayaran perjalan dinas, transport dan penginapan seluruhnya senilai Rp48.955.112,00
6. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Tanaman Hias terdapat kelebihan pembayaran belanja gaji pns dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional seluruhnya senilai Rp740.005,00
7. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Tanaman Aneka Kacang terdapat kelebihan pembayaran belanja langganan air bulan desember 2025 senilai Rp10.300,00
8. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Tanaman Industri terdapat kelebihan pembayaran belanja uang makan PNS dan PPPK seluruhnya senilai Rp5.286.150,00
9. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Tanaman Buah Tropika terdapat kelebihan pembayaran uang makan PNS, kelebihan pembayaran belanja gaji pokok, gaji tunjangan anak dan istri pegawai seluruhnya senilai Rp8.562.640,00
10. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BPHPMP terdapat Kelebihan pembayaran kegiatan SIBARISTA senilai Rp18.749.500,00
11. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Jawa Tengah terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp24.445.429,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. kelebihan pembayaran belanja gaji pokok pegawai senilai Rp50,00
 - b. kelebihan pembayaran belanja uang makan PNS senilai Rp4.278.000,00
 - c. kelebihan pembayaran belanja tunjangan umum PNS senilai Rp185.000,00
 - d. kelebihan pembayaran belanja barang kegiatan bawang putih senilai Rp16.613.910,00
 - e. kelebihan pembayaran belanja barang Barang Kegiatan Eksploitasi Kendaraan Roda 4 senilai Rp2.778.969,00
 - f. kelebihan pembayaran belanja barang Barang atas Kelebihan Uang Transport senilai Rp589.500,00
12. Catatan Pemeriksaan BPK pada Satker BRMP Aceh terdapat kelebihan Pembayaran belanja gaji pokok pegawai senilai Rp29,00
13. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Sumatera Utara terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp3.313.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 25 pegawai senilai Rp2.869.000,00

- b. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PPPK untuk 3 pegawai senilai Rp444.000,00
- 14. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Sumatera Barat terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp631.350 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 3 pegawai senilai Rp350.750,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PPPK untuk 4 pegawai senilai Rp280.600,00
- 15. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Riau terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp2.462.600 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan suami a.n Elfiani senilai Rp1.724.750,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PPPK untuk 10 pegawai senilai Rp737.850,00
- 16. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Lampung terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp19.417.600 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 65 pegawai senilai Rp18.439.000,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjadin pada kegiatan Icare senilai Rp978.000,00
- 17. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Kalimantan Timur terdapat kelebihan pembayaran belanja uang makan PNS senilai Rp526.800,00
- 18. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Nusa Tenggara Timur terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp5.027.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 30 pegawai senilai Rp4.079.000,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PPPK untuk 4 pegawai senilai Rp948.000,00
- 19. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Yogyakarta terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok Pegawai senilai Rp20,00
- 20. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Bengkulu terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp1.505.496 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 9 pegawai senilai Rp910.600,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional PNS a.n Gunarto senilai Rp594.896,00
- 21. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Jambi terdapat kelebihan pembayaran belanja uang makan PNS untuk 10 pegawai senilai Rp495.300,00
- 22. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Sulawesi Utara terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp3.378.466,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja bahan bulan desember 2025 senilai Rp2.166,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Struktural PNS senilai Rp290.000,00
 - c. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 37 pegawai senilai Rp3.086.300,00
- 23. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Sulawesi Selatan terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Umum PNS untuk 1 pegawai senilai Rp50,00

24. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BBRMP Pasca Panen terdapat kelebihan pembayaran belanja senilai Rp12.330.750,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PNS untuk 83 pegawai senilai Rp11.667.700,00
 - b. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Umum PNS a.n Resa Setia Adiandri senilai Rp380.000,00
 - c. Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Makan PPPK untuk 3 pegawai senilai Rp283.050,00
25. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BBRMP Penerapan terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja atas kegiatan Icare senilai Rp417.596.085,00
26. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Agroklimat terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Umum PNS untuk 4 pegawai senilai Rp1.295.136,00
27. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker LRP Tanaman Aneka Umbi terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Umum PNS untuk 1 pegawai senilai Rp360.042,00
28. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker LRP Ruminansia Besar terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja gaji pokok pegawai senilai Rp8,00.

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak
Setelah dilaksanakan Audit BPK
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PNBP Lainnya					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	SEKRETARIAT BRMP	2013	92.772.880	92.772.880	-
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	BRP UAT	2019	100.964.310	106.964.310	(6.000.000)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	BRP T.SERIALIA	2019	192.925.875	192.925.875	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP SULUT	2019	-	58.868.200	(58.868.200)
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	BPHPMP	2019	1.368.927.992	1.541.305.460	(172.377.468)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP RIAU	2019	265.378.115	265.378.115	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP NTB	2017	73.251.288	73.251.288	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	BRMP SULTENG	2020	14.877.000	14.877.000	-

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/Penagihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	BRMP SUMBAR	2024	-	9.660.000	(9.660.000)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	BRMP SUMBAR	2024	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP PAPUA	2024	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	PRMP HORTIKULTURA	2024	51.340.000	59.840.000	(8.500.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAMAN SAYURAN	2024	9.940.000	109.840.000	(99.900.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRM SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	2024	20.205.000	33.380.000	(13.175.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	PRMP PERKEBUNAN	2023	1.750.000	13.750.000	(12.000.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP LINGKUNGAN PERTANIAN	2024	21.350.000	57.950.000	(36.600.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP PERTANIAN LAHAN RAWA	2024	30.075.000	55.790.000	(25.715.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAMAN PALMA	2024	76.755.000	108.240.000	(31.485.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAMAN ANEKA KACANG	2024	-	50.580.000	(50.580.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KEPULAUAN BANGKA	2023	-	63.758.375	(63.758.375)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP GORONTALO	2024	-	33.545.000	(33.545.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI BARAT	2024	-	44.400.000	(44.400.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP JAWA BARAT	2024	-	20.850.000	(20.850.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP JAWA TENGAH	2022	-	7.280.000	(7.280.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP ACEH	2024	-	75.675.000	(75.675.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA UTARA	2024	-	81.325.000	(81.325.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP RIAU	2024	-	46.315.000	(46.315.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA SELATAN	2024	-	35.127.093	(35.127.093)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KALIMANTAN TIMUR	2024	-	39.645.000	(39.645.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI TENGAH	2024	-	93.815.000	(93.815.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPSIP SULAWESI TENGGARA	2024	-	88.810.000	(88.810.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP PAPUA	2024	-	1.680.000	(1.680.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP DKI JAKARTA	2024	-	77.022.920	(77.022.920)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP DI YOGYAKARTA	2024	-	75.143.000	(75.143.000)

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP BALI	2024	-	146.540.000	(146.540.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP BENGKULU	2024	-	21.600.000	(21.600.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KALIMANTAN SELATAN	2024	-	18.905.000	(18.905.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI UTARA	2024	-	28.890.000	(28.890.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP NTB	2024	-	1.550.000	(1.550.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRM PASCAPANEN PERTANIAN	2024	16.759.000	109.437.500	(92.678.500)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBPRMP	2024	-	8.698.000	(8.698.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP TANAH DAN PUPUK	2024	64.670.000	121.310.000	(56.640.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRP AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	2024	59.600.000	109.520.000	(49.920.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LRP RUMINANSIA BESAR	2024	-	29.805.000	(29.805.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LRP RUMINANSIA KECIL	2024	41.840.000	130.240.000	(88.400.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRMP TANAMAN PADI	2024	-	185.000	(185.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA BARAT	2024	-	2.220.000	(2.220.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP MALUKU UTARA	2024	-	2.660.000	(2.660.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP PAPUA BARAT	2024	-	370.000	(370.000)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBP2MP		409.909.906	-	409.909.906
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBP2MP		417.596.085		417.596.085
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRMP BIOGEN		248		248
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRMP TANAMAN PADI		6.284.227		6.284.227
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRM SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN		16.225.353		16.225.353
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP VETERINER		3.754.532		3.754.532
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	SEKRETARIAT BRMP		48.955.112		48.955.112
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP TANAMAN HIAS		740.005		740.005
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP TANAMANA ANEKA KACANG		10.300		10.300
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP TANAMAN INDUSTRI		5.286.150		5.286.150

Kode Akun	Uraian	Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP BUAH TROPIKA		8.562.640		8.562.640
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BPHPMP		18.749.500		18.749.500
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP JAWA TENGAH		24.445.429		24.445.429
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP ACEH		29		29
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA UTARA		3.313.000		3.313.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SUMATERA BARAT		631.350		631.350
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP RIAU		2.462.600		2.462.600
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP LAMPUNG		19.417.000		19.417.000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP KALIMANTAN TIMUR		526.800		526.800
425912	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP NUDS TENGGARA TIMUR		5.027.000		5.027.000
425913	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP YOGYAKARTA		20		20
425914	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP BENGKULU		1.505.496		1.505.496
425915	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP JAMBI		495.300		495.300
425916	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI UTARA		3.378.466		3.378.466
425917	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP SULAWESI SELATAN		50		50
425918	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BBRMP PASCAPANEN		12.330.750		12.330.750
425919	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	BRMP AGROKLIMAT		1.295.136		1.295.136
425920	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LRP TANAMAN ANEKA UMBI		360.042		360.042
425921	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	LRP RUMINANSIA BESAR		8		8
TOTAL				3.514.643.994	4.361.695.016	(847.051.022)

Saldo Piutang Bukan Pajak Audited mengalami Penurunan sebesar Rp847.051.022,00 atau 19,42%, apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024.

Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak Setelah Audit BPK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian Eselon I	Uraian Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Piutang PNBP	648.673.500	108.897.880	90.653.200	666.918.180

No	Uraian Eselon I	Uraian Akun	31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
2	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Piutang Lainnya	3.713.021.516	1.027.286.679	1.892.582.381	2.847.725.814
	Total		4.361.695.016	1.136.184.559	1.983.235.581	3.514.643.994

Rincian Satker dan Sumber Piutang PNBP
Per 31 Desember 2025

No.	Kode SATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	237263	BRMP UAT	100.964.310	Pendapatan hasil samping ternak unggas
2	237238	BRMP SEREALIA	192.925.875	Pendapatan hasil kerja sama Uji Adaptasi Calon Varietas Jagung Hibrida antara Balitsereal dan PT. Java Seed Indonesia
3	411971	SEKRETARIAT BRMP	92.772.880	Piutang denda Keterlambatan PT. Malacca
4	237263	BRMP Riau	265.378.115	Piutang Pendapatan berupa denda keterlambatan pekerjaan pembangunan KP Siak
5	567673	BRMP Sulawesi Tengah	14.877.000	Piutang kepada PT Socio Komunikasi Indonesia
		Total	666.918.180	

Rincian Satker dan Sumber Piutang Lainnya
Per 31 Desember 2025

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	25227	PRMP HORTIKULTURA	51,340,000	Kelebihan Tun. Fungsional
2	237217	BRP TANAMAN SAYURAN	9,940,000	Kelebihan Tun. Fungsional
3	237242	BBRM SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	36,430,353	Kelebihan Tun. Fungsional, uang makan dan Perjadin
4	237291	PRMP PERKEBUNAN	1,750,000	Kelebihan Tun. Fungsional
5	237380	BRMP LINGKUNGAN PERTANIAN	21,350,000	Kelebihan Tun. Fungsional
6	237931	BRMP PERTANIAN LAHAN RAWA	30,075,000	Kelebihan Tun. Fungsional
7	238027	BRMP TANAMAN PALMA	76,755,000	Kelebihan Tun. Fungsional
8	500941	BPHPMP	1,387,677,492	PNBP Royalti dan Kelebihan pembayaran keg. SIBARISTA
9	634040	BRMP NTB	73,251,288	Denda Keterlambatan
10	648669	BBRM PASCAPANEN PERTANIAN	29,089,750	Kelebihan Tun. Fungsional, uang makan dan Tun. Umum
11	648673	BBP2MP	827,505,991	Dana Icare
12	648680	BRPMP TANAH DAN PUPUK	64,670,000	Kelebihan Tun. Fungsional
13	648694	BRMP AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	60,895,136	Kelebihan Tun. Fungsional dan Tun. Umum
14	648737	LR PRUMINANSIA KECIL	41,840,000	Kelebihan Tun. Fungsional
15	237221	BBRMP BIOGEN	248	Kelebihan belanja gaji
16	237238	BBRMP TANAMAN PADI	6,284,227	Kelebihan Uang Makan dan Perjadin

No.	KDSATKER	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
17	237259	BBRM VETERINER	3,754,532	Kelebihan Belanja gaji dan Uang makan
18	411971	SEKERTARIAT BRMP	48,955,112	Kelebihan Perjadin Transport dan Penginapan
19	411993	BRP TANAMAN HIAS	740,005	Kelebihan Belanja gaji dan Tun. Fungsional
20	412007	BRP TANAMAN ANEKA KACANG	10,300	Kelebihan Langganan Air Bulan Desember 2025
21	412022	BRP TANAMAN INDUSTRI	5,286,150	Kelebihan Uang Makan
22	412025	BRP TANAMAN BUAH TROPIKA	8,562,640	Kelebihan Uang Makan dan belanja gaji,
23	567318	BRMP JAWA TENGAH	24,445,429	Kelebihan Belanja Gaji, uang makan dan Belanja Barang
24	567392	BRMP ACEH	29	Kelebihan Belanja Gaji
25	567428	BRMP SUMATERA UTARA	3,313,000	Kelebihan Uang Makan
26	567449	BRMP SUMATERA BARAT	631,350	Kelebihan Uang makan
27	567460	BRMP RIAU	2,462,600	Kelebihan uang makan dan belanja Tunjangan Suami
28	567517	BRMP LAMPUNG	19,417,000	Kelebihan Uang Makan dan Perjadin
29	567627	BRMP KALIMANTAN TIMUR	526,800	Kelebihan uang makan
30	567783	BRMP NUSA TENGGARA TIMUR	5,027,000	Kelebihan uang makan
31	633975	BRMP YOGYAKARTA	20	Kelebihan Belanja gaji
32	633996	BRMP BENGKULU	1,505,496	Kelebihan Uang makan dan Tun. Fungsional
33	634001	BRMP JAMBI	495,300	Kelebihan uang makan
34	634022	BRMP SULAWESI UTARA	3,378,466	Kelebihan Uang makan, Tun Strukturak, belanja bahan
35	634036	BRMP SULAWESI SELATAN	50	Kelebihan Tun. Umum
36	648702	LRP TANAMAN ANEKA UMBI	360,042	Kelebian Tun. Umum
37	648720	LRP RUMINANSIA BESAR	8	Kelebihan Belanja Gaji
TOTAL			2,847,725,814	

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.463.314,00 dan Rp16.963.314,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp500.000,00 atau 2,95% apabila dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	URAIAN	Satker	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan
			(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan	-			
2	Tuntutan Ganti Rugi	BRP T. Sayuran	16.463.314	16.963.314	(500.000)
Jumlah			16.463.314	16.963.314	(500.000)

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan Piutang Bagian Lancar Tagihan TGR per 31 Desember 2025 senilai Rp16.463.314,00 terdapat pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran merupakan piutang yang bersumber dari kelebihan tunjangan jabaran fungsional dan kelebihan pembayaran tunjangan kinerja dengan debitur atas nama Eti Heni Christiani dan terdapat Pengurangan piutang senilai Rp500.000,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited dan Audited* adalah tetap.

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing minus sebesar (Rp2.020.201.001,00) dan (Rp1.438.148.267,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar (Rp583.699.065,00) atau 40,59% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Penyisihan Piutang Lancar

NO	JENIS PIUTANG	ESELON I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak	BRMP	(2.020.201.001)	(1.436.451.936)	(583.749.065)
2	Bagian Lancar TGR	BRMP	(1.646.331)	(1.696.331)	50.000
JUMLAH PENYISIHAN TIDAK TERTAGIH			(2.021.847.332)	(1.438.148.267)	(583.699.065)

Rincian penyisihan piutang tidak tertagih - piutang bukan pajak dan Bagian Lancar TP/TGR sesuai dengan kategori piutangnya disajikan pada lampiran.

Tabel Analisa Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Non Kualitas	1.011.262.534	-	-
Lancar	394.284.000	0,005	(1.971.420)
Kurang Lancar	100.964.310	0,10	(10.096.431)
Diragukan	-	0,50	-
Macet	2.008.133.150	1,00	(2.008.133.150)
Jumlah (A)	3.514.643.994		(2.020.201.001)
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,005	-
Kurang Lancar	16.463.314	0,10	(1.646.331)
Diragukan	-	0,50	-
Macet	-	1,00	-
Jumlah (B)	16.463.314		(1.646.331)
TOTAL (A+B)	3.531.107.308		(2.021.847.332)

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited* dan *Audited* adalah tetap.

C.1.8. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp24.153.875.501,00 dan Rp14.801.788.839,00. Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp9.352.086.662,00 atau 63,18% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024

Berikut ini disajikan perbandingan rincian persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Rincian Saldo Persediaan per
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian Persediaan	31 Desember 2024 Audited (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	(1)	(2)	(3) = (1-2)
Barang Konsumsi	960.913.493,00	853.260.826	- 107.652.667
Bahan untuk Pemeliharaan	60.947.452,00	38.091.125	- 22.856.327
Suku Cadang	14.135.000,00	14.335.000	200.000
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12.162.707.145,00	21.363.437.158	9.200.730.013
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		38.880.000	38.880.000
Bahan Baku	1.306.970.040,00	1.511.399.612	204.429.572
Persediaan Lainnya	296.115.709,00	334.471.780	38.356.071
Jumlah	14.801.788.839,00	24.153.875.501	9.352.086.662

Rincian Mutasi Persediaan Berdasarkan Jenis Transaksi

Mutasi Persediaan	
Saldo Awal 2025	14.801.788.839
Mutasi Tambah	
Koreksi Nilai Tambah	206.585.130
Pembelian	69.171.662.479
Perolehan Lainnya	31.596.364.790
Reklas Masuk	2.726.862.320
Saldo Awal	662.925.800
Koreksi Kuantitas Tambah	109.469.275
Transfer Masuk	250.782.890
Batal Catat Usang Rusak	73.700.000
Jurnal Database terpusat	109.772.000
Reklasifikasi Dari Aset	2.038.801.474
Hasil Opname Fisik	174.300
Total Mutasi Tambah	106.947.100.458
Mutasi Kurang	
Barang Rusak	334.718.939
Barang Usang	391.740.540
Reklasifikasi Keluar	2.726.862.320
Pemakaian	91.463.183.036
Keluar Lainnya	1.777.104.085
Koreksi Kuantitas Kurang	188.319.075
Hasil Opname Fisik	215.600.000
Koreksi Nilai Kurang	235.992.911
Transfer Keluar	245.292.890
Hibah Keluar	16.200.000
Total Mutasi Kurang	97.595.013.796
Saldo akhir 31 Desember 2025	24.153.875.501

Rincian Mutasi Persediaan Berdasarkan Jenis Transaksi Siginifikan

Uraian Persediaan	Jenis Transaksi	31 Desember 2025
Hewan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Mutasi Tambah	
	Koreksi Nilai Tambah	206.585.130
	Pembelian	3.474.071.810
	Perolehan Lainnya	24.885.754.680
	Reklas Masuk	2.531.568.410
	Saldo Awal	604.160.800
	Koreksi Kuantitas Tambah	30.367.275
	Transfer Masuk	236.532.890
	Hasil Opname Fisik	174.300
	Batal Catat Usang Rusak	73.700.000
	Koreksi Jurnal Terpusat	109.772.000
	Reklasifikasi Dari Aset	1.355.736.475
	Total Mutasi Tambah	33.508.423.770
	Mutasi Kurang	
	Barang Rusak	322.818.939
	Barang Usang	391.740.540
	Reklasifikasi Keluar	1.692.950.160
	Pemakaian	19.303.249.458
	Keluar Lainnya	1.777.104.085
	Koreksi Kuantitas Kurang	106.744.775
	Hasil Opname Fisik	215.600.000
	Koreksi Nilai Kurang	235.992.910
	Transfer Keluar	245.292.890
	Hibah Keluar	16.200.000
	Total Mutasi Kurang	24.307.693.757
	Saldo akhir	9.200.730.013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui terdapat mutasi tambah saldo persediaan dengan nilai signifikan pada akun Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp9.200.730.013,00 yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp**33.508.423.770,00** dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Koreksi Nilai Tambah senilai Rp206.585.130,00 merupakan adanya Perubahan nilai benih karena adanya penyesuaian harga mengikuti tarif SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang sebelumnya harga benih sesuai dengan PP Tarif serta perubahan kondisi hewan ternak dari umur senilai Rp85.856.450,00 pada satker BRMP Sumatera Barat dan BRMP Banten serta adanya Koreksi atas kesalahan pencatatan kelas benih senilai pada satker BRMP Jawa Tengah dan BRMP Papua
 - b. Pembelian senilai Rp3.474.071.810,00 merupakan adanya Pembelian barang persediaan yang dilakukan selama periode berjalan pada 9 satker lingkup BRMP dalam Program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment*) adalah inisiatif besar yang didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan World Bank mencakup berbagai kategori

untuk mendukung kelancaran program tersebut, antara lain Benih Jagung, Padi, pakan, bibit sapi dan domba.

- c. Perolehan Lainnya senilai Rp24.885.754.680,00 merupakan adanya Transaksi yang tidak berasal dari Saldo Awal, Pembelian APBN, Transfer Masuk, Hibah, Rampasan, dan Reklasifikasi Masuk berupa pencatatan hasil panen/samping/hasil pengembangbiakan persediaan Tahun Anggaran Berjalan pada 36 satker lingkup BRMP mencakup berbagai jenis persediaan berupa persediaan benih/tanaman dan persediaan non-tanaman yang berasal dari hasil kegiatan teknis dan operasional satker.
- d. Reklas Masuk senilai Rp2.531.568.410,00 merupakan transaksi untuk mengubah klasifikasi barang yang sebelumnya sudah terlanjur diklasifikasikan (diditilkan) sebagai barang persediaan tertentu diubah menjadi klasifikasi barang persediaan yang lain. Reklasifikasi masuk atas persediaan dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan barang agar sesuai dengan kondisi fisik dan klasifikasi yang tepat di aplikasi SAKTI. Reklasifikasi ini mencakup koreksi atas persediaan yang sebelumnya tercatat dalam kelompok persediaan lainnya dan dipindahkan ke kelompok persediaan hewan dan tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat berupa hewan ternak (antara lain sapi, kambing, dan unggas) serta tanaman dan hasil perbanyakan tanaman, meliputi benih sumber, benih sebar, bibit tanaman pangan, hortikultura, dan/atau tanaman perkebunan.
- e. Saldo Awal senilai Rp604.160.800,00 merupakan persediaan yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran berjalan dan baru dibukukan pada periode pelaporan berjalan sebagai bagian dari penertiban serta penyesuaian pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi, verifikasi fisik, dan rekonsiliasi data. Persediaan tersebut berasal dari transaksi tahun sebelumnya yang secara administratif belum tercatat dalam pembukuan akhir tahun dan selanjutnya dibukukan sebagai saldo awal setelah dilakukan penyesuaian klasifikasi dalam aplikasi SAKTI. Saldo awal ini mencakup persediaan hewan dan tanaman seperti benih padi dan benih biosalin (kelas ES) yang dihasilkan melalui kegiatan produksi dan perbanyakan benih pada Unit Produksi Benih Sumber (UPBS), serta persediaan hewan ternak unggas dan/atau aneka ternak yang dikelola oleh satker teknis sesuai tugas dan fungsinya. Berdasarkan data persediaan, saldo awal tersebut tersebar pada 7 (tujuh) satker lingkup BRMP, dengan jenis, volume, dan nilai persediaan yang bervariasi antar satker sesuai karakteristik komoditas dan program kegiatan yang dilaksanakan.
- f. Koreksi Kuantitas Tambah senilai Rp30.367.275,00 merupakan penyesuaian atas pencatatan persediaan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian kuantitas barang pada periode sebelumnya. Koreksi kuantitas tambah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil inventarisasi dan verifikasi fisik persediaan, khususnya terhadap pencatatan yang belum sepenuhnya mencerminkan jumlah barang yang sebenarnya akibat kesalahan pencatatan kuantitas dan/atau pengakuan persediaan yang belum tepat pada periode lalu. Koreksi tersebut meliputi penambahan kembali kuantitas persediaan hewan ternak unggas, antara lain Ayam Gaosi, Ayam Sensi Abu, Ayam Sensi Pucak, Ayam Cemani SDG, Benih Padi Mekongga SS, DOC KUB-2 Narayana dan FS Lamuru 2024, yang tercatat pada 3 (tiga) satker lingkup BRMP

- g. Transfer masuk senilai Rp236.532.890,00 merupakan adanya penerimaan kiriman barang persediaan dari satker lainnya lingkup BRMP. Transfer masuk persediaan pada tahun 2025. Barang yang diterima mencakup benih padi berbagai varietas, DOC ayam KUB, serta hewan ternak dan vaksin, yang keseluruhannya digunakan untuk mendukung program strategis Kementerian Pertanian, seperti diseminasi benih unggul, pembibitan, dan ketahanan pangan nasional. Penerimaan terbesar berasal dari Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi diikuti oleh Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dan satker lainnya seperti Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran. Seluruh transaksi dicatat melalui dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai dasar pencatatan persediaan dalam sistem akuntansi pemerintah.
 - h. Hasil Opname Fisik senilai Rp174.300,00 merupakan adanya penginputan hasil opname fisik dalam hal terdapat perbedaan jumlah barang persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan buku persediaan yang terdapat pada satker BRMP NTT terkait adanya kesalahan catat sisa stock atas DOC KUB Janaka dan Narayana yang seharusnya tercatat mati tapi tercatat dijual dan pencatatan barang persediaan yang tidak bisa dilakukan perbaikan.
 - i. Batal Catat Usang Rusak senilai Rp73.700.000,00 merupakan adanya pembatalan pencatatan atas persediaan yang usang/rusak karena benih tersebut sudah mengalami penurunan mutu, kadaluarsa atau kerusakan sehingga tidak layak digunakan maupun disalurkan. Transaksi tersebut dilakukan karena adanya kesalahan pencatatan administrasi pada saat proses using di aplikasi persediaan dan barang persediaan masih layak dijual.
 - j. Koreksi Jurnal Terpusat senilai Rp109.772.000,00 yang merupakan tindaklanjut terpusat yang dilakukan oleh Direktorat Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan (Dit SITP) Kementerian Keuangan akibat adanya koreksi harga barang persediaan pada TA 2024 yang telah habis di persediaan namun masih tercatat pada laporan persediaan dalam modul SAKTI Persediaan.
 - k. Reklasifikasi Dari Aset senilai Rp1.355.736.475,00 merupakan adanya perekaman perolehan barang persediaan yang sebelumnya dikodefikasikan sebagai asset/BMN lalu diubah menjadi kode barang persediaan pada satker Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar dan BRMP Tanaman Aneka Kacang.
2. Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai Persediaan Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp**24.307.693.757,00** dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Barang Rusak senilai Rp322.818.939,00 merupakan adanya penghapusan barang persediaan yang rusak dan barang-barang persediaan yang rusak tersebut sudah pernah dicatat melalui transaksi persediaan keluar rusak. Pada kategori hewan dan tanaman, kerusakan terutama disebabkan oleh kematian ternak akibat sakit, ditemukan benih padi kadaluarsa dan benih susut olah ulang. Semua barang rusak tersebut telah diproses untuk dihapuskan dari pembukuan yang terdapat pada 8 satker lingkup BRMP
 - b. Barang Usang senilai Rp391.740.540,00 merupakan adanya penghapusan barang persediaan yang usang dan barang-barang persediaan yang usang tersebut sudah pernah dicatat melalui transaksi persediaan keluar usang.

Barang usang dalam persediaan per 31 Desember 2025 pada 6 satker lingkup BRMP terdiri dari benih tanaman dan hewan ternak yang tidak lagi dapat dimanfaatkan akibat usia simpan yang telah melampaui masa guna atau kondisi fisik yang tidak layak serta sudah tidak memenuhi standar mutu benih sehingga tidak memungkinkan untuk diproduksi kembali. Seluruh barang ini dicatat sebagai barang usang untuk keperluan penghapusan dan penyesuaian dalam laporan persediaan.

- c. Reklasifikasi keluar senilai Rp1.692.950.160,00 merupakan transaksi untuk mencatat pengeluaran persediaan karena jenis atau kode barang persediaan diubah menjadi jenis atau kode barang persediaan lainnya. Reklasifikasi keluar atas persediaan dilakukan untuk menyesuaikan klasifikasi barang agar sesuai dengan kondisi fisik dan fungsinya di lapangan, terutama atas kesalahan penginputan kodefikasi dalam aplikasi SAKTI serta reklas keluar terhadap hewan ternak yang semula dicatat sebagai bahan baku dan persediaan lainnya. Hal tersebut pada 9 satker lingkup BRMP antara lain LRP Ruminansia Kecil, BRMP Yogyakarta, BRMP Papua, BRMP Sumatera Barat, BRMP Aceh, BRMP Jawa Tengah, BRMP Banten, BRMP UAT dan BRMP Tanaman Sayuran.
- d. Pemakaian senilai Rp19.303.249.458,00 merupakan pemakaian barang persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada 46 satker lingkup BRMP yang mencerminkan pemanfaatan persediaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional dan teknis satker. Pemakaian persediaan tersebut didominasi oleh persediaan hewan dan tanaman, antara lain berupa benih tanaman pangan dan hortikultura, benih padi berbagai varietas, DOC ayam KUB, serta hewan ternak dan bibit ternak, yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi, perbanyakan, pengembangan, diseminasi, dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan peruntukan Program ICARE (*Integrated Corporation of Agricultural Resource Empowerment*)
- e. Keluar Lainnya senilai Rp1.777.104.085,00 merupakan mutasi keluar persediaan sampai dengan 31 Desember 2025 pada 8 satker lingkup BRMP antara lain LRP Ruminansia Besar, BRMP Kalimantan Selatan, BRMP Yogyakarta, BRMP NTT, BRMP Lampung, BRMP Sumatera Barat, BRMP Gorontalo dan BRMP Banten, yang mencerminkan pengeluaran persediaan hewan dan tanaman di luar mekanisme pemakaian rutin. Transaksi ini terutama berasal dari penyerahan persediaan kepada masyarakat sesuai peruntukan program kegiatan serta penghapusan persediaan akibat kondisi biologis alami, termasuk kematian hewan ternak yang merupakan risiko yang melekat pada persediaan hewan. Persediaan yang mengalami mutasi keluar lainnya tersebut antara lain berupa hewan ternak dan bibit ternak, meliputi ayam KUB, sapi, kambing, domba, kelinci, serta komoditas ternak lainnya, serta persediaan tanaman berupa benih dan bibit tanaman unggul sesuai karakteristik kegiatan masing-masing satker.
- f. Koreksi Kuantitas Kurang senilai Rp106.744.775,00 merupakan Koreksi atas persediaan untuk menyesuaikan data pencatatan dengan kondisi fisik yang sebenarnya, yang sebagian besar disebabkan oleh kesalahan input dan ketidaksesuaian varietas dalam pencatatan. Koreksi mencakup berbagai barang berupa hewan dan tanaman seperti ayam KUB, white leghorn dan Rusa Timor pada satker BRMP UAT dan Benih Padi Inpari 32 SS pada satker BRMP Aceh.

- g. Hasil Opname Fisik senilai Rp215.600.000,00 yang merupakan koreksi atas pencatatan sebelumnya. Ditemukan persediaan Hewan dan Tanaman pada 3 satker lingkup BRMP seperti ayam KUB, DOC, benih padi Inpago, Inpari dan Benih UPBS
- h. Koreksi nilai kurang senilai Rp235.992.910 merupakan transaksi yang dilakukan untuk menyesuaikan perubahan nilai wajar barang akibat perpindahan kelas, kadaluarsa maupun status afkir. Koreksi tersebut mencakup perubahan nilai domba, ayam KUB Afkir, sapi dan jagung konsumsi
- i. Transfer Keluar senilai Rp245.292.890,00 merupakan transaksi atas distribusi benih padi dan hewan ternak ke berbagai satuan kerja lingkup BRMP.
- j. Hibah Keluar senilai Rp16.200.000,00 merupakan transaksi mutasi keluar persediaan yang ditujukan kepada pihak di luar lingkup pemerintah pusat, yaitu masyarakat dalam bentuk penyerahan 27 ekor domba kepada Pondok Pesantren Darul Hidayah melalui fasilitasi BRMP Lampung. Barang yang dihibahkan awalnya dialokasikan untuk mendukung operasional satuan kerja, namun karena pertimbangan optimalisasi pemanfaatan dan adanya permohonan dari pihak penerima, barang tersebut diserahkan kepada masyarakat. Proses hibah ini dilakukan berdasarkan persetujuan pimpinan unit, serta telah dilengkapi dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 1101/PK.040/H.5.2/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, sebagai dasar pencatatan mutasi keluar dalam sistem persediaan

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp718.387.500,00 sehingga nilai saldo Persediaan per 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp24.872.263.001,00

Koreksi pencatatan tersebut terdapat pada satuan kerja Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPPMP) yang merupakan adanya Perolehan benih pada kegiatan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura yang belum dicatat sesuai surat keterangan Kepala BBPPMP Nomor 5540/LB.010/H.12/12/2025 berupa Benih tanaman pangan sebanyak 58.650 Kg senilai Rp598.000.000,00 dan Benih tanaman Hortikultura sebanyak 55.905 (905 tanaman dan 55.000 entes) senilai Rp120.387.500,00 sehingga nilai saldo Hewan dan Tanaman untuk Dijual/ Diserahkan Ke Masyarakat per 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp22.081.824.658,00

Adapun Rincian Saldo perubahan nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Uraian Persediaan	31 Desember 2024 Audited (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Nilai Koreksi
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1-3)	(5) = (2-3)
Barang Konsumsi	960.913.493,00	853.260.826	853.260.826	107.652.667	-
Bahan untuk Pemeliharaan	60.947.452,00	38.091.125	38.091.125	22.856.327	-
Suku Cadang	14.135.000,00	14.335.000	14.335.000	- 200.000	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12.162.707.145,00	21.363.437.158	22.081.824.658	- 9.919.117.513	- 718.387.500
Peralatn dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		38.880.000	38.880.000	- 38.880.000	-
Bahan Baku	1.306.970.040,00	1.511.399.612	1.511.399.612	- 204.429.572	-
Persediaan Lainnya	296.115.709,00	334.471.780	334.471.780	- 38.356.071	-
Jumlah	14.801.788.839	24.153.875.501	24.872.263.001	- 10.070.474.162	- 718.387.500

Rincian Mutasi perubahan nilai Persediaan per 31 Desember 2025 Audited
Berdasarkan Jenis Transaksi Signifikan

Uraian Persediaan	Jenis Transaksi	31 Desember 2025	31 Desember 2025 Audited
Hewan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Mutasi Tambah		
	Koreksi Nilai Tambah	206.585.130	206.585.130
	Pembelian	3.474.071.810	3.474.071.810
	Perolehan Lainnya	24.885.754.680	25.604.142.180
	Reklas Masuk	2.531.568.410	2.531.568.410
	Saldo Awal	604.160.800	604.160.800
	Koreksi Kuantitas Tambah	30.367.275	30.367.275
	Transfer Masuk	236.532.890	236.532.890
	Hasil Opname Fisik	174.300	174.300
	Batal Catat Usang Rusak	73.700.000	73.700.000
	Koreksi Jurnal Terpusat	109.772.000	109.772.000
	Reklasifikasi Dari Aset	1.355.736.475	1.355.736.475
	Total Mutasi Tambah	33.508.423.770	34.226.811.270
	Mutasi Kurang		
	Barang Rusak	322.818.939	322.818.939
	Barang Usang	391.740.540	391.740.540
	Reklasifikasi Keluar	1.692.950.160	1.692.950.160
	Pemakaian	19.303.249.458	19.303.249.458
	Keluar Lainnya	1.777.104.085	1.777.104.085
	Koreksi Kuantitas Kurang	106.744.775	106.744.775
	Hasil Opname Fisik	215.600.000	215.600.000
	Koreksi Nilai Kurang	235.992.910	235.992.910
	Transfer Keluar	245.292.890	245.292.890
	Hibah Keluar	16.200.000	16.200.000
	Total Mutasi Kurang	24.307.693.757	24.307.693.757
	Saldo akhir	9.200.730.013	9.919.117.513

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp44.013.911.553.505,00 dan Rp44.112.004.248.730,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp98.092.588.225,00 atau 0,22% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	42.356.463.039.290	42.353.446.599.143	-3.016.440.147
2	Peralatan dan Mesin	1.499.100.854.633	1.509.576.255.161	10.475.400.528
3	Gedung dan Bangunan	2.038.879.139.048	2.038.612.694.811	-266.444.237
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.181.401.656	323.357.846.799	176.445.143
5	Aset Tetap Lainnya	11.458.381.751	11.346.628.479	-111.753.272
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.227.304.532	2.370.184.532	142.880.000
8	Akumulasi Penyusutan	(2.217.398.566.987)	(2.126.705.960.195)	90.692.606.792
Jumlah		44.013.911.553.923	44.112.004.248.730	98.092.694.807

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp115.440.000,00 sehingga nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 *Audited* adalah senilai Rp44.014.026.993.923,00. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 *Audited* dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024 <i>Audited</i> (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 <i>Audited</i> (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1-3)	(5) = (2-3)
1	Tanah	42.353.446.599.143	42.356.463.039.290	42.356.463.039.290	-3.016.440.147	-
2	Peralatan dan Mesin	1.509.576.255.161	1.499.100.854.633	1.499.100.854.633	10.475.400.528	-
3	Gedung dan Bangunan	2.038.612.694.811	2.038.879.139.048	2.038.879.139.048	-266.444.237	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.357.846.799	323.181.401.656	323.181.401.656	176.445.143	-
5	Aset Tetap Lainnya	11.346.628.479	11.458.381.751	11.458.381.751	-111.753.272	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.370.184.532	2.227.304.532	2.227.304.532	142.880.000	-
7	Akumulasi Penyusutan	(2.126.705.960.195)	(2.217.398.566.987)	(2.217.283.126.987)	90.577.166.792	(115.440.000)
Jumlah		44.112.004.248.730	44.013.911.553.923	44.014.026.993.923	97.977.254.807	-115.440.000

C.2.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp42,356,463,039,290,00 dan Rp42,353,446,599,143,00 Terdapat penurunan nilai aset tanah pada 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.016.440.147,00) atau 0.01 % (persen).

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki Tanah seluas 58.955.833 m2 sebanyak 362 NUP yang tersebar di 61 satuan kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Adapun penjelasan atas status kepemilikan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga seluas 50.179.514m2 sebanyak 291 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp27.180.732.506.618,00
2. Bersertifikat (Tidak Sesuai Ketentuan) atas nama Kementerian/Lembaga seluas 7.598.987 sebanyak 52 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp14.782.361.762.600,00
3. Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga seluas 388.766m2 sebanyak 2 NUP dengan nilai perolehan sebesar Rp102.223.104.000,00
4. Belum Bersertifikat seluas 788.566m2 sebanyak 17 NUP sebesar Rp291.145.666.072,00

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Tanah per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo per 31 Desember 2024 Audited	42.353.446.599.143
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	39.461.690.862
Transfer Masuk	47.379.008.000
Koreksi Pencatatan	43.110.147
Perubahan PI ke BMN	4.436.242.000
Total	91.320.051.009,
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(40.311.218.862)
Transfer Keluar	(47.379.008.000,)
Koreksi Pencatatan	(613.384.000,)
Total	(88.303.610.862,)
Saldo per 31 Desember 2025	42.356.463.039.290,

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal senilai Rp39.461.690.862,00 merupakan Koreksi pencatatan luasan dan pencatatan saldo awal BMN seluas 6.000 M2 berupa tanah kebun percobaan (2010203003) Pada satker BRMP Tanaman Industri untuk proses hibah sebagian bidang tanah dalam rangka hibah untuk sarana pengembangan Pendidikan senilai Rp3.507.000.012,00 dan Tanah yang terkena proyek strategis nasional (Jalan Tol Depok Antasari)
2. Transfer Masuk senilai Rp47.379.008.000,00 merupakan adanya Transfer masuk dari BRMP Jawa Barat (567296) berupa tanah bangunan kantor pemerintah seluas 35.720 M2 sesuai BAST Nomor 768/PL.310/H.12.11/05/2025 tanggal 14 Mei 2025.
3. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp43.110.147,00 merupakan adanya kegiatan pemeliharaan saluran air/gorong-gorong meliputi perbaikan dan peningkatan fungsi saluran air pada satker BRMP Sumatera Selatan

Penjelasan atas Mutasi kurang nilai aset tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang senilai Rp40.311.218.862,00 merupakan Koreksi pencatatan luasan dan pencatatan saldo awal BMN berupa tanah kebun percobaan untuk proses hibah sebagian bidang tanah dalam rangka hibah untuk sarana pengembangan Pendidikan berdasarkan hasil surat keterangan luas tanah hasil pengukuran nomor B-1043/PL.320/H.4.4/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 senilai Rp3.507.000.012,00 pada satker BRMP Tanaman

Industri; penghapusan tanah yang terkena proyek strategis nasional senilai Rp35.954.690.850,00 pada satker BRMP Biogen dan perbaikan kesalahan pencatatan luas tanah setelah dilakukan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat oleh BPN senilai Rp849.528.000,00 pada satker BRMP Jawa Barat

2. Transfer Keluar senilai Rp47.379.008.000,00 merupakan Transfer keluar dari BPMP Jawa Barat ke BRMP Penerapan (648673) berupa tanah bangunan kantor pemerintah (2010104001) seluas 35.720 M2 Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-112/PL.310/H.12.6/01/2025 tanggal 25 Januari 2025
3. Koreksi Pencatatan senilai Rp613.384.000,00 yang merupakan kesalahan pencatatan oleh operator modul aset, dalam memasukan transaksi perolehan berupa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas pada satker BPMP Riau yang seharusnya tercatat hanya Bangunan Rumah Dinas dan Pada satker BPMP NTT berupa tanah sawah irigasi yang tidak dikuasai dan dimanfaatkan serta tidak memiliki dokumen kepemilikan atau perolehan yang kuat, sehingga dilakukan koreksi pencatatan dan diusulkan untuk dihapuskan

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Tanah *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan akun Tanah persatker disajikan dalam lampiran.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,499,100,854,633,00 dan Rp1.509.576.255.161,00. Terdapat penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.475.343.528,00 atau 0,69 % persen.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.509.576.255.161
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	7.480.281.981
Hibah Masuk	7.340.382.400
Reklasifikasi Masuk	1.216.373.753
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	175.209.800
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.289.378.340
Saldo Awal	361.307.000
Pembelian	19.300.625.609
Perolehan Lainnya	271.487.125
Total	37.435.046.008
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(7.355.667.481)
Reklasifikasi Keluar	(1.216.373.753)
Koreksi Pencatatan	(4.311.291.781)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(32.769.256.672)
hibah Keluar	(1.578.441.850)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(679.414.999)
Total	(47.910.446.536)
Saldo per 31 Desember 2025	1.499.100.854.633
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1.400.578.530.932)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	98.522.323.701

Penjelasan atas Mutasi Tambah nilai aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transfer masuk senilai Rp7.480.281.981,00 merupakan Transfer masuk berupa alat bantu, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Komputer unit, Unit Peralatan Proses Produksi sesuai dengan Berita Acara Serah Terima antara lain :

NO	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK	NO BAST
1	BRMP Pascapanen	Sekretariat BRMP	B-1072/PL.310/H.09/06/2025 tanggal 3 Juni 2025
2	BRMP Tanaman Pangan	Sekretariat BRMP	903/PL.310/H.2/07/2025 tanggal 17 Juli 2025
3	BRMP Tanaman Hortikultura	Sekretariat BRMP	890/PL.130/H.3/07/2025 tanggal 25 Juli 2025
4	BRMP Jawa Tengah	Sekretariat BRMP	375/PL.130/H.12.13/08/2025 tanggal 13 Agustus 2025
5	BRMP Jawa Barat	BRMP Penerapan	879/PL.310/H.12.11/06/2025 tanggal 3 Juni 2025
6	Sekretariat BRMP	BRMP Tan. Pangan	B.1041/PL.130/H.1/04/2025 tanggal 24 April 2025
7	Sekretariat BRMP	BRMP Tanaman Pangan	B-2511/PL.130/H.1/07/2025 tanggal 17 Juli 2025
8	Biro Perencanaan Setjen	BRMP Perkebunan	1657/PL.320/A.1/09/2025 tanggal 11 September 2025
9	Sekretariat BRMP	BRMP Jateng	2287/PL.130/H.1/07/2025 tanggal 01 Juli 2025
10	BRMP Pascapanen	BRMP Yogyakarta	B-2036/PL.310/H.9/09/2025 tanggal 12 September 2025
11	Sekretariat BRMP	BRMP Tan Industri	B-460/PL.130/H.1/02/2025 tanggal 20 Februari 2025
12	Ditjen Perkebunan	BRMP Tan. Industri	B-4.921/PL.130/E.1/03/2025 tanggal 26 Maret 2025
13	BRMP Padi	BRMP Jabar	B-776/PL.130/H.8/06/2025 tanggal 3 Juni 2025
14	BRMP Jawa Barat	BRMP Penerapan	768/PL.310/H.12.11/05/2025 tanggal 14 Mei 2025
15	BRMP Peternakan dan Keswan	BRMP Rumcil	B-98/PL.310/H.5/01/2025 tanggal 21 Januari 2025
16	Sekretariat BRMP	BRMP Hortikultura	B-25/PL.130/H.1/07/2025 tanggal 25 Juli 2025
17	BRMP Pascapanen	Sekretariat BRMP	B-3715/PL.130/H.1/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025
18	BRMP Lampung	Biro Perencanaan, Setjen	1960/PL.320/A.1/10/2025 tgl 15 Oktober 2025

2. Hibah masuk senilai Rp7.340.382.400,00 merupakan hibah masuk dari dari Hirata Corporation berupa Unit Alat Labotarium sesuai Berita Acara Hibah Nomor B-

- 207/PL.130/H.4.3/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 pada satker BRMP Troa senilai Rp6.763.182.400,00 dan Satu unit peralatan mesin yaitu Ekskavator tipe SANY Y55 untuk pengolahan lahan kerjasama antara PT Pupuk Kalimantan Timur dengan BPSI Tanaman Buah Tropika dalam program Community Forest sesuai BAST Nomor 001/BAST/RST/XII/2023 tanggal 26 Desember 2023 senilai Rp577.200.000,00
3. Reklasifikasi Masuk senilai Rp1.216.373.753,00 merupakan Reklasifikasi Masuk dari Drone/Pesawat Tak Berawak menjadi Kamera Udara Pada satker BPMP Sulawesi Selatan senilai Rp280.491.750,00 Sesuai surat keterangan Kepala Satker Nomor B-245/PL.130/H.12.21/01/2025 tanggal 23 Januari 2025; Pada satker BPMP Yogyakarta menindaklanjuti temuan hasil audit kinerja Itjen Kementan Nomor R.274/PW.130/G.5/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-443/PL.210/H.12.14/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 senilai Rp62.289.000,00; Sepeda Motor (3020104001) disebabkan hasil inventarisasi terdapat kesalahan kodefikasi barang pada satker BRMP Sulawesi Selatan sesuai Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-912/PL.130/H.12.22/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 senilai Rp2.893.000,00; Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya akibat kesalahan pencatatan kodefikasi barang pada satker BRMP Sulawesi Utara sesuai Suket Kepala Satker Nomor B-823/PL.210/H.12.20/12/2025 tgl 22 Desember 2025 dan LCD Projector/Infocus, Lap Top, Mesin Pemanas, P.C Unit serta Alat Pasca Panen Lainnya Pada satker BRMP NTB akibat perbaikan kesalahan pencatatan kodefikasi BMN sesuai Surat Keterangan Kepala satker Nomor 1105/PL.210/H.12.18/12/2025 tgl 31 Desember 2025
 4. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah senilai Rp175.209.800,00 merupakan dasar perubahan atas penambahan nilai BMN dari belanja pemeliharaan dan penggantian sparepart alat besar perawatan traktor roda 4 merk John Deere sesuai invoice nomor 24/inv/ER.05/2025 tanggal 16 Mei 2025 pada satker BRMP Tas Malang dan dasar perubahan atas penambahan nilai BMN dari belanja pemeliharaan dan penggantian sparepart alat laboratorium berupa sparepart Mili Q sesuai invoice nomor 12/inv/ER.03/2025 tanggal 12 Maret 2025 senilai Rp49.840.000,00 Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-383.1/PL.330/H.4.2/05/2025 tanggal 22 Mei 2025 serta perbaikan koreksi pencatatan nilai BMN sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor 1256/Kpts/KU.010/H.12/12/2025 Tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp87.065.800,00
 5. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya senilai Rp1.289.378.340,00 yang merupakan adanya penghentian aset dalam kondisi rusak berat dan berdasarkan hasil inventarisasi internal, namun pada saat reviu oleh Itjen diminta untuk mengaktifkan kembali disebabkan belum ada laporan hasil inventarisasi Pada satker BRMP Rumbes senilai Rp1.100.533.340,00, BBRMP Padi, BRMP Tanaman Buah, BRMP NTB dan BRMP Sulawesi Barat
 6. Saldo Awal senilai Rp181.406.000,00 yang merupakan tindaklanjuti temuan hasil audit kinerja Itjen Kementan terkait pencatatan Mesin Pompa air PMK dan Sprinkler sesuai Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-444.2/PL.210/H.12.14/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 pada satker BRMP Yogyakarta, pada satker BRMP Jawa Barat sesuai Surat keterangan Kepala satker Nomor 2353/PL.320/H.12.11/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 berupa Lemari Penyimpan, Drone, Kamera Digital, Layar Proyektor dan LCD

Projector/Infocus senilai Rp168.211.000 dan pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Serealiala senilai Rp11.690.000,00 sesuai Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B.06/KP.710/H.2.2/10/2025 tanggal 8 Oktober 2025 berupa Mesin Pemotong Rumput, Finger Printer Time and Attendance Acces Control System, Peralatan Komputer Lainnya dan Printer (Peralatan Personal Komputer)

7. Pembelian senilai Rp19.300.625.609,00 berupa Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Angkutan, Alat Laboratorium, Komputer, Alat Studio Komunikasi dan Pemancar serta alat pertanian pada 36 satker lingkup BRMP
8. Perolehan Lainnya senilai Rp271.487.125,00 merupakan adanya pencatatan yang berasal dari akun 521252 (Barang Ekstrakomptabel) pada satker BRMP Lampung sesuai Surat Keterangan Kepala Satker Nomor 884.3/PL.230/H.12.9/12/2025 tgl 30 Desember 2025

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai aset Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Transfer keluar senilai Rp4.579.935.881,00 merupakan Transfer masuk berupa alat bantu, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Komunikasi, Komputer unit, Unit Peralatan Proses Produksi
2. Reklasifikasi Keluar senilai Rp1.216.373.753,00 merupakan adanya Drone/Pesawat Tak Berawak menjadi Kamera Udara Pada satker BPMP Sulawesi Selatan senilai Rp280.491.750,00 Sesuai surat keterangan Kepala Satker Nomor B-245/PL.130/H.12.21/01/2025 tanggal 23 Januari 2025; Pada satker BPMP Yogyakarta menindaklanjuti temuan hasil audit kinerja Itjen Kementan Nomor R.274/PW.130/G.5/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-443/PL.210/H.12.14/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 senilai Rp62.289.000,00; pada satker BRMP Sulawesi Selatan berupa Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya disebabkan hasil inventarisasi terdapat kesalahan kodefikasi barang Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-916/PL.130/H.12.22/07/2025 tanggal 22 Juli 2025 senilai Rp2.893.000; Pada satker BRMP Sulut akibat kesalahan pencatatan kodefikasi barang menjadi Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya sesuai Surat Keterangan Kepala Satker Nomor B-823/PL.210/H.12.20/12/2025 tgl 22 Desember 2025; Pada satker BRMP NTB akibat kesalahan pencatatan kodefikasi BMN Suket Kepala satker Nomor 1105/PL.210/H.12.18/12/2025 tgl 31 Desember 2025 senilai Rp831.820.003,00.
3. Koreksi Pencatatan senilai Rp4.311.291.781,00 merupakan Tindaklanjuti temuan hasil audit kinerja Itjen Kementan Nomor R.274/PW.130/G.5/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Pada satker BRMP Yogyakarta dan satker Sekretariat BRMP serta kesalahan penginputan data transaksi pada satker Sekretariat BRMP, BRMP Jambi, BRMP Sayuran, BRMP Tanaman Hias, BRMP Kalimantan Barat, BRMP Sulawesi Utara, BRMP Tanaman Serelia dan BBPPMP.
4. Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp32.769.256.673,00 sedang dalam proses penghapusan (Rusak Berat) dengan transaksi kode 401 yang menunjukkan bahwa aset-aset tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam operasional sebelum dilakukan penghapusan secara definitif atau pelepasan aset lebih lanjut. Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan akun Peralatan dan Mesin per satker disajikan dalam lampiran.

5. Hibah Keluar senilai Rp1.578.441.850,00 merupakan hibah ke 11 Daerah di Jatim (Banyuwangi, bojonegoro, bondowoso, jember, jombang, lamongan, lumajang, madiun, ngawi, pasuruan, dan tuban Pada satker BRMP Jatim (567364), hibah ke 11 Daerah di Jatim (Banyuwangi, bojonegoro, bondowoso, jember, jombang, lamongan, lumajang, madiun, ngawi, pasuruan, dan tuban yang berasal dari DIPA POLBANGTAN dan Dirjen Tanaman Pangan pada TA 2019
6. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan senilai Rp679.414.999,00 merupakan kesalahan pencatatan karena bersumber dari belanja 526 untuk diserahkan kepada masyarakat pada satker BRMP NTB berupa Alat Pasca Panen Lainnya dan mesin pemanas sesuai Surat keterangan Kepala satker Nomor 1106/PL.210/H.12.18/12/2025 tgl 31 Desember 2025.

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Peralatan dan Mesin *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap namun terdapat pergerakan mutasi karena adanya perekaman ulang kembali BAST Nomor 001/BAST/RST/XII/2023 berupa 1 unit Ekskavator pada satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah sesuai arahan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dikarenakan BAST tersebut telah tercatat pada TA 2026 sebagai penyesuaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHLBJS) yang terbit di TA 2026 sebagai syarat dalam pengajuan MPHLBJS Per 31 Desember 2025 yang telah direvisi dan terbit dengan Nomor 8302084391094337975. Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 *Audited* dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian Transaksi	<i>Unaudited</i>	<i>Audited</i>	Koreksi Nilai
	(1)	(2)	(3) = (1-2)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	1.509.576.255.161	1.509.576.255.161	-
Mutasi Tambah			
Transfer Masuk	7.480.281.981	7.480.281.981	-
Hibah Masuk	7.340.382.400	7.917.582.400	- 577.200.000
Reklasifikasi Masuk	1.216.373.753	1.216.373.753	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	175.209.800	175.209.800	-
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	1.289.378.340	1.289.378.340	-
Saldo Aw al	361.307.000	361.307.000	-
Pembelian	19.300.625.609	19.300.625.609	-
Perolehan Lainnya	271.487.125	271.487.125	-
Total	37.435.046.008	38.012.246.008	- 577.200.000
Mutasi Kurang			
Transfer Keluar	- 7.355.667.481	- 7.355.667.481	-
Reklasifikasi Keluar	- 1.216.373.753	- 1.216.373.753	-
Koreksi Pencatatan	- 4.311.291.781	- 4.888.491.781	577.200.000
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	- 32.769.256.672	- 32.769.256.672	-
hibah Keluar	- 1.578.441.850	- 1.578.441.850	-
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	- 679.414.999	- 679.414.999	-
Total	- 47.910.446.536	- 48.487.646.536	577.200.000
Saldo per 31 Desember 2025	1.499.100.854.633	1.499.100.854.633	-

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan akun Peralatan dan Mesin per satker disajikan dalam lampiran.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,038,879,139,048,00 dan Rp2.038.612.694.811,00. Terdapat Kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp266,444,237,00 atau 0,01 persen.

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.038.612.694.811
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	2.853.722.734
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	5.259.314.603
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	142.880.000
Transfer Masuk	4.389.020.459
Pembelian	302.165.735
Pengembangan Melalui KDP	199.797.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	632.005.000
Reklasifikasi Masuk	4.092.616.100
Hibah Masuk	586.407.000
Perolehan Lainnya	519.435.000
Total	18.977.363.631
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(2.483.769.020)
Transfer Keluar	(4.277.020.459)
Koreksi Pencatatan	(4.831.515.815)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2.711.501.000)
Reklasifikasi Keluar	(4.092.616.100)
Perubahan BMN Ke PI	(314.497.000)
Total	(18.710.919.394)
Saldo per 31 Desember 2025	2.038.879.139.048
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(642.036.951.922)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1.396.842.187.126

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Gedung dan Bangunan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan persatker disajikan dalam lampiran

C.2.4. JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp323.181.401.656,00 dan Rp323.357.846.799,00. Terdapat penurunan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp176.445.143,00 atau turun 0,05% (persen).

Rincian mutasi/perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	323.357.846.799
Mutasi Tambah	
Saldo Awal	11.660.000
Transfer Masuk	1.012.914.386
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.553.163.000
Perolehan Lainnya	198.844.357
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan ak	39.881.500
Total	2.816.463.243,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(1.012.914.386)
Koreksi Pencatatan	(1.339.018.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(640.976.000)
Total	-2.992.908.386,00
Saldo per 31 Desember 2025	323.181.401.656,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-174.783.084.133,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	148.398.317.523,00

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan persatker disajikan dalam lampiran

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.458.381.751,00 dan Rp11.346.628.479,00. Terdapat kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2025 sebesar Rp111,753,272,00 atau naik 0,98% (persen).

Adapun mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	11.346.628.479
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	68.063.800
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan ak	5.180.000
Saldo Awal	6.500.000
Pembelian	494.279.772
Reklasifikasi Masuk	24.733.200
Total	598.756.772
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(68.063.800)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(394.206.500)
Reklasifikasi Keluar	(24.733.200)
Total	(487.003.500)
Saldo per 31 Desember 2025	11.458.381.751

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Aset Tetap Lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya persatker disajikan dalam lampiran.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 2.227.304.532,00 dan Rp2.370.184.532,00 KDP merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran. Terdapat penurunan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp142.880.000,00 atau (6,03) % persen. Mutasi/perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel C.46. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	2.370.184.532
Mutasi Kurang	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(142.880.000,)
Total	(142.880.000,)
Saldo per 31 Desember 2025	2.227.304.532
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	0,
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.227.304.532,

Penjelasan atas Mutasi Kurang nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan kesalahan pencatatan KDP seharusnya didetailkan TA 2024 namun didetailkan di TA 2025 Pada satker BRMP Riau Pagar Permanen sesuai Surat keterangan Kepala Satker Nomor B-113/PL.310/H.12.6/01/2025 tanggal 23 Januari 2025

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Rincian lebih lanjut terkait Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(2.217.398.566.987,00) dan Rp(2.126.705.960.195,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.400.578.530.932	1.396.786.446.533	-3.792.084.399
2	Gedung dan Bangunan	642.036.951.922	569.313.763.631	-72.723.188.291
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	174.783.084.133	160.605.750.031	-14.177.334.102
4	Aset Tetap Lainnya			
Jumlah		2.217.398.566.987	2.126.705.960.195	-90.692.606.792

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	3.792.084.399	38.990.622.489	-35.198.538.090
2	Gedung dan Bangunan	72.723.188.291	71.592.424.353	1.130.763.938
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.177.334.102	13.770.430.905	406.903.197
4	Aset Tetap Lainnya			0
	Jumlah	90.692.606.792	124.353.477.747	-33.660.870.955

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp115.440.000,00 sehingga nilai saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp1.400.463.090.932,00

Koreksi pencatatan tersebut terdapat pada satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika yang merupakan dampak perekaman ulang kembali BAST 1 unit Ekskavator sesuai arahan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dikarenakan BAST tersebut telah tercatat pada TA 2026 sebagai penyesuaian Pencatatan revisi Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHLBJS) Nomor 8302084391094337975 yang sebelumnya terbit di TA 2026. Adapun rincian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 Audited dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Audited
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Penyusutan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 Audited (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Nilai Koreksi (Rp)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1-3)	(5) = (2-3)
1	Peralatan dan Mesin	1.396.786.446.533	1.400.578.530.932	1.400.463.090.932	-3.676.644.399	115.440.000
2	Gedung dan Bangunan	569.313.763.631	642.036.951.922	642.036.951.922	-72.723.188.291	
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	160.605.750.031	174.783.084.133	174.783.084.133	-14.177.334.102	
4	Aset Tetap Lainnya					
	Jumlah	2.126.705.960.195	2.217.398.566.987	2.217.283.126.987	-90.577.166.792	115.440.000

C.2.8. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai saldo properti invertasi yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp14.137.799.000,00** dan **Rp18.259.544.000,00**

Rincian Aset Properti Investasi Per 31 Desember 2025

No	Satker	Nama Aset	Peruntukan	Sesuai Pencatatan		Pemanfaatan Oleh Pihak Lain		
				Vol. (m2)	Nilai Perolehan	Volume	Jenis Pemanfaatan	% Pemanfaatan
1	BPSIT Serealia	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Lahan Pertanian Oleh Koperasi	10.000	1.584.000.000	10.000	Sewa	100
		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	99	196.838.000	99	Sewa	100
2	BPSI TRI	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	235	621.509.000	235	Sewa	100
3	BBPSI Veteriner	Tanah Persil Lainnya	Pekarangan Rumah	5.348	9.413.303.000	5.348	Sewa	100
4	BPSIT Jestro	Mess/Wisma/Bungalow /	Sewa Koperasi (Penginapan)	417	1.043.631.000	417	Sewa	100
5	BBPSI Padi	Tanah Sawah Irigasi	Sewa (Gudang RMU) Sukamandi	192	392.668.000	192	Sewa	100,00
6	BPSIT Pemanis	Bangunan Gedung Laboratorium Lainnya	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	175	453.245.000	175	Sewa	100
7	BPSIP Yogyakarta	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	140	118.108.000	140	Sewa	100
8	BPSIP Jawa Timur	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Pemanfaatan Sewa oleh Koperasi	150	314.497.000	150	Sewa	100
Jumlah				16.756	14.137.799.000	16.756		100,00

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo properti invertasi *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

C.2.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp(763.679.738,00)** dan **Rp(606.733.830,00)**

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap yang diinvestasikan selain untuk Aset Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Nilai Perolehan	14.137.799.000	18.259.544.000
Akm. Penyusutan	- 763.679.738	- 606.733.830
Nilai Buku	13.374.119.262	17.652.810.170

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Akumulasi Penyusutan Properti invertasi *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

C.3. PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.608.489.831,00 dan Rp1.655.227.353,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp46.737.522,00 atau 2.82% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut

NO	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	715.365.464	842.155.657	(126.790.193)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(24.959.913)	(104.126.864)	79.166.951
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.203.385.863	3.275.989.901	(72.604.038)
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.285.301.583)	(2.358.791.341)	73.489.758
JUMLAH		1.608.489.831	1.655.227.353	(46.737.522)

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Piutang Tagihan TP/TGR dengan mutasi tambah senilai Rp4.767.944 yang semula senilai Rp715.365.464 menjadi senilai Rp720.133.408 sehingga Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.613.253.935,00 dan Rp1.655.227.353,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp41.973.418,00 atau 2.54% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024. Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut :

NO	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Tagihan TP/TGR	720.133.408	842.155.657	(122.022.249)
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	(24.983.753)	(104.126.864)	79.143.111
3	Piutang Jangka Panjang Lainnya	3.203.385.863	3.275.989.901	(72.604.038)
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(2.285.281.583)	(2.358.791.341)	73.509.758
JUMLAH		1.613.253.935	1.655.227.353	(41.973.418)

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar

hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp715.365.464,00 dan Rp842.155.657,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp126.790.193,00 atau 15.06% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

**Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BBP2MP	2020	-	45.026.504	(45.026.504)
PRMP PERKEBUNAN	2023	255.867.381	268.367.381	(12.500.000)
BBRM MEKTAN	2021	22.400.000	58.400.000	(36.000.000)
BRMP JATIM	2024	-	51.876.659	(51.876.659)
BRP UAT	2019, 2021	225.085.113	418.485.113	(193.400.000)
BRMP LINGTAN	2025	63.356.250		63.356.250
BRMP SUMUT	2025	148.656.720		148.656.720
JUMLAH		715.365.464	842.155.657	(126.790.193)

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR senilai Rp715.365.464,00 merupakan kategori piutang tagihan tuntutan ganti rugi, dimana piutang ini terdapat pada 5 satker di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian antara lain sebagai berikut:

1. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan memiliki Piutang Tagihan TGR senilai Rp255.367.381,00 merupakan piutang dikarenakan adanya temuan Itjen sesuai dengan LHP Nomor: R.401/PW.180/G.5/12/2023, dimana piutang ini merupakan piutang yang berasal pengeluaran belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan debitor atas nama Nurya Yuniyati, SP.
2. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian Piutang Tagihan TGR senilai Rp22.400.000,00, dimana piutang ini merupakan piutang yang berasal dari biaya kelebihan pembayaran tugas belajar atas nama Firman Satya.
3. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dengan nilai Piutang sebesar Rp225.085.113,00 merupakan piutang dikarenakan adanya temuan Itjen sesuai dengan LHP Itjen, dimana nilai tersebut adalah piutang atas kemahalan harga pakan dan selisih penjualan ternak domba, DOC, dan telur ayam UPBS.
4. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian Piutang Tagihan TGR senilai Rp63.356.250, dimana piutang ini merupakan piutang Biaya Pendidikan yang belum dikembalikan ke Kas Negara dengan debitor atas nama Nurhasan, S.Si, M.Si

5. Satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Piutang Tagihan TGR senilai Rp148.656.720,00 dapat dijelaskan sebagai berikut
- Piutang atas Kehilangan asset sepeda motor senilai Rp1.000.000,00 dengan debitur Atas nama Alfian, SP
 - Piutang atas PNBPN benih padi TA 2024 belum disetor senilai Rp136.842.000,00 dengan debitur atas nama Khasril Atrisiandy, SP
 - Piutang atas kelebihan pembelian pembayaran benih TA 2025 senilai Rp4.006.720,00 dengan debitur atas nama Khasril Atrisiandy, SP
 - Piutang Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan pengecatan Marka Kastin Blok Kantor KP. Pasar Miring TA 2024 senilai Rp6.808.000,00 dengan debitur atas nama Khasril Atrisiandy, SP.

Piutang Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2025 diatas telah mengalami pergerakan nilai jika dibandingkan dengan periode pelaporan keuangan 31 Desember 2024, dimana saat ini nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami penurunan nilai yakni sebesar Rp126.790.193,00. Pergerakan nilai tersebut disebabkan karena adanya pelunasan dan pembayaran angsuran piutang oleh beberapa debitur serta penambahan piutang dari beberapa satker lingkup BRMP. Untuk pelunasan dan pembayaran angsuran piutang terdapat pada 5 satker antara lain meliputi satker :

- BBP2MP senilai Rp45.026.504,00 (Lunas),
- PRMP Pekebunan senilai Rp12.500.000,00,
- BBRM Mektan senilai Rp36.000.000,00,
- BRMP Jawa Timur senilai Rp51.876.659,00 (Lunas),
- BRP Unggas dan Aneka Ternak senilai Rp193.400.000,00,

sehingga total angsuran piutang Tagihan TP/TGR lingkup BRMP sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 senilai Rp338.803.163,00.

Sedangkan untuk penambahan nilai Piutang Tagihan TP/TGR terdapat pada satker :

- BRMP Lingkungan Pertanian senilai Rp63.356.720,00
- BRMP Sumut senilai Rp148.656.720,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Asersi final atas Usulan Jurna Koreksi (UJK), koreksi pencatatan terhadap saldo akun Piutang Tagihan TP/TGR terdapat mutasi tambah senilai Rp4.767.944 pada satker BRMP Lingkungan Pertanian sehingga Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp720.133.408,00 dan Rp842.155.657,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp122.022.249,00 atau 14.49% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2024. Perubahan koreksi nilai ini merupakan tindak lanjut terhadap catatan pemeriksaan BPK sebagai berikut:

1. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Lingkungan Pertanian terdapat kelebihan Pembayaran tunjangan fungsional Temuan Inspektorat Jenderal Kementan dengan Debitur atas nama Marta Sumarno senilai Rp2.652.162;
2. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Lingkungan Pertanian terdapat kelebihan Pembayaran tunjangan fungsional Temuan Inspektorat Jenderal Kementan dengan Debitur atas nama Guntur Shahid senilai Rp2.115.782.

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi Setelah Audit BPK
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BBP2MP	2020	-	45,026,504	(45,026,504)
PRMP PERKEBUNAN	2023	255,867,381	268,367,381	(12,500,000)
BBRM MEKTAN	2021	22,400,000	58,400,000	(36,000,000)
BRMP JATIM	2024	-	51,876,659	(51,876,659)
BRP UAT	2019, 2021	225,085,113	418,485,113	(193,400,000)
BRMP LINGTAN	2025	68,124,194		68,124,194
BRMP SUMUT	2025	148,656,720		148,656,720
JUMLAH		720,133,408	842,155,657	(122,022,249)

C.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp24.959.913,00) dan (Rp104.126.864,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp79.166.951,00 atau 76,03% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut:

Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BBP2MP	2020	-	(225.133)	225.133
PRMP PERKEBUNAN	2023	(1.279.337)	(1.341.837)	62.500
BBRM MEKTAN	2021	(112.000)	(292.000)	180.000
BRMP JATIM	2024	-	(259.383)	259.383
BRP UAT	2019, 2021	(22.508.511)	(102.008.511)	79.500.000
BRMP JATENG	2024	-		-
BRMP LINGTAN	2025	(316.781)		(316.781)
BRMP SUMUT	2025	(743.284)		(743.284)
JUMLAH		(24.959.913)	(104.126.864)	79.166.951

Tabel Kualitas Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR
31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR		
Lancar	490,280,351	(2,451,402)
Kurang Lancar	225,085,113	(22,508,511)
Diragukan	-	-
Macet	-	-
Jumlah	715,365,464	(24,959,913)

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR dengan mutasi tambah senilai (Rp23.840) pada satker BRMP Lingkungan Pertanian sehingga Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp24.983.753,00) dan (Rp104.126.864,00). Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp79.143.111,00 atau 76,01% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2024. Perubahan koreksi nilai ini merupakan tindak lanjut terhadap catatan pemeriksaan BPK sebagai berikut:

1. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Lingkungan Pertanian terdapat kelebihan Pembayaran tunjangan fungsional Temuan Inspektorat Jenderal Kementan dengan Debitur atas nama Marta Sumarno senilai Rp2.652.162 dengan nilai penyisihan kategori Lancar senilai (Rp13.261);
2. Catatan Pemeriksaan BPK pada satker BRMP Lingkungan Pertanian terdapat kelebihan Pembayaran tunjangan fungsional Temuan Inspektorat Jenderal Kementan dengan Debitur atas nama Guntur Shahid senilai Rp2.115.782 dengan penyisihan Kategori Lancar senilai (Rp10.579).

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut:

Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BBP2MP	2020	-	(225,133)	225,133
PRMP PERKEBUNAN	2023	(1,279,337)	(1,341,837)	62,500
BBRM MEKTAN	2021	(112,000)	(292,000)	180,000
BRMP JATIM	2024	-	(259,383)	259,383
BRP UAT	2019, 2021	(22,508,511)	(102,008,511)	79,500,000
BRMP JATENG	2024	-	-	-
BRMP LINGTAN	2025	(340,621)	-	(340,621)
BRMP SUMUT	2025	(743,284)	-	(743,284)
JUMLAH		(24,983,753)	(104,126,864)	79,143,111

Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR
31 Desember 2025

Kualitas Piutang Tagihan TP/TGR	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
Lancar	495,048,295	(2,475,242)
Kurang Lancar	225,085,113	(22,508,511)
Diragukan	-	-
Macet	-	-
Jumlah	720,133,408	(24,983,753)

Rincian penyisihan piutang tagihan TP/TGR sesuai dengan kategori piutangnya disajikan pada lampiran.

C.3.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.203.385.863,00 dan Rp3.275.989.901,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp72.604.038,00) atau 2.22% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BRMP BENGKULU	2018	59.290.945	60.290.945	(1.000.000)
BRMP KANTOR PUSAT	2016	660.336.436	660.336.436	-
BRMP JATENG	2017	86.810.677	88.310.677	(1.500.000)
BRMP SUMBAR	2017	565.226.014	566.026.014	(800.000)
BRMP NTB	2017	264.075.333	264.075.333	-
BRMP RIAU	2019	50.352.675	52.352.675	(2.000.000)
BRP T SAYURAN	2019	1.282.885.600	1.322.885.600	(40.000.000)
BRMP JATIM	2018, 2024	-	52.954.038	(52.954.038)
BRMP SUMUT	2023	208.758.183	208.758.183	-
BRMP PADI	2025	25.650.000	-	25.650.000
JUMLAH		3.203.385.863	3.275.989.901	(72.604.038)

Piutang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2025 diatas telah mengalami pergerakan nilai jika dibandingkan dengan periode pelaporan keuangan 31 Desember 2024, dimana saat ini nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya mengalami penurunan nilai yakni sebesar Rp72.604.038,00. Pergerakan nilai tersebut disebabkan karena adanya pembayaran angsuran piutang oleh beberapa debitur serta penambahan piutang dari beberapa satker lingkup BRMP. Untuk pembayaran angsuran piutang terdapat pada 6 satker antara lain meliputi satker:

- Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Bengkulu senilai Rp1.000.000,00,
- Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah senilai Rp1.500.000,00,
- Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumbar senilai Rp800.000, BRMP RIAU senilai Rp2.000.000,00,
- BPSI Tanaman Sayuran senilai Rp40.000.000,00,

- Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jawa Timur senilai Rp52.954.038,00 (Lunas),

sehingga total angsuran piutang jangka panjang lainnya lingkup BRMP sampai dengan periode pelaporan 31 Desember 2025 senilai Rp98.254.038,00.

Sedangkan untuk penambahan nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya terdapat pada satker BBRMP Tanaman Padi senilai Rp25.650.000,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 Unaudited dan Audited adalah tetap.

C.3.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.285.281.583,00 dan Rp2.358.791.341,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp73.509.758,00 atau 3,12% apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Satker	Tahun Penetapan/ Penagihan Piutang	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
BRMP BENGKULU	2018	(59.290.945)	(60.290.945)	1.000.000
BRMP KANTOR PUSAT	2016	(660.336.436)	(660.336.436)	-
BRMP JATENG	2017, 2024	(43.405.339)	(44.155.339)	750.000
BRMP SUMBAR	2017	(565.226.014)	(566.026.014)	800.000
BRMP NTB	2017	(264.075.333)	(264.075.333)	-
BRMP RIAU	2019	(50.332.675)	(52.352.675)	2.020.000
BRP T.SAYURAN	2019	(641.442.800)	(661.442.800)	20.000.000
BRMP JATIM	2018, 2024	-	(49.068.008)	49.068.008
BRMP SUMUT	2023	(1.043.791)	(1.043.791)	-
BRMP PADI	2025	(128.250)		(128.250)
JUMLAH		(2.285.281.583)	(2.358.791.341)	73.509.758

Rincian Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR
31 Desember 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR		
Lancar	234.408.183	(1.172.041)
Kurang Lancar	-	-
Diragukan	1.369.696.277	(684.848.139)
Macet	1.599.281.403	(1.599.281.403)
Jumlah	3.203.385.863	(2.285.301.583)

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 Unaudited dan Audited adalah tetap.

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. (sesuai SAP)

Saldo Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing senilai **Rp29.472.145.940,00** dan **Rp29.948.319.831,00**. Terjadi penurunan aset tak berwujud sebesar Rp468.058.891,00 atau 1,56 %. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan	%
Hak Cipta	28.025.000,	28.025.000,	0,	0,00
Paten	498.747.250,	512.872.250,	-14.125.000,	2,83
Software	3.761.147.826,	4.212.716.717,	-451.568.891,	12,01
Hasil Kajian/ Penelitian	24.710.591.864,	24.710.591.864,	0,	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	473.634.000,	475.999.000,	-2.365.000,	0,50
JUMLAH	29.472.145.940,	30.004.827.154,	-468.058.891,	1,81

Rincian mutasi Aset Tetap Berwujud per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	29.940.204.831
Mutasi Tambah	
Hibah Masuk	45.448.000
Reklasifikasi Masuk	24.733.200
Total	70.181.200
Mutasi Kurang	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(513.506.891)
Reklasifikasi Keluar	(24.733.200)
Total	(538.240.091)
Saldo per 31 Desember 2025	29.472.145.940

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Aset Tak Berwujud *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud persatker disajikan dalam lampiran.

C.4.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp20.732.378.649,00 dan Rp7.480.811.324,00. Nilai tersebut masuk dalam dalam rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) pada periode pelaporan 31 Desember 2024.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp20.732.378.649,00 dan Rp7.480.811.324,00. Nilai tersebut masuk dalam dalam rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) pada periode pelaporan 31 Desember 2025. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.251.567.325,00 atau 177,14% apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 yang disajikan merupakan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. (tidak ada definisi hal terkait dalam sap), dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaanya per satker BRMP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Satker	Jumlah Kontrak/ Pekerjaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Sekretariat BRMP	4	1.009.792.490	2.400.718.474	(1.390.925.984)
2	BBPPMP	37	11.593.706.446	0	11.593.706.446
3	BRMP Banten	1	45.199.040	0	45.199.040
4	BRMP NTB	19	4.271.499.021	0	4.271.499.021
5	BRMP Sulut	7	3.812.181.652	0	3.812.181.652
6	BRMP Tan. Padi			4.718.800.700	(4.718.800.700)
7	BRMP Babel			200.000.000	(200.000.000)
8	BRMP Sulsel			57.365.200	(57.365.200)
9	BRMP Tan. Sayur			93.975.000	(93.975.000)
10	BRMP Jabar			9.951.950	(9.951.950)
Jumlah			20.732.378.649	7.480.811.324	13.251.567.325

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2023, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan Tabel diatas, sampai dengan periode pelaporan Keuangan per 31 Desember 2025 satker lingkup BRMP yang terdapat saldo Dana yang Dibatasi Penggunaanya sebanyak 5 Satuan Kerja yakni Sekretariat Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian, Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB, dan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulut. Kelima satuan kerja tersebut masing-masing memiliki jumlah kontrak pekerjaan yang belum selesai sampai dengan periode pelaporan keuangan yakni sebagai berikut:

1. Balai Besar Pengembangan Dan Penerapan Modernisasi Pertanian terdapat 35 Kontrak Pekerjaan sebesar Rp11.593.706.446,00 antara lain
 - Belanja modal peralatan dan mesin program ICARE
 - Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Sarana Laboratorium
 - Belanja peralatan pengolah data ICARE
 - Dukungan Perbenihan Kawasan Korporasi ICARE Jawa Tengah dan Kalimantan Barat
 - Implementasi Kit Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing (HLB) untuk Mendeteksi Kesehatan Benih dan Tanaman Jeruk di Kabupaten Sambas)
 - Implementasi Pembibitan, teknologi digitalisasi recording ternak dan teknologi biokomplek Zink untuk peningkatan produktifitas kambing potong di kabupaten tanggamus

- Implementasi Sistem Irigasi Hemat Air dengan Teknologi IoT pada Tanaman Jagung untuk Peningkatan Kualitas dan Produksi di Kawasan ICARE Kabupaten Minahasa Utara
- Implementasi Smart Irrigation Terstandar dalam Budidaya Kakao untuk Penguatan Rantai Nilai Komoditas Pertanian di Sulawesi Tenggara
- Implementasi soil sensor untuk deteksi cepat status hara pada produksi benih kentang di kabupaten garut jawa barat
- Inovasi pakan adaptif kacang ratu BW dan Teknologi hijauan sebagai penggerak modernisasi peternakan rakyat berbasis koperasi
- Integrasi Sistem Informasi dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
- Manufakturing dan Aplikasi Biochar dan Asap Cair untuk keberlanjutan Budidaya Kopi dan Mitigasi Perubahan Iklim
- Model penerapan inovasi alsintan dan sinergi kelembagaan dalam kerangka MP3MI Mendukung rantai nilai komoditas padi
- Model Pengembangan Kelembagaan Baru (New Institutional) Mendukung Rantai Nilai Kawasan Pertanian
- Pemanfaatan limbah batang pohon pisang menjadi kuas serat alami pengganti kuas bulu hewan, silikon, sintesis untuk meningkatkan ekonomi petani
- Pembelian Bahan Pendukung Lapang Laboratorium
- Pembelian belanja barang bahan pendukung lab
- Penerapan Budidaya padi presisi untuk peningkatan produksi padi di kabupaten sambas, kalimantan barat
- Penerapan Modernisasi Pertanian Mendukung Pengembangan Kawasan Mandiri Benih Padi
- Penerapan teknologi energi baru terbarukan dan smart system monitoring berbasis smartphone dengan pompa tenaga surya
- Penerapan Teknologi Tepat Guna Mesin Pasca Panen Kentang pada Kelompok Tani Kentang di Kecamatan Pasirwangi Kab. Garut
- Pengadaan jasa konsultan individu konsultan keuangan
- Pengadaan jasa konsultan individu konsultan lingkungan program ICARE
- Pengadaan jasa konsultan individu konsultan monitoring dan evaluasi program ICARE
- Pengadaan jasa konsultan individu konsultan Sistem Informasi (Informasi Manajemen)
- Pengadaan Jasa Konsultasi Individu program ICARE
- Peningkatan Daya Saing Jeruk Siam melalui Inovasi Kemasan dan Teknologi Grading untuk Meningkatkan Pemasaran secara Lokal dan Nasional
- Peningkatan mutu kopi petik merah dan grade 1-3 berbasis korporasi petani melalui inovasi fermentasi An-Aerob
- Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pisang Melalui Diversifikasi Olahan Pisang dan Creative Marketing
- Peningkatan produktivitas kentang melalui inovasi penggunaan asam humat
- Penyediaan benih kakao terstandar dan peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan produktivitas kakao

- Produksi Benih Kentang Bio Granola untuk Mendukung Kinerja Perbenihan Kentang di Kab. Gowa
 - Produksi dan Penyebaran Benih Rumput Biograss Agrinak untuk Mendukung Agribisnis Ternak
 - Real Time Monitoring Komoditas ICARE
 - Sinergi pemanfaatan limbah pertanian dan produksi biochar diperkaya hara untuk efisiensi pemupukan dan keberlanjutan kebun kopi rakyat secara cerdas
 - Teknologi Pengolahan Biji Kopi Mutu Rendah sebagai Personal Care untuk Meningkatkan Nilai Tambah Kopi Robusta Lampung Di kabupaten Tanggamus
2. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten terdapat 1 Kontrak pekerjaan sebesar Rp45.199.040,00 berupa Pengadaan Sarana Laboratorium
3. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat terdapat 19 Kontrak pekerjaan senilai Rp4.271.499.021,00 antara lain :
- Pengadaan Pakan Ayam
 - 2 Kontrak Pengadaan Laptop
 - Pengadaan Scanner
 - Pengadaan Freezer
 - 2 Kontrak Pengadaan Benih Jagung Hibrida Varietas Raja 118
 - Pengadaan Grain Moisture Tester
 - Pengadaan Insektisida Prevator
 - Pengadaan Mesin Jahit Karung
 - Pengadaan Mesin Pemipil Jagung
 - Pengadaan Mesin tetas telur
 - Pengadaan Paket Dryer 30 ton
 - Pengadaan PC Computer
 - Pengadaan Pemipil mobile
 - Pengadaan Projector
 - Pengadaan Televisi
 - Pengadaan Mesin Pemecah jagung
 - Pengadaan Benih Jagung varietas SJI
4. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara terdapat 7 Kontrak pekerjaan sebesar Rp3.812.181.652,00 antara lain :
- 4 kontrak Kegiatan Penyediaan Matching Grants KP untuk pembiayaan bersama kebutuhan bisnis awal Korporasi Petani
 - Pengadaan Kendaraan Fungsional (Lab Mobile Vehicle) SUV Double Cabin 2500 cc, 4 Silinder pada Kegiatan Peningkatan layanan publik untuk dukungan rantai nilai
 - 2 kontrak Pengadaan Peralatan dan Mesin Printer pada Kegiatan Manajemen Program ICARE
5. Sekretariat Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian terdapat 4 Kontrak Pekerjaan senilai Rp1.009.792.490,00 antara lain
- 2 Kontrak Pekerjaan Jasa Komunikasi Data dan Informasi
 - Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan/Cleaning Service
 - Sewa Kendaraan Roda 4 untuk tim pendamping Teknis Kementan

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya/RPATA *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya/RPATA di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan pada lampiran.

C.4.3. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Badan Perakitan dan modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp134.879.996.155,00 dan Rp116.495.016.660,00. Terjadi penurunan aset lain-lain sebesar Rp18.384.979.495,00 atau 15,78 %. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	116.495.016.660
Mutasi Tambah	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	37.029.447.063
Transfer Masuk Hentiguna	17.900.000
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	706.217.586
Total	37.753.564.649,00
Mutasi Kurang	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1.966.444.840)
Penghapusan	(166.032.700)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(17.900.000)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(17.218.207.614)
Total	-19.368.585.154,00
Saldo per 31 Desember 2025	134.879.996.155,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-73.038.848.460,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	61.841.147.695,00

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan nilai bertambah senilai Rp417.749.718,00 sehingga nilai saldo Aset Lain lain per 31 Desember 2025 *Audited* adalah senilai Rp135.043.740.345,00

Koreksi pencatatan tersebut terdapat pada satuan kerja Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara yang merupakan pencatatan reklasifikasi terkait saldo ketekoran kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp417.749.718,00 sebagai upaya administratif atas hasil Rapat Tripartit dalam rangka Penyusunan Asersi Final LKKL, LKBUN, LKPP Tahun 2025 tanggal 29 April 2026 dengan tidak menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban ketekoran kas untuk ditetapkan menjadi TP/TGR. Pencatatan reklasifikasi tersebut mempedomani ketentuan akuntansi Buletin Teknis Nomor 16 tentang akuntansi piutang berbasis akrual yang

dinyatakan bahwa terkait sisa kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan harus dicatat ke Aset Lainnya karena tidak menggambarkan posisi kas yang sebenarnya sesuai Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-659/PB.3/2026 Tanggal 5 Mei 2026

Adapun rincian mutasi/perubahan nilai Aset Lain lain per 31 Desember 2025 *Audited* tidak terdapat koreksi sehingga nilai mutasi Aset Lain lain *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

C.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (RP73,038,848,460) dan (Rp49.381.194.631,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	29.472.145.940,00	-4.809.580.223,00	24.662.565.717,00
2	Aset Lain-lain	13.487.996.155,00	-68.229.268.237,00	-54.741.272.082,00
Total		42.960.142.095,00	-73.038.848.460,00	-30.078.706.365,00

Setelah dilaksanakan Audit BPK-RI dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi sehingga nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya *Unaudited* dan *Audited* per 31 Desember 2025 adalah Tetap

C5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp13.696.613.137,00 dan Rp10.086.415.857,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.610.197.280,00 atau 35,31% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Pihak Ketiga	11.245.999.981	8.311.253.041	- 2.934.746.940	- 35,31
Utang Yg Belum Ditagihkan	-	1.775.162.816	1.775.162.816	100,00
Hibah Yang Belum Disahkan	577.200.000	-	577.200.000	
Pendapatan Diterima Dimuka	1.044.980.272	-	1.044.980.272	
Uang Muka KPPN	804.593.634	-	804.593.634	
Utang Jangka Pendek Lainnya'	23.839.250	-	23.839.250	
Jumlah	13.696.613.137	10.086.415.857	- 3.610.197.280	- 35,79

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan nilai berkurang senilai Rp1.166.146.301,00, sehingga saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 *Audited* senilai Rp12.530.466.836,00. Perubahan rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Pihak Ketiga	11.245.999.981	8.311.253.041	- 2.934.746.940	- 35,31
Utang Yg Belum Ditagihkan	-	1.775.162.816	1.775.162.816	100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	873.783.689	-	873.783.689	
Uang Muka KPPN	386.843.916	-	386.843.916	
Utang Jangka Pendek Lainnya'	23.839.250	-	23.839.250	
Jumlah	12.530.466.836	10.086.415.857	- 2.444.050.979	- 24,23

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.245.999.981,00 dan Rp8.311.253.041,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.934.746.940,00 atau 35,31% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki rincian akun utang kepada pihak ketiga meliputi belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.227.187	59.552.918	- 54.325.731
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	-		-
	Jumlah		5.227.187	59.552.918	- 54.325.731
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	Belanja Barang Operasional	62.970.259	-	62.970.259
		Belanja Jasa	805.337.921	3.310.411.879	- 2.505.073.958
		Belanja Pemeliharaan	-	222.432.347	- 222.432.347
	Jumlah		868.308.180	3.532.844.226	- 2.664.536.046
3	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	Belanja Barang	10.327.265.574	55.197	10.327.210.377
		Belanja Modal	45.199.040	4.718.800.700	- 4.673.601.660
	Jumlah		10.372.464.614	4.718.855.897	5.653.608.717
Total			11.245.999.981	8.311.253.041	2.934.746.940

Berdasarkan tabel diatas rincian Utang Kepada Pihak Ketiga pada periode pelaporan keuangan per 31 Desember 2025 Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat diungkapkan sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.227.187,00 terdapat pada 2 satker lingkup BRMP yakni satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian NTT dan Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Yogyakarta. Utang ini adalah belanja gaji dan tunjangan PNS yakni merupakan beban kekurangan pembayaran gaji atas kenaikan PNS dan kekurangan pembayaran tunjangan fungsional PNS yang baru akan dibayarkan melewati periode pelaporan keuangan per 31 Desember tahun 2025.
2. Utang Belanja Barang yang Masih Harus di Bayar senilai Rp868.308.180,00 terdiri dari Utang Belanja Jasa senilai Rp805.337.921,00 dan Belanja Barang Operasional senilai Rp62.970.259,00. Utang ini terdapat pada 24 satuan kerja lingkup BRMP yakni merupakan utang tagihan pemakaian listrik, air, telepon, dan Internet (*Service Provider*) yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari 2025.
3. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya senilai Rp10.372.464.614,00 terdiri dari:

- a. Utang Belanja Barang senilai Rp10.327.265.574,00 yakni utang pihak ketiga sebagai berikut:
 - Utang pekerjaan pengadaan jasa cleaning service, jasa komunikasi data & informasi bogor, jasa komunikasi data & informasi, serta sewa kendaraan senilai Rp1.009.792.490,00 pada satker Sekretariat BRMP.
 - Utang pada 16 paket pekerjaan pengadaan senilai Rp3.426.402.771,00 pada satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian NTB dan 36 paket pengadaan senilai Rp5.423.338.630,00 pada satker BBPPMP yang. Utang belanja barang ini belum selesai pada periode pelaporan keuangan 31 Desember 2025 melalui mekanisme RPATA.
 - Utang pada pihak ketiga senilai Rp467.715.000 merupakan utang pada satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara. Transaksi ini terjadi dikarenakan terdapat Surat Perintah Bayar (SPby) yang telah diinput oleh Bendahara Pengeluaran pada Modul Pembayaran, namun belum dibuatkan atau input kuitansi.
 - Sisa dana berupa bunga bank direkening pada kegiatan ICARE senilai Rp11.487,00 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Lahan Rawa senilai Rp5.196,00 BRMP Gorontalo senilai Rp2.082,00 dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanah & Pupuk senilai Rp9.405,00.
- b. Utang Belanja Modal senilai Rp45.199.040 pada satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Banten yakni merupakan Dana RPATA untuk pekerjaan pengadaan laboratorium berupa pengadaan alat timbangan analitik, *rice grader*, dan pengujian mutu beras, dimana utang ini terjadi karena SP2D terbit pada bulan Januari 2026.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo akun Utang Kepada Pihak Ketiga Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited dan Audited* adalah tetap.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan pada lampiran.

C.5.2. Hibah Yang Belum Disahkan

Hibah langsung yang Belum Disahkan merupakan Hibah yang diterima namun proses pengajuan belum selesai sampai dengan tanggal periode pelaporan.

Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp577.200.000,00 dan Rp0,00. Saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp577.200.000,00 apabila dibandingkan dengan saldo Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2024.

Hibah yang Belum Disahkan di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan hibah Aset peralatan dan Mesin berupa 1 unit Ekskavator untuk pengolahan lahan merupakan kerjasama antara PT Pupuk Kalimantan Timur dengan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika dalam program Community Forest. Program ini bertujuan untuk menurunkan serapan gas emisi rumah kaca dalam upaya meminimalisir dampak perubahan iklim dan mendukung tugas dan fungsi Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika Solok.

Transaksi Hibah yang belum disahkan ini masih tercatat di neraca laporan keuangan per 31 Desember tahun 2025 pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah dengan kronologis penjelasan sebagai berikut:

1. Hibah Aset tersebut telah diajukan pengusulan MPHLBJS (Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa) ke KPPN dengan melampirkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SP2HL dan SPTMHL) beserta data dukungannya pada tanggal 6 Januari 2025 (tidak melewati dateline). Hal ini tentunya telah sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga diterima KPPN paling lambat tanggal 7 Januari 2026.
2. Pihak KPPN juga telah memberikan persetujuan atas pengusulan pengesahan hibah dimaksud, namun ketika proses akhir ke KPPN proses hibah telah ditutup yang semula diperkirakan MPHLBJS terbit pada tahun 2025 ternyata dokumen MPHLBJS tersebut terbit pada bulan Januari tahun 2026 sehingga pada Neraca Laporan Keuangan Semester II 2025 masih terdapat/tercatat sebagai Hibah Langsung yang Belum Disahkan (Neraca Percobaan terlampir) dan ketika adanya Pengaturan Kembali Atas Perpanjangan Penyelesaian Administratif sesuai S-18/PB/2026 tanggal 23 Januari 2026, pihak KPPN setempat tidak mengkonfirmasi kembali untuk dapat dilakukan perubahan tahun pengesahan hibah di TA 2025.
3. Berkenaan dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada poin ketiga, satker BRMP Tanaman Buah melakukan Permohonan Perubahan Tahun Pengesahan Hibah kepada KPPN setempat melalui surat Kepala BRMP Tanaman Buah Tropika Nomor B-238/PL.130/H.3.2/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 dan kemudian ditanggapi kembali dengan surat Kepala KPPN Tipe A1 Solok Nomor S-81/KPN.0303/2026 tanggal 30 Januari 2026 yang menyatakan bahwa permohonan perubahan tahun pengesahan hibah yang semula tercatat pada tahun 2026 menjadi tahun 2025 tidak dapat dikabulkan (Surat Tanggapan KPPN Terlampir).

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan pada saldo Hibah yang Belum Disahkan dengan mutasi kurang senilai Rp577.200.000,00, sehingga nilai Hibah yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 Audited yakni sebesar Rp00,00. Nilai ini dapat dipenuhi dikarenakan telah dilakukan pembatalan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat (MPHLBJS) Nomor: 8285606471058347144 Tanggal 12 Januari 2026 oleh pihak KPPN Solok dan telah diperbarui/dikoreksi dengan dokumen MPHLBJS Nomor: 8302084391094337975 Tanggal 31 Desember Tahun 2025.

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan. (Bultek no.22 pendapatan diterima dimuka).

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.044.980.272,00 dan Rp1.775.162.816,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami penurunan senilai Rp730.182.544,00 apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.044.980.272	1.775.162.816	- 730.182.544
Jumlah	1.044.980.272	1.775.162.816	- 730.182.544

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi pencatatan pada saldo Pendapatan Diterima Dimuka dengan mutasi kurang senilai Rp171.196.583,00, sehingga nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 Audited yakni sebesar Rp93.537.292,00. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Audited i disajikan pada tabel berikut sebagai berikut:

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	873.783.689	1.775.162.816	- 901.379.127
Jumlah	873.783.689	1.775.162.816	- 901.379.127

Pendapatan sewa diterima dimuka pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdapat pada 6 (enam) satuan kerja yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Satker	30//2024	Penjelasan
1	BBRMP Veteriner	39.972.916,	Sewa lahan sebanyak 5 bidang, diantara nya 4 bidang untuk tempat tinggal dan 1 bidang untuk usaha, dimana untuk 4 bidang masing masing penyewa seluas 150m2 dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp.1.298.417,- selama 3 tahun, sedangkan untuk 1 bidang seluas 300m2 dipergunakan untuk biang usaha dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp.709.250 per tahun selama 3 tahun.
2	BBRMP Tan. Padi	12.869.913,	Pendatan dari sewa Koperasi Kopkaritan Sukamandi, ATM, Kantin, dan Gedung Rice Milling Unit (RMU)
3	BRMP Serealia	93.537.292,	1. Sewa lahan 64ha senilai Rp81.927.667,00 3. Sewa Lahan Sawah 1ha senilai Rp3.080.000,00 4. Sewa Kantor Koperasi senilai Rp8.529.625,00
4	BPSIP Yogyakarta	6.980.250,	Pendapatan dari sewa gedung bangunan kantor lainnya untuk koperasi.
5	LRMP Ruminansia Besar	8.894.333,	Pendapatan sewa lahan kebun percobaan Runukklindungan
6	BBPM Mekanisasi Pertanian	711.528.985,	Pendapatan Diterima Di Muka antara lain meliputi sewa penempatan ATM BRI dengan jangka waktu sewa selama 3 tahun terhitung mulai 14 Juni 2024 sampai 13 Juni 2027, Sewa Auditorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Serpong dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai 7 Maret 2025 sampai 6 Agustus 2030, dan Sewa lahan untuk jalan akses masuk kantor dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai 21 Oktober 2025 sampai 20 Oktober 2030
Total		873.783.689	-

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan pada lampiran.

C.5.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp804.593.634,00 dan R0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Setelah audit BPK RI dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Uang Muka dari KPPN dengan mutasi kurang senilai Rp417.749.718,00 sehingga nilai akun Uang Muka dari KPPN pada neraca per 31 Desember 2025 *Audited* yakni sebesar Rp386.843.916,00. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar dan terdapat pada satu satuan kerja dibawah BRMP yaitu Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp386.843.916,00 dan R0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar dan terdapat pada satu satuan kerja dibawah BRMP yaitu Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara.

C.5.5. Uang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp23.839.228,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.839.228,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024. Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan utang pajak kegiatan ICARE pada Bendaharan Pengeluaran yang belum Disetor sampai dengan periode 31 Desember 2025. Utang pajak ini terdapat pada satuan kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara. Setelah periode Pelaporan Keuangan 31 Desember 2025 Utang Jangka Pendek Lainnya tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada bulan Januari Tahun 2026 (Kode Billing dan Bukti Penerimaan Negara Terlampir).

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal tidak terdapat koreksi, sehingga saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2025 *Unaudited dan Audited* adalah tetap.

C.6. EKUITAS

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. (Sesuai SAP).

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp44.157.311.747.023,00 dan Rp44.242.343.522.698,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp85.031.775.675 atau 0,19% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal saldo Ekuitas *Audited* menjadi Rp44.159.917.817.556,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Kegiatan Operasional ini dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut.

**Perbandingan Kegiatan Operasioanal Laporan Operasional (LO)
periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Jumlah Pendapatan	38.474.314.316	171.196.583	38.645.510.899	31.889.767.201	6.584.547.115	21,18
Jumlah Beban	1.014.650.443.891	(1.531.135.160)	1.013.119.308.731	941.499.134.872	73.151.309.019	7,61
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(976.176.129.575)	1.702.331.743	(974.473.797.832)	(909.609.367.671)	(66.566.761.904)	7,13

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar [Rp38.474.314.316,00](#) dan Rp31.889.767.201,00. Nilai Pendapatan Operasional 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.584.547.115,00 atau 20,65% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional 2024.

Nilai Pendapatan Operasional 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP Lainnya).

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pendapatan Operasional *Audited* menjadi senilai [Rp38.645.510.899,00](#).

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar [Rp38.474.314.316,00](#) dan Rp31.889.767.201,00, mengalami kenaikan sebesar Rp6.584.547.115,00 atau 20,65%.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya *Audited* menjadi senilai [Rp38.645.510.899,00](#).

**Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional (LO)
periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

AKUN	URAIAN	31 Desember 2025 Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	21.604.342.504	-	21.604.342.504	14.865.063.113	6.739.279.391	45,34
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	-	0	459.527.892	(459.527.892)	(100,00)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.559.412.715	171.196.583	2.730.609.298	3.032.461.885	(301.852.587)	(9,95)
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	400.000	-	400.000	24.677.886	(24.277.886)	(98,38)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	33.936.800	-	33.936.800	0	33.936.800	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.354.757.526	-	2.354.757.526	969.925.000	1.384.832.526	142,78
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	50.000.000	-	50.000.000	128.300.000	(78.300.000)	(61,03)
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	7.359.888.532	-	7.359.888.532	7.104.888.500	255.000.032	3,59
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.600.000	-	1.600.000	3.000.000	(1.400.000)	(46,67)
425429	Pendapatan Pengembangan SDM Lainnya	132.093.000	-	132.093.000	125.411.000	6.682.000	5,33
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	495.698.000	-	495.698.000	222.984.000	272.714.000	122,30
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	2.000.000	-	2.000.000	0	2.000.000	-
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.865.485.621	-	1.865.485.621	2.582.033.300	(716.547.679)	(27,75)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	15.480.000	-	15.480.000	6.610.000	8.870.000	134,19
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.918.031.125	-	1.918.031.125	2.307.707.227	(389.676.102)	(16,89)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.188.033	-	1.188.033	6.772.794	(5.584.761)	(82,46)
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.918.159	-	4.918.159	46.191.059	(41.272.900)	(89,35)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	1.809.000	-	1.809.000	0	1.809.000	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	73.273.301	-	73.273.301	4.213.545	69.059.756	1.638,99
Jumlah Pendapatan		38.474.314.316	171.196.583	38.645.510.899	31.889.767.201	6.755.743.698	21,18

Perbandingan realisasi PNBP Lainnya di LRA dengan nilai PNBP Lainnya di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan pada tabel berikut.

AKUN	URAIAN	LO Unaudited	Koreksi	LO Audited	LRA	Selisih
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	21.604.342.504	-	21.604.342.504	21.610.342.504	(6.000.000)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	2.559.412.715	171.196.583	2.730.609.298	1.703.233.171	1.027.376.127
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	400.000	-	400.000	400.000	-
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	33.936.800	-	33.936.800	33.936.800	-
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.354.757.526	-	2.354.757.526	2.354.757.526	-

AKUN	URAIAN	LO Unaudited	Koreksi	LO Audited	LRA	Selisih
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi	7.359.888.532	-	7.359.888.532	7.360.236.032	(347.500)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000	-
425429	Pendapatan Pengembangan SDM Lainnya	132.093.000	-	132.093.000	132.093.000	-
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	495.698.000	-	495.698.000	495.698.000	-
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	1.865.485.621	-	1.865.485.621	2.037.863.089	(172.377.468)
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	15.480.000	-	15.480.000	15.480.000	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.918.031.125	-	1.918.031.125	1.918.031.125	-
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.188.033	-	1.188.033	1.188.033	-
425811	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.918.159	-	4.918.159	53.966.639	(49.048.480)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	1.809.000	-	1.809.000	1.809.000	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	73.273.301	-	73.273.301	73.273.301	-
Jumlah Pendapatan		38.474.314.316	171.196.583	38.645.510.899	37.845.908.220	799.602.679

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Pendapatan di LRA dengan nilai Pendapatan di LO sebesar Rp628.406.096,00. Penjelasan atas selisih tersebut karena adanya Jurnal Penyesuaian dengan rincian:

- a) Pada akun 425112 terdapat selisih (Rp6.000.000,00) merupakan jurnal Piutang PNPB
- b) Pada akun 425131 terdapat selisih:
 - a) Jurnal Piutang PNPB senilai (Rp9.660.000,00)
 - b) Jurnal Pendapatan Sewa Diterima Dimuka senilai Rp753.577.044,00
 - c) Jurnal Pendapatan yang Masih Harus Diterima senilai Rp112.262.500,00
- c) Pada akun 425289 terdapat selisih Rp347.500,00 merupakan jurnal Kas Di Bendahara Penerimaan
- d) Pada akun 425436 terdapat selisih (Rp172.377.468,00) merupakan jurnal Piutang Lainnya
- e) Pada akun 425811 terdapat selisih (Rp49.048.480,00) merupakan jurnal Piutang PNPB

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan Koreksi atas Kelebihan Diterima di Muka untuk 3 Perjanjian Sewa pada Satker BRMP Serelia senilai Rp171.196.583,00.

BEBAN OPERASIONAL

Semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp1.014.353.032.519,00** dan Rp941.499.134.872,00. Nilai Beban 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp72.853.897.647,00 atau 7,74% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Operasional *Audited* menjadi senilai **Rp1.013.119.308.731,00**.

Rincian nilai Beban 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025 Unaudited (Rp)	Koreksi	31 Desember 2025 Audited (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
Beban Pegawai	286.463.856.156	(84.370.383)	286.379.485.773	278.176.614.166	8.202.871.607	2,95
Beban Persediaan	63.332.634.350	(433.476.300)	62.899.158.050	40.542.300.690	22.356.857.360	55,14
Beban Barang dan Jasa	303.984.523.589	(641.789.885)	303.342.733.704	277.810.572.167	25.532.161.537	9,19
Beban Pemeliharaan	116.566.588.168	(2.778.969)	116.563.809.199	109.386.006.236	7.177.802.963	6,56
Beban Perjalanan Dinas	85.856.051.726	(42.472.091)	85.813.579.635	87.890.644.228	(2.077.064.593)	(2,36)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	32.538.905.763	0	32.538.905.763	11.022.852.956	21.516.052.807	195,19
Beban Penyusutan dan Amortisasi	125.115.341.932	(28.860.000)	125.086.481.932	136.782.541.364	(11.696.059.432)	(8,55)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	495.130.835	23.840	495.154.675	(112.396.935)	607.551.610	(540,54)
Jumlah Beban	1.014.353.032.519	(1.233.723.788)	1.013.119.308.731	941.499.134.872	71.620.173.859	7,61

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp286.463.856.156,00** dan Rp278.176.614.166,00. Nilai Beban Pegawai 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp8.287.241.990,00 atau 2,98%.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Pegawai *Audited* menjadi senilai **Rp286.379.485.773,00**.

Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini.

Perbandingan Beban Pegawai periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024

Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited

Akun	Uraian	31 Desember 2025 Unaudited (Rp)	Koreksi	31 Desember 2025 Audited (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	185.170.264.928	(1.976.005)	185.168.288.923	189.868.081.565	(4.699.792.642)	(2,48)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.592.853	(664)	2.592.189	2.732.542	(140.353)	(5,14)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.277.170.447	(1.922.350)	13.275.248.097	13.847.181.257	(571.933.160)	(4,13)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	3.716.807.879	(79.040)	3.716.728.839	3.930.375.315	(213.646.476)	(5,44)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.819.850.000	(290.000)	1.819.560.000	1.821.039.772	(1.479.772)	(0,08)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16.367.513.208	(6.869.896)	16.360.643.312	15.409.283.550	951.359.762	6,17
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.728.478.252	-	1.728.478.252	1.781.961.798	(53.483.546)	(3,00)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	9.652.548.780	-	9.652.548.780	10.015.169.150	(362.620.370)	(3,62)
511129	Beban Uang Makan PNS	26.060.557.100	(67.209.750)	25.993.347.350	25.826.482.600	166.864.750	0,65
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	650.000	-	650.000	2.700.000	(2.050.000)	(75,93)
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	353.060.000	-	353.060.000	356.500.000	(3.440.000)	(0,96)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4.199.383.418	(2.595.228)	4.196.788.190	4.502.626.664	(305.838.474)	(6,79)
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	12.903.540.500	-	12.903.540.500	3.577.774.987	9.325.765.513	260,66
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	288.048	-	288.048	67.728	220.320	325,30
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	856.986.007	-	856.986.007	170.360.940	686.625.067	403,04
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	237.817.218	-	237.817.218	34.845.438	202.971.780	582,49
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.096.971.788	-	1.096.971.788	541.450.000	555.521.788	102,60
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	875.254.167	-	875.254.167	165.334.860	709.919.307	429,38
511628	Beban Uang Makan PPPK	2.716.822.100	(3.427.450)	2.713.394.650	579.220.000	2.134.174.650	368,46
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	23.900.000	-	23.900.000	5.100.000	18.800.000	368,63
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	394.136.663	-	394.136.663	-	394.136.663	0,00
512211	Beban Uang Lembur	4.853.641.800	-	4.853.641.800	5.625.175.000	(771.533.200)	(13,72)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	155.621.000	-	155.621.000	113.151.000	42.470.000	37,53
	Jumlah	286.463.856.156	(84.370.383)	286.379.485.773	278.176.614.166	8.202.871.607	2,95

Perbandingan realisasi Beban Gaji di LRA dengan nilai Beban Gaji di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan pada tabel berikut.

Akun	Uraian	LO (Rp) Unaudited	Koreksi	LO (Rp) Audited	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	185.170.264.928	(1.976.005)	185.168.288.923	185.189.196.230	1.280.623
	Pengembalian				(22.187.930)	
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.592.853	(664)	2.592.189	2.604.552	(426)
	Pengembalian				(11.937)	

Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited

Akun	Uraian	LO (Rp) Unaudited	Koreksi	LO (Rp) Audited	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.277.170.447	(1.922.350)	13.275.248.097	13.279.023.827	(1.568.410)
	Pengembalian				(2.207.320)	
511122	Beban Tunj. Anak PNS	3.716.807.879	(79.040)	3.716.728.839	3.717.639.143	64.064
	Pengembalian				(974.368)	
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1.819.850.000	(290.000)	1.819.560.000	1.822.925.000	(290.000)
	Pengembalian				(3.075.000)	
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16.367.513.208	(6.869.896)	16.360.643.312	16.427.317.000	(21.049.896)
	Pengembalian				(45.623.792)	
511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.728.478.252	-	1.728.478.252	1.728.492.893	(14.641)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	9.652.548.780	-	9.652.548.780	9.653.417.820	-
	Pengembalian				(869.040)	
511129	Beban Uang Makan PNS	26.060.557.100	(67.209.750)	25.993.347.350	26.103.094.000	(106.395.750)
	Pengembalian				(3.350.900)	
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	650.000	-	650.000	650.000	-
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	353.060.000	-	353.060.000	353.060.000	-
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4.199.383.418	(2.595.228)	4.196.788.190	4.231.795.000	(2.595.228)
	Pengembalian				(32.411.582)	
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	12.903.540.500	-	12.903.540.500	12.906.744.100	-
	Pengembalian				(3.203.600)	
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	288.048	-	288.048	288.235	-
	Pengembalian				(187)	
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	856.986.007	-	856.986.007	856.986.007	-
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	237.817.218	-	237.817.218	237.817.218	-
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.096.971.788	-	1.096.971.788	1.097.511.788	-
	Pengembalian				(540.000)	
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	875.254.167	-	875.254.167	875.326.587	-
	Pengembalian				(72.420)	
511628	Beban Uang Makan PPPK	2.716.822.100	(3.427.450)	2.713.394.650	2.722.752.000	(8.126.450)
	Pengembalian				(1.230.900)	
511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	23.900.000	-	23.900.000	23.900.000	-
511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	394.136.663	-	394.136.663	394.136.663	-
512211	Beban Uang Lembur	4.853.641.800	-	4.853.641.800	4.869.242.800	-
	Pengembalian				(15.601.000)	
512212	Beban Uang Lembur PPPK	155.621.000	-	155.621.000	155.621.000	-
	Jumlah	286.463.856.156	(84.370.383)	286.379.485.773	286.518.181.887	(138.696.114)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar (Rp54.325.731,00). Penjelasan atas selisih tersebut karena adanya Jurnal Penyesuaian atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar dengan rincian:

- a) Jurnal balik belanja pegawai 2024 yang dibayar 2025 senilai (Rp59.552.918,00)
- b) Jurnal belanja pegawai 2025 yang belum dibayarkan hingga akhir tahun pelaporan senilai Rp5.227.187,00

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya kelebihan pembayaran belanja yang disetor tahun 2026 dengan akun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911), dicatat sebagai Piutang Lainnya (115212) pada 25 Satuan Kerja total senilai (Rp84.370.383,00), sebagai berikut:

- 1. Akun 511111
 - a) BRMP Hias (411987) koreksi Rp5,00
 - b) BRMP Buah (412050) koreksi Rp1.976.000,00
- 2. Akun 511119
 - a) BBRMP Veteriner (237259) koreksi Rp232,00
 - b) BRMP Jateng (567318) koreksi Rp50,00
 - c) BRMP Aceh (567392) koreksi Rp29,00
 - d) BRMP Yogyakarta (633975) koreksi Rp20,00
 - e) BRMP Rumbes (648720) koreksi Rp8,00
 - f) BBRMP Padi (237238) koreksi Rp77,00
 - g) BBRMP Biogen (237221) koreksi Rp248,00
- 3. Akun 511121
 - a) BRMP Buah (412050) koreksi Rp197.600,00
 - b) BRMP Riau (567460) koreksi Rp1.724.750,00
- 4. Akun 511122
 - BRMP Buah (412050) koreksi Rp79.040,00
- 5. Akun 511123
 - BRMP Sulut (634022) koreksi Rp290.000,00
- 6. Akun 511124
 - a) BRMP Lingtan (237380) koreksi Rp5.535.000,00
 - b) BRMP Hias (411987) koreksi Rp740.000,00
- 7. Akun 511129
 - a) BBRMP SDLP (237242) koreksi Rp701.050,00
 - b) BBRMP Veteriner (237259) koreksi Rp3.438.850,00
 - c) BRMP Tri (412022) koreksi Rp4.935.400,00
 - d) BRMP Buah (412050) koreksi Rp6.310.000,00
 - e) BRMP Jateng (567318) koreksi Rp4.278.000,00
 - f) BRMP Sumbar (567449) koreksi Rp350.750,00
 - g) BRMP Riau (567460) koreksi Rp737.850,00
 - h) BRMP Lampung (567517) koreksi Rp18.439.000,00
 - i) BRMP Kaltim (567627) koreksi Rp526.800,00
 - j) BRMP NTT (567783) koreksi Rp4.079.000,00
 - k) BRMP Bengkulu (633996) koreksi Rp910.600,00
 - l) BRMP Jambi (634001) koreksi Rp495.300,00
 - m) BBRMP Padi (237238) koreksi Rp4.384.150,00
 - n) BBRMP Paspa (648669) koreksi Rp11.667.700,00

- o) BRMP Sulut (634022) koreksi Rp3.086.300,00
- p) BRMP Sumut (567428) koreksi Rp2.869.000,00
- 8. Akun 511151
 - a) BRMP Jateng (567318) koreksi Rp185.000,00
 - b) BRMP Bengkulu (633996) koreksi Rp594.896,00
 - c) BRMP Sulsel (634036) koreksi Rp50,00
 - d) BRMP Agroklimat (648694) koreksi Rp1.295.136,00
 - e) BRMP Umbi (648702) koreksi Rp360.042,00
 - f) BBRMP Padi (237238) koreksi Rp375.000,00
 - g) BBRMP Paspa (648669) koreksi Rp380.000,00
- 9. Akun 511628
 - a) BBRMP SDLP (237242) koreksi Rp140.600,00
 - b) BBRMP Veteriner (237259) koreksi Rp315.450,00
 - c) BRMP Tri (412022) koreksi Rp350.750,00
 - d) BRMP Sumbar (567449) koreksi Rp280.600,00
 - e) BRMP NTT (567783) koreksi Rp948.000,00
 - f) BBRMP Padi (237238) koreksi Rp665.000,00
 - g) BBRMP Paspa (648669) koreksi Rp283.050,00
 - h) BRMP Sumut (567428) koreksi Rp444.000,00

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp63.332.634.350,00** dan Rp40.542.300.690,00. Nilai Beban Persediaan 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp22.790.333.660,00 atau 56,21% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Persediaan *Audited* menjadi senilai **Rp62.899.158.050,00**.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Perbandingan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
593111	Beban Persediaan konsumsi	33.357.021.717	(433.476.300)	32.923.545.417	27.343.405.964	5.580.139.453	20,41
593121	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0	0	0	0,00
593131	Beban Persediaan bahan baku	27.652.044.270	0	27.652.044.270	11.684.639.514	15.967.404.756	136,65

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
593141	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	0	0	0	0	0	0,00
593149	Beban persediaan lainnya	2.323.568.363	0	2.323.568.363	1.514.255.212	809.313.151	53,45
	Jumlah	63.332.634.350	(433.476.300)	62.899.158.050	40.542.300.690	22.356.857.360	55,14

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

URAIAN	BEBAN PERSEDIAAN (LO) Unaudited	Koreksi	BEBAN PERSEDIAAN (LO) Audited	BELANJA PERSEDIAAN (LRA)	SELISIH
Belanja / Beban Persediaan konsumsi	33.357.021.717	(433.476.300)	32.923.545.417	25.220.732.852	7.702.812.565
Belanja / Beban Beban Persediaan bahan baku	27.652.044.270	0	27.652.044.270	16.056.650.430	11.595.393.840
Belanja / Beban persediaan lainnya	2.323.568.363	0	2.323.568.363	11.219.774.286	(8.896.205.923)
Jumlah	63.332.634.350	(433.476.300)	62.899.158.050	52.497.157.568	10.402.000.482

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp10.835.476.782,00. [Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.](#)

Uraian	Nilai (Rp) Unaudited	Koreksi	Nilai (Rp) Audited
Pembelian	(61.863.179.437)	(316.350.000)	(62.179.529.437)
Habis Pakai	67.364.671.187	-	67.364.671.187
Kesalahan Kode Akun	9.366.021.870	316.350.000	9.682.371.870
Koreksi atas pendapatan perolehan aset lainnya yg bersumber dari hasil produksi	0	(433.476.300)	(433.476.300)
Pemeliharaan	(3.935.739.787)	-	(3.935.739.787)
Transaksi Void	(96.297.050)	-	(96.297.050)
Total	10.835.476.783	(433.476.300)	10.402.000.483

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya Koreksi atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429) yang bersumber dari hasil produksi pada Satker Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (648673) senilai Rp433.476.300,00.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp303.984.523.589,00** dan Rp277.810.572.167,00. Nilai Beban Barang dan Jasa 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp26.173.951.422,00 atau 8,61% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Barang dan Jasa *Audited* menjadi senilai **Rp303.342.733.704,00**.

Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp
521111	Beban Keperluan Perkantoran	103.252.691.000	0	103.252.691.000	105.465.316.261	(2.212.625.261)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.148.020.237	0	1.148.020.237	1.638.807.219	(490.786.982)
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	156.075.561	0	156.075.561	192.529.668	(36.454.107)
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.897.358.999	0	5.897.358.999	7.393.483.714	(1.496.124.715)
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	14.343.679.469	0	14.343.679.469	13.751.664.985	592.014.484
521211	Beban Bahan	32.435.146.789	(2.166)	32.435.144.623	42.435.036.208	(9.999.891.585)
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.008.536.000	0	2.008.536.000	2.917.458.000	(908.922.000)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	43.331.489.560	(181.137.610)	43.150.351.950	39.120.081.117	4.030.270.833
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	415.107.377	0	415.107.377	12.292.840	402.814.537
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	186.332.765	0	186.332.765	0	186.332.765
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	0	0	0	744.142.000	(744.142.000)
522111	Beban Langganan Listrik	28.911.120.858	0	28.911.120.858	28.633.105.291	278.015.567
522112	Beban Langganan Telepon	1.099.474.065	0	1.099.474.065	1.499.049.121	(399.575.056)
522113	Beban Langganan Air	1.729.147.278	(10.300)	1.729.136.978	1.979.148.431	(250.011.453)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.249.157.107	0	7.249.157.107	6.762.614.492	486.542.615
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	16.624.800	0	16.624.800	11.358.725	5.266.075
522131	Beban Jasa Konsultan	1.482.902.751	0	1.482.902.751	806.612.580	676.290.171
522141	Beban Sewa	8.333.458.485	0	8.333.458.485	3.074.425.382	5.259.033.103
522151	Beban Jasa Profesi	3.650.236.000	0	3.650.236.000	5.238.383.500	(1.588.147.500)
522191	Beban Jasa Lainnya	48.335.299.878	(460.639.809)	47.874.660.069	16.133.662.633	31.740.997.436
525113	Beban Jasa	2.664.610	0	2.664.610	0	2.664.610
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0		1.400.000	(1.400.000)
595114	Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0		0	0
595115	Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0		0	0
	Jumlah	303.984.523.589	(641.789.885)	303.342.733.704	277.810.572.167	25.532.161.537

Perbandingan realisasi Beban Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan pada tabel berikut.

Akun	Uraian	LO (Rp) Unaudited	Koreksi	LO (Rp) Audited	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	103.252.691.000	0	103.252.691.000	103.211.587.986	52.302.014
	Pengembalian				(11.199.000)	
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.148.020.237	0	1.148.020.237	1.149.969.647	0
	Pengembalian				(1.949.410)	
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	156.075.561	0	156.075.561	156.075.561	0
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5.897.358.999	0	5.897.358.999	5.910.305.999	(12.092.000)
	Pengembalian				(855.000)	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	14.343.679.469	0	14.343.679.469	14.343.679.469	0
521211	Beban Bahan	32.435.146.789	(2.166)	32.435.144.623	32.441.789.289	7.319.934
	Pengembalian				(13.964.600)	
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.008.536.000	0	2.008.536.000	2.008.536.000	0
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	43.331.489.560	(181.137.610)	43.150.351.950	43.428.275.242	(231.323.258)
	Pengembalian				(46.600.034)	
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	415.107.377	0	415.107.377	387.556.138	27.551.239
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	186.332.765	0	186.332.765	113.393.500	72.939.265
521711	Beban Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund	0	0	0	0	0
522111	Beban Langganan Listrik	28.911.120.858	0	28.911.120.858	28.799.227.300	124.436.638
	Pengembalian				(12.543.080)	
522112	Beban Langganan Telepon	1.099.474.065	0	1.099.474.065	1.115.073.972	(13.050.330)
	Pengembalian				(2.549.577)	
522113	Beban Langganan Air	1.729.147.278	(10.300)	1.729.136.978	1.753.134.952	(23.997.974)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	7.249.157.107	0	7.249.157.107	7.245.727.467	3.429.640
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	16.624.800	0	16.624.800	16.624.800	0
522131	Beban Jasa Konsultan	1.482.902.751	0	1.482.902.751	1.482.902.751	0
522141	Beban Sewa	8.333.458.485	0	8.333.458.485	8.339.458.485	0
	Pengembalian				(6.000.000)	
522151	Beban Jasa Profesi	3.650.236.000	0	3.650.236.000	3.650.236.000	0
522191	Beban Jasa Lainnya	48.335.299.878	(460.639.809)	47.874.660.069	48.870.172.392	(879.330.325)
	Pengembalian				(116.181.998)	
525113	Beban Jasa	2.664.610	0	2.664.610	0	2.664.610
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
595114	Beban Aset Ekstrakomptabel Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0
595115	Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
	Jumlah	303.984.523.589	(641.789.885)	303.342.733.704	304.211.884.251	(869.150.547)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar (Rp227.360.662,00). Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai Unaudited	Koreksi	Nilai Audited
Revisi SPM SP2D/Belanja	80.843.056	0	80.843.056
SP2D terbit setelah Periode Pelaporan	0	0	0
Pencatatan Hibah	0	0	0
Tercatat sebagai Beban Banpem	0	0	0
Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0	0	0
Penurunan Piutang	0	0	0
Tercatat sebagai KDP	0	0	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	99.041.578	0	99.041.578
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0	0	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0
Piutang Lainnya	(409.909.906)	(477.266.185)	(887.176.091)
Koreksi Pencatatan Beban	0	0	0
Koreksi atas pendapatan perolehan aset lainnya yg bersumber dari hasil produksi	0	(164.523.700)	(164.523.700)
Beban Jasa (525113)	2.664.610	0	2.664.610
Jumlah	(227.360.662)	(641.789.885)	(869.150.547)

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan:

- Adanya kelebihan pembayaran belanja yang disetor tahun 2026 dengan akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912), dicatat sebagai Piutang Lainnya (115212) pada 6 Satuan Kerja total senilai Rp477.266.185,00, yaitu:
 - BBRMP Penerapan (648673) Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Belanja atas kegiatan Icare (akun 522191 Beban Jasa Lainnya) Rp417.596.085,00
 - BRMP Taka (522113) Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Belanja Langganan Air (akun 522113 Beban Langganan Air) Rp10.300,00
 - BPHPMP (500941) Koreksi atas Kelebihan Pembayaran kegiatan SIBARISTA (akun 522191 Beban Jasa Lainnya) Rp18.749.500,00
 - BRMP Jateng (567318) Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Kegiatan Bawan Putih (akun 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya) Rp16.613.910,00
 - Sekret BRMP (411971) Koreksi atas Kelebihan Pembayaran perjadiin untuk 7 kegiatan (akun 522191 Beban Jasa Lainnya) Rp24.294.224,00
 - BRMP Sulut (634022) Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan bulan Desember 2025 (akun 521211 Beban Bahan) Rp2.166,00
- Koreksi atas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (akun 491429) yang bersumber dari Hasil produksi pada Satker BBRMP (648673) senilai Rp164.523.700,00

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak

meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp116.566.588.168,00** dan Rp109.386.006.236,00. Nilai Beban Pemeliharaan 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.180.581.932,00 atau 6,56% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Pemeliharaan *Audited* menjadi senilai **Rp116.563.809.199,00**.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.706.639.575	0	54.706.639.575	59.096.748.817	(4.390.109.242)	(7,43)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.096.503.834	0	1.096.503.834	2.058.996.492	(962.492.658)	(46,75)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.125.800.292	(2.778.969)	52.123.021.323	42.182.790.259	9.940.231.064	23,56
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.088.193	0	390.088.193	387.871.870	2.216.323	0,57
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	633.389.849	0	633.389.849	216.657.000	416.732.849	192,35
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	342.089.470	0	342.089.470	398.185.000	(56.095.530)	(14,09)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.570.568.218	0	1.570.568.218	1.600.474.027	(29.905.809)	(1,87)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.765.768.950	0	1.765.768.950	1.687.434.274	78.334.676	4,64
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.182.917.134	0	1.182.917.134	1.412.623.304	(229.706.170)	(16,26)
593114	Beban Persediaan suku cadang	2.752.822.653	0	2.752.822.653	337.575.193	2.415.247.460	715,47
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	6.650.000	(6.650.000)	(100,00)
	Jumlah	116.566.588.168	(2.778.969)	116.563.809.199	109.386.006.236	7.177.802.963	6,56

Perbandingan realisasi Beban Pemeliharaan di LRA dengan nilai Beban Pemeliharaan di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	LO (Rp) Unaudited	Koreksi	LO (Rp) Audited	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.706.639.575	0	54.706.639.575	54.674.730.942	35.065.833
	Pengembalian				(3.157.200)	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	387.009.701	(387.009.701)

Akun	Uraian	LO (Rp) Unaudited	Koreksi	LO (Rp) Audited	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.096.503.834	0	1.096.503.834	1.100.258.934	(3.755.100)
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.125.800.292	(2.778.969)	52.123.021.323	52.140.801.835	(12.437.512)
	Pengembalian				(5.343.000)	
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	93.910.930	(93.910.930)
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	390.088.193	0	390.088.193	390.088.193	0
523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	633.389.849	0	633.389.849	633.389.849	0
523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	342.089.470	0	342.089.470	342.089.470	-
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.570.568.218	0	1.570.568.218	1.570.568.218	0
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	143.912.390	(143.912.390)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.765.768.950	0	1.765.768.950	1.765.768.950	-
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.182.917.134	0	1.182.917.134	0	1.182.917.134
593114	Beban Persediaan suku cadang	2.752.822.653	0	2.752.822.653	0	2.752.822.653
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0
	Jumlah	116.566.588.168	(2.778.969)	116.563.809.199	113.234.029.212	3.329.779.987

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai Unaudited	Koreksi	Nilai Audited
Revisi SPM SP2D/Belanja	21.652.190	0	21.652.190
SP2D terbit setelah Periode Pelaporan	0	0	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan	(624.833.021)	0	(624.833.021)
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	1.182.917.134	0	1.182.917.134
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	2.752.822.653	0	2.752.822.653
Tercatat sebagai KDP	0	0	0
Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0	0
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0	0	0
Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0	0
Piutang Lainnya	0	(2.778.969)	(2.778.969)
Koreksi Pencatatan Beban	0	0	0
Jumlah	3.332.558.956	(2.778.969)	3.329.779.987

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya kelebihan pembayaran belanja yang disetor tahun 2026 dengan akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912), dicatat sebagai Piutang Lainnya (115212) pada Satuan Kerja Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Jateng (567318) senilai Rp2.778.969,00

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan

tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp85.856.051.726,00** dan Rp87.890.644.228,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.034.592.502,00) atau (2,31%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Perjalanan Dinas *Audited* menjadi senilai **Rp85.813.579.635,00**.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

**Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)**

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
524111	Beban Perjalanan Biasa	71.865.711.396	(34.842.503)	71.830.868.893	68.023.424.274	3.807.444.619	5,60
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.003.878.000	0	4.003.878.000	7.810.269.000	(3.806.391.000)	(48,74)
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	713.643.778	0	713.643.778	2.605.977.174	(1.892.333.396)	(72,62)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.804.487.607	(7.629.588)	8.796.858.019	8.512.448.917	284.409.102	3,34
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	427.965.945	0	427.965.945	333.131.484	94.834.461	28,47
524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	0	0	0	0	0,00
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	40.365.000	0	40.365.000	605.393.379	(565.028.379)	(93,33)
	Jumlah	85.856.051.726	(42.472.091)	85.813.579.635	87.890.644.228	(2.077.064.593)	(2,36)

Perbandingan realisasi Beban Perjalanaan Dinas di LRA dengan nilai Beban Perjalanan Dinas di LO beserta penjelasan selisihnya disajikan sebagai berikut.

Akun	Uraian	LO (Rp) Unaudited	Koreksi	LO (Rp) Audited	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
524111	Beban Perjalanan Biasa	71.865.711.396	(34.842.503)	71.830.868.893	71.900.757.533	(34.842.503)
	Pengembalian				(35.046.137)	
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.003.878.000	0	4.003.878.000	4.003.878.000	0
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	713.643.778	0	713.643.778	919.717.778	(206.074.000)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.804.487.607	(7.629.588)	8.796.858.019	8.658.288.315	198.444.412
	Pengembalian				-59.874.708	
524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	427.965.945	0	427.965.945	427.965.945	0
524212	Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	0	0	0	0	0
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	40.365.000	0	40.365.000	40.365.000	0
	Jumlah	85.856.051.726	(42.472.091)	85.813.579.635	85.856.051.726	(42.472.091)

Penjelasan atas selisih tersebut karena adanya koreksi akun SP2D yang semula akun belanja 524119 menjadi akun belanja 524114.

Uraian	Nilai Unaudited	Nilai Audited
Revisi SPM SP2D/Belanja	0	0
SP2D terbit setelah Periode Pelaporan	0	0
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0	0
Penurunan Piutang Lainnya	0	(42.472.091)
Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0	0
Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0
Jumlah	0	(42.472.091)

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya kelebihan pembayaran belanja yang disetor tahun 2026 dengan akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912), dicatat sebagai Piutang Lainnya (115212) pada 5 Satuan Kerja total senilai Rp42.472.091,00, sebagai berikut:

1. Akun 425111
 - a) BBRMP SDLP (237242) koreksi Rp15.383.703,00
 - b) BRMP Jateng (567318) koreksi Rp589.500,00
 - c) BRMP Lampung (567517) koreksi Rp978.000,00
 - d) BBRMP Padi (237238) koreksi Rp860.000,00
 - e) Set BRMP (411971) koreksi Rp17.031.300,00
2. Akun 524119
 - Set BRMP (411971) koreksi Rp7.629.588,00

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan uang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp32.538.905.763,00** dan Rp11.022.852.956,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.516.052.807,00 atau 195,19% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat *Audited* adalah tetap.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (bantuan pemerintah) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)	Naik (Turun) %
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	19.531.075.158	10.464.223.656	9.066.851.502	86,65
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.834.276.891	0	4.834.276.891	0,00
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	316.400	432.413.600	(432.097.200)	(99,93)
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	8.173.237.314	126.215.700	8.047.021.614	6.375,61
	Jumlah	32.538.905.763	11.022.852.956	21.516.052.807	195,19

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	8.676.646.248	(8.676.646.248)
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	20.003.466.847	(20.003.466.847)
593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	19.531.075.158	0	19.528.345.158
593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.834.276.891	0	4.834.276.891
593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	316.400	0	316.400
593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/ Diserahkan ke Masyarakat	8.173.237.314	0	8.173.237.314
	Jumlah	32.538.905.763	28.680.113.095	3.858.792.668

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO sebesar Rp3.858.792.668,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Pembelian	(14.906.497.396)
Habis Pakai	31.978.108.063
Hasil Opname Fisik	215.425.700
Koreksi Nilai Tambah	12.000.000

Uraian	Nilai (Rp)
Hibah Keluar	16.200.000
Kesalahan Akun	(13.763.143.959)
Koreksi Beban	306.700.260
Total	3.858.792.668

D.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar [Rp125.115.341.932,00](#) dan Rp136.782.541.364,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp11.667.199.432,00) atau (8,53%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi *Audited* menjadi senilai [Rp125.086.481.932,00](#).

Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	38.990.672.071	(28.860.000)	38.961.812.071	47.064.213.363	(8.102.401.292)	(17,22)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	71.592.424.353	0	71.592.424.353	73.610.658.657	(2.018.234.304)	(2,74)
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	5.579.405.185	0	5.579.405.185	7.093.390.875	(1.513.985.690)	(21,34)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.013.420.253	0	7.013.420.253	7.026.750.830	(13.330.577)	(0,19)
591313	Beban Penyusutan Jaringan	1.177.605.467	0	1.177.605.467	1.165.823.354	11.782.113	1,01
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	92.196.524	0	92.196.524	60.634.644	31.561.880	52,05
592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	400.362	0	400.362	400.362	0	0,00
592114	Beban Amortisasi Paten	8.629.560	0	8.629.560	23.052.449	(14.422.889)	(62,57)
592115	Beban Amortisasi Software	11.362.000	0	11.362.000	3.112.500	8.249.500	265,04
592117	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	13.470.613	0	13.470.613	13.470.613	0	0,00
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	635.755.544	0	635.755.544	721.033.717	(85.278.173)	(11,83)
	Jumlah	125.115.341.932	(28.860.000)	125.086.481.932	136.782.541.364	(11.696.059.432)	(8,55)

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya dampak sistem dalam aplikasi terkait Koreksi Aset Tetap (Alsin) akibat penyesuaian pencatatan MPHLBJS yang semula dicatat tahun 2026 menjadi tahun 2025 (koreksi tanggal dokumen) pada Satuan Kerja BRMP Buah (412050).

D.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp495.130.835,00** dan (Rp112.396.935,00). Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp607.527.770,00 atau (540,52%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih *Audited* menjadi senilai **Rp495.154.675,00**.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut.

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	(6.535.120)	-	(6.535.120)	(190.640.165)	184.105.045	(96,57)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	590.284.185	-	590.284.185	9.962.497	580.321.688	5.825,06
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(50.000)	-	(50.000)	(450.000)	400.000	(88,89)
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(64.126.952)	23.840	(64.103.112)	51.951.152	(116.054.264)	(223,39)
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	(24.441.278)	-	(24.441.278)	16.779.581	(41.220.859)	(245,66)
	Jumlah	495.130.835	23.840	495.154.675	(112.396.935)	607.527.770	(540,54)

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya pencatatan penyisihan sisa Piutang Temuan Itjen 2025 (kelebihan Tunjangan Jabatan Fungsional untuk 2 pegawai) pada Satker Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (237380).

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada 31 Desember 2025, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp975.878.718.203,00). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp66.269.350.532,00) atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional 31 Desember 2024 sebesar (Rp909.609.367.671,00).

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Defisit dari Kegiatan Operasional Audited menjadi senilai (Rp974.473.797.832,00).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(4.021.369.229)	-	(4.021.369.229)	(3.243.769.060)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	34.743.900.878	125.155.444	34.869.056.322	20.998.598.513
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	30.722.531.649	125.155.444	30.847.687.093	17.754.829.453

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar periode sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp4.021.369.229,00) dan (Rp3.243.769.060,00). Nilai Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp777.600.169,00) atau 23,97% apabila dibandingkan dengan Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp929.447.307,00 dan Rp1.512.288.438,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp582.841.131,00) atau 55,34% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Audited adalah tetap.

Akun	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	123.196.432	(123.196.432)	(100,00)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	595.284.307	882.397.231	(287.112.924)	(32,54)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	334.163.000	506.694.775	(172.531.775)	(34,05)
	Jumlah	929.447.307	1.512.288.438	(582.841.131)	(38,54)

Rincian pendapatan sebagai berikut:

Uraian	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	018.09.237238	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PADI	980.823.968	(980.823.968)	0	46.108.240	(46.108.240)
	018.09.237263	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK	233.503.400	(233.503.400)	0	41.785.000	(41.785.000)
	018.09.237931	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA	1.463.111.428	(1.463.111.428)	0	45.270.270	(45.270.270)
	018.09.320091	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU	147.720.000	(147.720.000)	0	3.420.000	(3.420.000)
	018.09.412050	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA	2.303.719.861	(2.303.719.861)	0	55.105.300	(55.105.300)
	018.09.500957	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT	554.606.604	(551.856.604)	2.750.000	3.575.000	(825.000)
	018.09.567296	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT	262.736.000	(262.736.000)	0	31.941.000	(31.941.000)
	018.09.567364	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR	774.756.814	(736.776.814)	37.980.000	51.278.000	(13.298.000)
	018.09.567563	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT	30.645.000	(30.645.000)	0	28.941.000	(28.941.000)
	018.09.567673	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH	388.439.000	(388.439.000)	0	109.997.000	(109.997.000)
	018.09.633961	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAKARTA	415.157.800	(415.157.800)	0	82.701.000	(82.701.000)

Uraian	Kode Satker	Satuan Kerja	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
	018.09.633996	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	1.339.147.612	(1.338.451.614)	695.998	7.157.200	(6.461.202)
	018.09.634036	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN	1.634.542.266	(1.634.542.266)	0	78.283.647	(78.283.647)
	018.09.648669	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN	15.275.000	(15.275.000)	0	2.000.000	(2.000.000)
	018.09.648694	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN	237.163.673	(237.163.673)	0	7.721.650	(7.721.650)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	018.09.025227	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA	12.322.516.770	(1.955.483.512)	10.367.033.258	2.900.000	10.364.133.258
	018.09.237242	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN	5.661.430.903	(1.071.062.019)	4.590.368.884	5.213.000	4.585.155.884
	018.09.237263	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK	150.328.125	(150.328.125)	0	166.069.000	(166.069.000)
	018.09.237291	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN	819.605.093	(819.605.093)	0	14.300.000	(14.300.000)
	018.09.411971	SEKRETARIAT BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	24.008.106.740	(4.366.807.997)	19.641.298.743	30.500.000	19.610.798.743
	018.09.412022	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR	390.198.000	(390.198.000)	0	57.381.000	(57.381.000)
	018.09.567392	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH	5.012.798.000	(1.440.840.030)	3.571.957.970	1.500.000	3.570.457.970
	018.09.567517	BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG	118.000.000	(118.000.000)	0	56.300.000	(56.300.000)
Jumlah			59.264.332.057	-21.052.247.204	38.212.084.853	929.447.307	37.282.637.546

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp4.950.816.536,00** dan Rp4.756.057.498,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp194.759.038,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar *Audited* adalah tetap.

Penjelasan atas beban tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Keluar Lainnya	1.777.104.085
Penghapusan/ Penghentian Permanen KDP	47.600.000
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	2.964.602.451
Penghapusan	161.510.000
Total	4.950.816.536

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pada 31 Desember 2025, Kegiatan Non Operasional Lainnya mengalami surplus/defisit sebesar [Rp34.743.900.878,00](#). Kegiatan Non Operasional Lainnya 2025 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan 2024 yang mengalami surplus sebesar Rp20.998.598.513,00. Kegiatan Non Operasional Lainnya 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.745.302.365,00 atau 65,46%.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya *Audited* menjadi senilai [Rp34.869.056.322,00](#).

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar [Rp35.565.411.712,00](#) dan Rp22.968.097.973,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp12.597.313.739,00 atau 54,85% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *Audited* menjadi senilai [Rp35.690.567.156,00](#).

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya								
1	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	1.273.153.493	4.767.944	1.277.921.437	486.102.576	791.818.861
			Terhadap Bendahara	0	-	0	145.083.987	(145.083.987)
			Terhadap Pihak Lain/ Pihak Ketiga	305.004.117	-	305.004.117	28.963.988	276.040.129

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
2	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	157.284.872	-	157.284.872	5.581.047.164	(5.423.762.292)
			Belanja Barang	745.720.001	-	745.720.001	1.166.561.988	(420.841.987)
			Belanja Lain-lain	0	-	0	0	0
			Belanja Modal	0	-	0	156.777.298	(156.777.298)
			Sisa Utang Non TP/ TGR Pensiunan PNS	25.131.990	-	25.131.990	0	25.131.990
3	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	364.362	-	364.362	820.881	(456.519)
4	Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset/ Jasa	Pendapatan Perolehan Aset/ Jasa	Aset Lainnya	32.878.184.872	120.387.500	32.998.572.372	15.099.181.941	17.899.390.431
5	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Pendapatan Penyesuaian Nilai Aset	Penyesuaian Nilai Persediaan	180.568.005	-	180.568.005	303.558.150	(122.990.145)
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				35.565.411.712	125.155.444	35.690.567.156	22.968.097.973	12.722.469.183

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya:

1. Akun 425791
Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian (237380) berupa pencatatan sisa Piutang Temuan Itjen 2025 (kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan fungsional untuk 2 pegawai) senilai Rp4.767.944,00.
2. Akun 491429
BBRMP Penerapan (648673) berupa koreksi atas kurang catatnya perolehan benih pada kegiatan perbenihan senilai Rp120.387.500,00.

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp821.510.834,00** dan Rp1.969.499.460,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp1.147.988.626,00) atau 0,00% apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *Audited* adalah tetap.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya						
1	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Aset	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	167.276.345	1.267.104.368	(1.099.828.023)
2	Beban Pelepasan Aset	Beban Pelepasan Aset	Beban Persediaan Rusak/Usang	654.084.479	691.624.124	(37.539.645)
3	Kerugian Belum Terealisasi	Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	150.010	10.770.968	(10.620.958)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				821.510.834	1.969.499.460	(1.147.988.626)

D.14 POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 mengalami defisit masing-masing sebesar (Rp945.156.186.554,00) dan (Rp891.854.538.218,00). Nilai Defisit LO 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp53.301.648.336,00) atau 5,98% apabila dibandingkan dengan Defisit 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Defisit LO *Audited* menjadi senilai (Rp943.626.110.739,00).

Perhitungan nilai Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(975.878.718.203)	1.404.920.371	(974.473.797.832)	(909.609.367.671)	(64.864.430.161)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	30.722.531.649	125.155.444	30.847.687.093	17.754.829.453	13.092.857.640
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0	0	0	0
Pos Luar Biasa	0	0	0	0	0
Surplus/Defisit - LO	(945.156.186.554)	1.530.075.815	(943.626.110.739)	(891.854.538.218)	(51.771.572.521)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar [Rp44.242.343.522.698,00](#) dan Rp45.034.208.920.591,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp791.865.397.893,00) atau (1,76%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah sebesar [\(Rp945.156.186.554,00\)](#) dan (Rp891.845.538.218,00). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Nilai Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp53.301.648.336,00) atau 5,98% apabila dibandingkan dengan nilai Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Defisit LO *Audited* menjadi senilai [\(Rp943.626.110.739,00\)](#).

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 yang disajikan sebesar [Rp793.668.560,00](#) terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Perbandingan Koreksi Nilai Persediaan
periode yang berakhir 31 Desember 2025 (dalam Rupiah)**

Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp)
MUTASI TAMBAH			
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	57.600.000
	237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	155.080.400
	450831	BPMP Banten	112.527.000
	567318	BPMP Jawa Tengah	105.780.000
	567449	BPMP Sumatera Barat	316.855.700
	567627	BPMP Kalimantan Timur	150.000
	567673	BPMP Sulawesi Tengah	54.225.000
	567702	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	42.530.000

Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp)
	567830	BPMP Papua	15.000.000
	633975	BPMP Yogyakarta	2.128.500
	633996	BPMP Bengkulu	925.000
	648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	600
Persediaan Lainnya	567296	BPMP Jawa Barat	129.100.000
	567318	BPMP Jawa Tengah	22.000.000
	567702	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	36.765.000
TOTAL MUTASI TAMBAH			1.050.667.200
MUTASI KURANG			
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	22.710.000
	567318	BPMP Jawa Tengah	105.780.000
	567392	BPMP Aceh	65.200.000
	567449	BPMP Sumatera Barat	14.352.000
	567830	BPMP Papua	31.125.000
	633975	BPMP Yogyakarta	17.831.640
TOTAL MUTASI KURANG			256.998.640
TOTAL			793.668.560

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi Nilai Persediaan *Audited* adalah tetap.

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 yang disajikan sebesar **Rp1.359.386.475,00** terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp,00.

Saldo Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya didapat dari Transaksi sebagai berikut.

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp)
	MUTASI TAMBAH			
117111	Barang Konsumsi	567318	BPMP Jawa Tengah	13.680.000
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	44.920.000
		411993	BRP Tanaman Aneka Kacang	87.250.000
		450831	BPMP Banten	301.961.710
		450856	BPMP Gorontalo	5.995.000
		567318	BPMP Jawa Tengah	740.460.000
		567495	BPMP Sumatera Selatan	124.980.000

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp)
		567570	BPMP Kalimantan Tengah	80.780.000
		633975	BPMP Yogyakarta	219.900.000
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1.270.536.475
		648737	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	630.400.000
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	634036	BPMP Sulawesi Selatan	4.100.660
		634040	BPMP NTB	679.414.999
		648737	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	1.200.000
117131	Bahan Baku	237217	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	30.506.750
		634040	BPMP NTB	30.590.000
117199	Persediaan Lainnya	567318	BPMP Jawa Tengah	1.700.000
132111	Peralatan dan Mesin	634040	BPMP NTB	831.820.003
	TOTAL MUTASI TAMBAH			5.100.195.597
	MUTASI KURANG			
117111	Barang Konsumsi	634036	BPMP Sulawesi Selatan	4.100.660
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	237217	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	30.506.750
		237259	BBRM Veteriner	
		237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	5.500.000
		450831	BPMP Banten	293.861.710
		567318	BPMP Jawa Tengah	317.340.000
		633975	BPMP Yogyakarta	34.820.000
		648737	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	630.800.000
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	648737	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	800.000
117131	Bahan Baku	411993	BRP Tanaman Anek Kacang	2.050.000
		450856	BPMP Gorontalo	5.995.000
		567318	BPMP Jawa Tengah	436.800.000
		567495	BPMP Sumatera Selatan	124.980.000
		567570	BPMP Kalimantan Tengah	80.780.000
		633975	BPMP Yogyakarta	185.080.000
117199	Persediaan Lainnya	237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	39.420.000
		450831	BPMP Banten	8.100.000
		634040	BPMP NTB	28.640.000
132111	Peralatan dan Mesin	634040	BPMP NTB	1.511.235.002
	TOTAL MUTASI KURANG			3.740.809.122
	TOTAL			1.359.386.475

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi atas Reklasifikasi *Audited* adalah tetap.

E.3.3 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar (Rp3.804.698.709,00). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi *Audited* menjadi senilai (Rp3.718.118.709,00).

**Perbandingan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
	MUTASI TAMBAH				
131111	Tanah	567495	BPMP Sumatera Selatan	43.110.147	43.110.147
132111	Peralatan dan Mesin	237238	BBRM Tanaman Padi	33.000.000	33.000.000
		237572	BRP Tanaman Pemanis dan Serat	88.144.000	88.144.000
		238080	BRP Tanaman Serealia	11.690.000	11.690.000
		412050	BRP Tanaman Buah Tropika	16.047.000	16.047.000
		500957	BPMP Sulawesi Barat	135.850.000	135.850.000
		567296	BPMP Jawa Barat	168.211.000	168.211.000
		633975	BPMP Yogyakarta	181.406.000	181.406.000
		634040	BPMP NTB	3.948.000	3.948.000
		648673	BBPPMP	94.948.800	94.948.800
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1.100.533.340	1.100.533.340
133111	Gedung dan Bangunan	237221	BBRM Biogen	380.650.000	380.650.000
		237259	BBRM Veteriner	146.060.000	146.060.000
		237572	BRP Tanaman Pemanis dan Serat	260.927.000	260.927.000
		411987	BRP Tanaman Hias	319.856.000	319.856.000
		450840	BPMP Bangka Belitung	4.349.482.580	4.349.482.580
		567318	BPMP Jawa Tengah	51.772.584	51.772.584
		567495	BPMP Sumatera Selatan	747.741.439	747.741.439
		633982	BPMP Bali	10.920.000	10.920.000
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	4.560.000	4.560.000
134111	Jalan dan Jembatan	237572	BRP Tanaman Pemanis dan Serat	215.205.000	215.205.000
		567495	BPMP Sumatera Selatan	26.508.000	26.508.000
134112	Irigasi	450840	BPMP Bangka Belitung	39.500.000	39.500.000
		633975	BPMP Yogyakarta	11.660.000	11.660.000
134113	Jaringan	567495	BPMP Sumatera Selatan	13.373.500	13.373.500
135121	Aset Tetap Lainnya	567495	BPMP Sumatera Selatan	6.500.000	6.500.000
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	5.180.000	5.180.000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	411993	BRP Tanaman Aneka Kacang	47.600.000	47.600.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	237238	BBRM Tanaman Padi	2.049.550.168	2.049.550.168
		237380	BRP Lingkungan Pertanian	1.506.774.001	1.506.774.001
		238080	BRP Tanaman Serealia	2.927.821.173	2.927.821.173
		411971	Sekretariat BRMP	2.377.555.210	2.377.555.210
		412013	PRM PKH	2.064.995.153	2.064.995.153
		450840	BPMP Bangka Belitung	2.880.455.498	2.880.455.498
		450856	BPMP Gorontalo	40.000.000	40.000.000

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
		500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.001.303.250	1.001.303.250
		500957	BPMP Sulawesi Barat	756.906.604	756.906.604
		567296	BPMP Jawa Barat	1.246.972.272	1.246.972.272
		567318	BPMP Jawa Tengah	320.360.000	320.360.000
		567364	BPMP Jawa Timur	615.445.405	615.445.405
		567449	BPMP Sumatera Barat	1.937.226.120	1.937.226.120
		567517	BPMP Lampung	6.693.000	6.693.000
		567563	BPMP Kalimantan Barat	209.395.000	209.395.000
		567830	BPMP Papua	399.842.458	399.842.458
		633961	BPMP Jakarta	569.821.800	569.821.800
		633975	BPMP Yogyakarta	251.545.000	251.545.000
		634001	BPMP Jambi	2.939.430.000	2.939.430.000
		634015	BPMP Kalimantan Selatan	28.770.000	28.770.000
		634036	BPMP Sulawesi Selatan	392.036.000	392.036.000
		634040	BPMP NTB	820.788.911	820.788.911
		648694	BRP Agroklimat	8.167.337.751	8.167.337.751
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	24.404.500	24.404.500
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1.907.427.358	1.907.427.358
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	237931	BRP Pertanian Lahan Rawa	1.124.123.970	1.124.123.970
		411971	Sekretariat BRMP	296.889	296.889
		411993	BRP Tanaman Aneka Kacang	2.847.271	2.847.271
		450840	BPMP Bangka Belitung	1.136.151.109	1.136.151.109
		567318	BPMP Jawa Tengah	10.884.660	10.884.660
		567449	BPMP Sumatera Barat	395.608.380	395.608.380
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	450840	BPMP Bangka Belitung	797.192.941	797.192.941
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	450840	BPMP Bangka Belitung	112.694.552	112.694.552
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	450840	BPMP Bangka Belitung	170.492.790	170.492.790
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	532.000	532.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	237238	BBRM Tanaman Padi	2.049.550.168	2.049.550.168
		237380	BRP Lingkungan Pertanian	1.509.399.001	1.509.399.001
		238080	BRP Tanaman Sereal	2.993.390.228	2.993.390.228
		411971	Sekretariat BRMP	2.367.769.150	2.367.769.150
		412013	PRM PKH	2.066.857.289	2.066.857.289
		450840	BPMP Bangka Belitung	3.773.240.242	3.773.240.242
		500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.003.703.250	1.003.703.250
		500957	BPMP Sulawesi Barat	759.656.604	759.656.604
		567296	BPMP Jawa Barat	1.246.972.272	1.246.972.272
		567318	BPMP Jawa Tengah	320.360.000	320.360.000
		567364	BPMP Jawa Timur	615.830.405	615.830.405
		567449	BPMP Sumatera Barat	4.441.764.120	4.441.764.120
		567460	BPMP Riau	249.874.000	249.874.000
		567517	BPMP Lampung	6.693.000	6.693.000
		567563	BPMP Kalimantan Barat	209.395.000	209.395.000
		567830	BPMP Papua	400.554.890	400.554.890
		633961	BPMP Jakarta	569.929.800	569.929.800

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
		633975	BPMP Yogyakarta	58.629.000	58.629.000
		634015	BPMP Kalimantan Selatan	28.770.000	28.770.000
		634036	BPMP Sulawesi Selatan	835.452.086	835.452.086
		634040	BPMP NTB	823.657.661	823.657.661
		648694	BRP Agroklimat	8.650.353.412	8.650.353.412
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	24.404.500	24.404.500
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	2.175.951.680	2.175.951.680
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	237238	BBRM Tanaman Padi	33.000.000	33.000.000
		237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	345.773.400	345.773.400
		412050	BRP Tanaman Buah Tropika	16.047.000	16.047.000
		500957	BPMP Sulawesi Barat	135.850.000	135.850.000
		567495	BPMP Sumatera Selatan	232.971.292	232.971.292
		567783	BPMP NTT	54.373.000	54.373.000
		633982	BPMP Bali	4.288.100	4.288.100
		634022	BPMP Sulawesi Utara	233.774.000	233.774.000
		634040	BPMP NTB	3.948.000	3.948.000
		648680	BRP Tanah dan Pupuk	469.732.000	469.732.000
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1.677.476.992	1.677.476.992
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	567428	BPMP Sumatera Utara	254.005.528	254.005.528
218211		412050	BRP Tanaman Buah Tropika	-	577.200.000
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	411971	Sekretariat BRMP	9.896.286	9.896.286
	TOTAL MUTASI TAMBAH			88.361.358.940	88.938.558.940
	MUTASI KURANG				
131111	Tanah	567296	BPMP Jawa Barat	849.528.000	849.528.000
		567460	BPMP Riau	585.000.000	585.000.000
		567783	BPMP NTT	28.384.000	28.384.000
132111	Peralatan dan Mesin	237217	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	3.850.000	3.850.000
		237238	BBRM Tanaman Padi	2.049.550.168	2.049.550.168
		237380	BRP Lingkungan Pertanian	1.509.399.001	1.509.399.001
		238080	BRP Tanaman Serealia	3.118.931.228	3.118.931.228
		411971	Sekretariat BRMP	2.385.730.210	2.385.730.210
		411987	BRP Tanaman Hias	129.903.421	129.903.421
		412013	PRM PKH	2.066.857.289	2.066.857.289
		412050	BRP Tanaman Buah Tropika	-	577.200.000
		450840	BPMP Bangka Belitung	2.889.896.242	2.889.896.242
		450856	BPMP Gorontalo	40.000.000	40.000.000
		500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.003.703.250	1.003.703.250
		500957	BPMP Sulawesi Barat	759.656.604	759.656.604
		567296	BPMP Jawa Barat	1.246.972.272	1.246.972.272
		567318	BPMP Jawa Tengah	320.360.000	320.360.000
		567364	BPMP Jawa Timur	615.830.405	615.830.405
		567449	BPMP Sumatera Barat	1.937.687.120	1.937.687.120

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
		567517	BPMP Lampung	6.693.000	6.693.000
		567563	BPMP Kalimantan Barat	293.675.000	293.675.000
		567830	BPMP Papua	400.554.890	400.554.890
		633961	BPMP Jakarta	569.929.800	569.929.800
		633975	BPMP Yogyakarta	251.695.000	251.695.000
		634001	BPMP Jambi	3.617.760.000	3.617.760.000
		634015	BPMP Kalimantan Selatan	28.770.000	28.770.000
		634022	BPMP Sulawesi Utara	38.880.000	38.880.000
		634036	BPMP Sulawesi Selatan	392.036.000	392.036.000
		634040	BPMP NTB	823.657.661	823.657.661
		648673	BBPPMP	95.005.800	95.005.800
		648694	BRP Agroklimat	8.301.450.912	8.301.450.912
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	24.404.500	24.404.500
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	2.165.591.680	2.165.591.680
133111	Gedung dan Bangunan	411971	Sekretariat BRMP	9.896.286	9.896.286
		411987	BRP Tanaman Hias	267.633.735	267.633.735
		411993	BRP Tanaman Aneka Kacang	47.600.000	47.600.000
		450840	BPMP Bangka Belitung	4.538.013.080	4.538.013.080
		567318	BPMP Jawa Tengah	42.813.000	42.813.000
		567449	BPMP Sumatera Barat	2.504.877.000	2.504.877.000
		567460	BPMP Riau	142.880.000	142.880.000
134111	Jalan dan Jembatan				
134112	Irigasi	450840	BPMP Bangka Belitung	189.147.000	189.147.000
134113	Jaringan	450840	BPMP Bangka Belitung	487.829.000	487.829.000
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	4.560.000	4.560.000
135121	Aset Tetap Lainnya	450840	BPMP Bangka Belitung	34.944.000	34.944.000
		648694	BRP Agroklimat	348.902.500	348.902.500
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	10.360.000	10.360.000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan				
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	237238	BBRM Tanaman Padi	33.000.000	33.000.000
		237572	BRP Tanaman Pemanis dan Serat	88.144.000	88.144.000
		238080	BRP Tanaman Sereal	2.201.000	2.201.000
		412050	BRP Tanaman Buah Tropika	102.627.000	16.047.000
		500957	BPMP Sulawesi Barat	135.850.000	135.850.000
		567296	BPMP Jawa Barat	57.875.825	57.875.825
		633975	BPMP Yogyakarta	181.406.000	181.406.000
		634036	BPMP Sulawesi Selatan	203.356.549	203.356.549
		634040	BPMP NTB	3.948.000	3.948.000
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	960.523.312	960.523.312
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	237221	BBRM Biogen	91.356.000	91.356.000
		237259	BBRM Veteriner	24.075.825	24.075.825
		237572	BRP Tanaman Pemanis dan Serat	88.060.648	88.060.648
		237931	BRP Pertanian Lahan Rawa	2.473.072.734	2.473.072.734
		411987	BRP Tanaman Hias	87.719.335	87.719.335
		450840	BPMP Bangka Belitung	828.879.246	828.879.246

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
		567318	BPMP Jawa Tengah	13.162.519	13.162.519
		567449	BPMP Sumatera Barat	5.864.070	5.864.070
		567495	BPMP Sumatera Selatan	247.371.124	247.371.124
		633982	BPMP Bali	4.288.100	4.288.100
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	456.000	456.000
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	237572	BRP Tanaman Pemanis dan Serat	139.694.475	139.694.475
		450840	BPMP Bangka Belitung	1.298.458.000	1.298.458.000
		567495	BPMP Sumatera Selatan	26.508.000	26.508.000
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	450840	BPMP Bangka Belitung	7.595.255	7.595.255
		633975	BPMP Yogyakarta	2.186.250	2.186.250
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	567495	BPMP Sumatera Selatan	13.373.500	13.373.500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	237238	BBRM Tanaman Padi	33.000.000	33.000.000
		237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	345.773.400	345.773.400
		412050	BRP Tanaman Buah Tropika	16.047.000	16.047.000
		500957	BPMP Sulawesi Barat	135.850.000	135.850.000
		567495	BPMP Sumatera Selatan	660.966.500	660.966.500
		567783	BPMP NTT	54.373.000	54.373.000
		633982	BPMP Bali	10.920.000	10.920.000
		634022	BPMP Sulawesi Utara	233.774.000	233.774.000
		634040	BPMP NTB	3.948.000	3.948.000
		648680	BRP Tanah dan Pupuk	469.732.000	469.732.000
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1.822.667.020	1.822.667.020
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	567428	BPMP Sumatera Utara	254.005.528	254.005.528
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	237238	BBRM Tanaman Padi	2.049.550.168	2.049.550.168
		237380	BRP Lingkungan Pertanian	1.506.774.001	1.506.774.001
		238080	BRP Tanaman Serealia	2.927.821.173	2.927.821.173
		411971	Sekretariat BRMP	2.359.594.150	2.359.594.150
		412013	PRM PKH	2.064.995.153	2.064.995.153
		450840	BPMP Bangka Belitung	3.362.426.840	3.362.426.840
		500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1.001.303.250	1.001.303.250
		500957	BPMP Sulawesi Barat	756.906.604	756.906.604
		567296	BPMP Jawa Barat	1.246.972.272	1.246.972.272
		567318	BPMP Jawa Tengah	320.360.000	320.360.000
		567364	BPMP Jawa Timur	615.445.405	615.445.405
		567449	BPMP Sumatera Barat	2.332.714.500	2.332.714.500
		567460	BPMP Riau	249.874.000	249.874.000
		567517	BPMP Lampung	6.693.000	6.693.000
		567563	BPMP Kalimantan Barat	209.395.000	209.395.000
		567830	BPMP Papua	399.842.458	399.842.458
		633961	BPMP Jakarta	569.821.800	569.821.800
		633975	BPMP Yogyakarta	58.479.000	58.479.000
		634015	BPMP Kalimantan Selatan	28.770.000	28.770.000
		634036	BPMP Sulawesi Selatan	835.452.086	835.452.086
		634040	BPMP NTB	820.788.911	820.788.911
		648694	BRP Agroklimat	8.167.337.751	8.167.337.751

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
		648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	24.404.500	24.404.500
		648720	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1.907.427.358	1.907.427.358
	TOTAL MUTASI KURANG			92.166.057.649	92.656.677.649
	TOTAL			(3.804.698.709)	(3.718.118.709)

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya dampak sistem dalam aplikasi terkait Koreksi Aset Tetap (Alsin) akibat penyesuaian pencatatan MPHL BJS 2025 yang sebelumnya 2026 berupa mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp86.580.000,00.

E.3.4 KOREKSI LAIN-LAIN

Merupakan transaksi penyesuaian atau koreksi yang dilakukan terhadap ekuitas dana pemerintah akibat kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, atau penyesuaian lain yang tidak termasuk dalam kategori operasional atau non-operasional biasa. Koreksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi ekuitas yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar [\(Rp182.692.416,00\)](#).

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Koreksi Lain-lain *Audited* menjadi senilai [Rp229.522.302,00](#) dengan rincian sebagai berikut.

Penjelasan Koreksi Lain-lain periode yang berakhir 31 Desember 2025

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
	MUTASI TAMBAH				
115212	Piutang Lainnya	567702	BPMP Sulawesi Tenggara	13.555.000	13.555.000
		634022	BPMP Sulawesi Utara	500.000	500.000
		648669	BBRM Pascapanen Pertanian	90.606.000	0
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	567364	BPMP Jawa Timur	1	1
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	567460	BPMP Riau	2.000.000	2.000.000
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	15.040.000	15.040.000
212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	450840	BPMP Kepulauan Bangka Belitung	1.567.000	1.567.000
219511	Uang Muka dari KPPN	634022	BPMP Sulawesi Utara	0	417.749.718
594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	567364	BPMP Jawa Timur	49.048.480	49.048.480
	TOTAL MUTASI TAMBAH			172.316.481	499.460.199
	MUTASI KURANG				
115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	634022	BPMP Sulawesi Utara	20.000.000	20.000.000

Akun	Uraian	Kode	Satker	Nilai (Rp) Unaudited	Nilai (Rp) Audited
115212	Piutang Lainnya	648669	BBRM Pascapanen Pertanian	93.806.000	3.200.000
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	237263	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	150.400.000	150.400.000
155111	Piutang Jangka Panjang lainnya	411993	BRP Tanaman Aneka Kacang	18.916.395	18.916.395
		567364	BPMP Jawa Timur	1	1
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	567364	BPMP Jawa Timur	1	1
219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	537628	BBRM Mekanisasi Pertanian	23.394.500	23.394.500
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	567460	BPMP Riau	4.000.000	4.000.000
	Persetujuan Belanja Hibah Langsung Tunai (TAYL)	648716	BRP Tanaman Jeruk dan Buah Sub Tropika	44.492.000	44.492.000
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	237380	BRP Lingkungan Pertanian	0	5.535.000
	TOTAL MUTASI KURANG			355.008.897	269.937.897
	TOTAL			(182.692.416)	229.522.302

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK total senilai Rp412.214.718,00 disebabkan adanya:

1. Mutasi Tambah
 - Koreksi penihilan akun Uang Muka dari KPPN senilai Rp417.749.718,00 pada Satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara
2. Mutasi Kurang
 - Koreksi beban atas kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional TA 2024 senilai (Rp5.535.000,00) pada Satker BRMP Lingkungan Pertanian.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya. Transaksi antar entitas ini perlu dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Perubahan Ekuitas untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang aliran sumber daya tersebut.

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp861.958.746.969,00** dan Rp113.068.986.126,00. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp748.889.760.843,00 atau 662,33% apabila dibandingkan dengan nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Transaksi Antar Entitas *Audited* menjadi senilai **Rp862.535.946.969**.

Transaksi Antar Entitas
periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (dalam Rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2025 Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 Audited	31 Desember 2024	Naik/ Turun %
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	882.340.623.467	0	882.340.623.467	839.108.443.593	5,15
313121	Diterima dari Entitas Lain	(42.932.206.730)	0	(42.932.206.730)	(40.148.871.686)	6,93
313211	Transfer Keluar	(53.340.655.849)	0	(53.340.655.849)	(1.214.228.980.456)	(95,61)
313221	Transfer Masuk	53.527.861.225	0	53.527.861.225	469.862.177.843	(88,61)
391131	Pengesahan Hibah Langsung	21.954.870.763	0	21.954.870.763	24.084.512.623	(8,84)
391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(178.152.907)	0	(178.152.907)	(24.816)	717.795,34
391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	586.407.000	577.200.000	1.163.607.000	34.391.729.025	(96,62)
	Jumlah	861.958.746.969	577.200.000	862.535.946.969	113.068.986.126	662,84

E.4.1 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain (DKEL/DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp882.340.623.467,00** dan Rp839.108.443.593,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp43.232.179.874,00 atau 5,15% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Ditagihkan ke Entitas Lain *Audited* adalah tetap.

E.4.2 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **(Rp42.932.206.730,00)** dan (Rp40.148.871.686,00). Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar (Rp2.783.335.044,00) atau 6,93% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Diterima dari Entitas Lain *Audited* adalah tetap.

E.4.3 TRANSFER KELUAR

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **(Rp53.340.655.849,00)** dan (Rp1.214.228.980.456,00). Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.160.888.324.607,00 atau (95,61%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Transfer Keluar *Audited* adalah tetap.

E.4.4 TRANSFER MASUK

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar [Rp53.527.861.225,00](#) dan Rp469.862.177.843,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp416.334.316.618,00) atau (88,61%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Transfer Masuk *Audited* adalah tetap.

E.4.5 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar [Rp21.954.870.763,00](#) dan Rp24.084.512.623,00. Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp2.129.641.860,00) atau (8,84%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)	Pemberi Hibah	Nomor Register	Project
018.09.237217	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	187.725.894	ONION NZ	2WM1TC7A	Agriculture standardization toward sustainable shallot production in Indonesia
018.09.237221	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya	4.508.928.608	FAO	2LY44N2A	Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia
018.09.237238	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	970.200.000	AFACI	2UERPT5A	Asia Regional FAW and BPH Diagnostics and Monitoring and Surveillance Program

Kode	Nama Satker	Nilai (Rp)	Pemberi Hibah	Nomor Register	Project
		400.605.000	IFPRI	2CV12XNA	Standardization OF High Zinc Rice Biofortificationfor Indonesia
		493.800.000	AFACI	2BT3NKSA	Accelerate Variety Registration and Seed Distribution of Stress Tolerant Rice Varieties by AFACI Member Countries
018.09.237242	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	626.600.363	ACIAR	2W2H8PDA	Crop Health and Nutrient Management of Shallot-Chili-Rice Cropping System in Coastal Indonesia
		484.950.000	AFACI	2227WN8A	National Soil Information Systems to Support the Transformation of Agrifood Systems in AFACI Countries
		663.867.900	KOAT	2JL7VCNA	Indonesia Testbed Project
018.09.237306	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik	6.808.630.400	Hirata Corporation	2SMP97TA	Bioprospecting of Indonesian Medicinal Plants for Functional Foods Cosmetics Toiletries and Pharmaceuticals Uses
018.09.411987	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	1.194.452.118	Sakata Seed Cooperation	2RG22RNA	Cooperation Expedition Evaluation and Breeding Program for New Ornamental Plants (CEEBP)
018.09.411993	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	350.798.084	AVRDC-World Veg Center	272ZYD9A	International Mungbean Improvement Network IMIN2
018.09.537628	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	549.169.800	UNESCAP	24PMKT7A	Strengthening Mechanization-based solutions for climate-smart crop residue management in Cambodia Indonesia and Nepal
018.09.648669	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	1.160.565.000	AFACI	272GNQ2A	Quality Improvement of Asian Food Composition Database
018.09.648680	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	3.554.577.596	Himpunan Produsen Pupuk Organik (HIMPO) Indonesia	27HX3LEA	Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi Merek Petroganik
JUMLAH		21.954.870.763			

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pengesahan Hibah Langsung *Audited* adalah tetap.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp178.152.907,00** dan Rp24.816,00. Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp178.128.091,00 atau 717.795,34% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

No.	Kode	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp)
1	018.09.237217	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	AFACI	2EJ26YRA	Development of Vegetable Varieties in Asia Region	38.195
2	018.09.648669	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	AFACI	2EGMQPNA	Establishment of Asian Food Composition Database (AFCD)	1.114.016
3	018.09.648673	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	AFACI	28CQ4JVA	Improvement of Rural Agricultural Technology Extension System in Asia	180
4	018.09.648680	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	Himpunan Produsen Pupuk Organik (HIMPO) Indonesia	27HX3LEA	Pengujian Mutu Pupuk Organik Subsidi Merek Petroganik	177.000.516
						178.152.907

Setelah dilaksanakan Audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung *Audited* adalah tetap.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar **Rp586.407.000,00** dan **Rp34.391.729.025,00**. Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp33.805.322.025,00) atau (98,29%) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL *Audited* menjadi senilai **Rp1.163.607.000,00**.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

No.	Kode	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp) Unaudited	Nilai Pengesahan (Rp) Audited
1	018.09.567449	Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	Pemerintah Kab. Solok		Hibah barang milik daerah berupa bangunan dari Pemerintah Kabupaten Solok kepada BRMP Sumatera Barat	586.407.000	586.407.000
2	018.09.412050	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	BADAN USAHA MILIK NEGARA	2VJRUR6A	Hibah Barang Langsung Berupa Peralatan Mesin Dari PT Pupuk Kalimantan Timur kepada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	0	577.200.000

No.	Kode	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Register	Nama Proyek	Nilai Pengesahan (Rp) Unaudited	Nilai Pengesahan (Rp) Audited
						586.407.000	1.163.607.000

Koreksi pencatatan setelah Audit BPK disebabkan adanya koreksi atas dokumen Pengesahan MPHL BJS yang sebelumnya telah terbit di tahun 2026 menjadi tahun 2025 pada Satker BRMP Buah Tropika (412050).

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada 31 Desember 2025, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp85.031.775.675,00). Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp706.833.622.218,00 atau (89,26%) apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas 31 Desember 2024 sebesar (Rp791.865.397.893,00).

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Kenaikan/ Penurunan Ekuitas *Audited* menjadi senilai (Rp82.843.454.860,00).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp44.157.311.747.023,00 dan Rp44.242.343.522.698,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp85.031.775.675,00) atau (0,19%) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

Setelah dilaksanakan Audit BPK terdapat koreksi pencatatan, sehingga saldo Ekuitas Akhir *Audited* menjadi senilai Rp44.159.500.067.838,00.

Perhitungan Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada table berikut.

Uraian	31 Desember 2025 (Rp) Unaudited	Koreksi	31 Desember 2025 (Rp) Audited	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Ekuitas Awal	44.242.343.522.698	-	44.242.343.522.698	45.034.208.920.591	(791.865.397.893)	(1,76)
Surplus/Defisit-Lo	(945.156.186.554)	1.530.075.815	(943.626.110.739)	(891.854.538.218)	(51.771.572.521)	5,80
Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(1.834.336.090)	81.045.000	(1.753.291.090)	(13.079.845.801)	11.326.554.711	(86,60)
Transaksi Antar Entitas	861.958.746.969	577.200.000	862.535.946.969	113.068.986.126	749.466.960.843	662,84
Ekuitas Akhir	44.157.311.747.023	2.188.320.815	44.159.500.067.838	44.242.343.522.698	(82.843.454.860)	(0,19)

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. PERUBAHAN PEJABAT PERBENDAHARAAN

Sesuai keputusan Menteri Pertanian Nomor 485//KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian terdapat beberapa poin penting yaitu:

- a. Apabila terjadi pergantian Kepala Satuan Kerja definitif, setelah dilakukan serah terima jabatan, Kepala Satuan Kerja yang baru secara otomatis menjadi KPA pada Satuan Kerja tersebut. Apabila terjadi kekosongan maka Eselon I mengusulkan pejabat KPA melalui Sekretariat Jenderal.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
- c. Kepala Satker diberi kewenangan untuk mengangkat bendahara pengeluaran dan penerimaan.

Pada tahun 2023 terdapat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1/KPTS/KU.010/A/04/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 485/KPTS/KU.010/A/8/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian. Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 325.1 tahun 2023 terdapat beberapa poin yaitu jika satuan kerja tidak memiliki Kepala Satker maka penunjukan Bendahara Pengeluaran dapat ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 9 kali perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang penunjukkan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SK	TANGGAL	HAL	PERUBAHAN
1	146/KPTS/KU.010/A/03/2025	14 Maret 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	Muhammad Syawal, S.Pt., M.Si.
2	147/KPTS/KU.010/A/03/2025	14 Maret 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	Nurjaman, S.TP, MM.
3	147/KPTS/KU.010/A/03/2025	14 Maret 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP, MP
4	147/KPTS/KU.010/A/03/2025	14 Maret 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	Dr. Ir. Titik Sundari, MP
5	328.1/KPTS/KU.010/A/05/2025	16 Mei 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Pt Kepala Balai 60 Satker
6	1334/KPTS/KU.010/A/11/2025	17 November 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Dr. Ir. Erna Suryani, M.Si
7	1353/KPTS/KU.010/A/12/2025	1 Desember 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	Ir. Yusuf, M.Si
8	1354/KPTS/KU.010/A/12/2025	1 Desember 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
9	1384.1/KPTS/KU.010/A/12/2025	1 Desember 2025	Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Dr. Ahmad Yunan, M.Si

F.2. REKENING PEMERINTAH

Pada Semester II TA 2025 terdapat 152 rekening Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang terdiri dari:

- Rekening Pengeluaran 64
- Rekening Penerimaan 10
- Rekening Lainnya 73
- Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu 5

Pada tahun 2025, seluruh rekening Bendahara Pengeluaran satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah menggunakan rekening *Virtual Account*.

Rincian rekening Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan dalam lampiran

F.3. HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Pada periode penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025, terdapat 20 proyek hibah langsung luar negeri berbentuk uang pada 12 satker dan 1 hibah langsung luar negeri dalam bentuk barang pada 1 satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Saldo awal hibah langsung luar negeri senilai Rp3.609.754.456,00, Total pendapatan senilai Rp18.400.293.167,00, belanja senilai Rp17.942.865.288,00, saldo bruto senilai Rp4.067.182.335,00, saldo yang telah disetor ke Kas Negara senilai Rp1.152.391,00, dan saldo netto senilai Rp4.066.029.944,00.

1) Hibah Bentuk Uang

Total hibah langsung luar negeri dalam bentuk uang pada 12 Satker, Saldo Awal Rp3.609.754.456,00, Pendapatan Rp11.591.662.767,00, Belanja Rp11.134.234.888,00, Saldo Bruto Rp4.067.182.335,00, Pengembalian sudah disetor Rp1.152.391,00, Saldo Netto Rp4.066.029.944,00.

2) Hibah Bentuk Barang

Total hibah langsung luar negeri dalam bentuk barang pada 1 proyek hibah pada satker BRMP Troa, Saldo Awal Rp0,00, Pendapatan Rp6.808.630.400,00, Belanja Rp6.808.630.400,00, Saldo Bruto Rp0,00, Pengembalian Rp0,00, Saldo Netto Rp0,00.

Hibah barang pada Satker BRMP Troa berupa Alat Laboratorium dan Software sebanyak 10 unit dengan harga perolehan senilai Rp6.808.630.400,00, telah dicatat sebagai Aset Tetap.

Rincian hibah Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan dalam lampiran

F.4. HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Pada periode penyusunan Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian memiliki 2 proyek hibah langsung dalam negeri pada 2 satuan kerja yaitu hibah langsung dalam bentuk uang di Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk senilai Rp3.554.577.596,00 dan hibah dalam bentuk barang pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika senilai Rp577.200.000,00. Saldo awal senilai Rp0,00, dengan total pendapatan senilai Rp4.131.777.596,00, belanja senilai Rp3.954.777.080,00, sehingga menyajikan sisa saldo dana hibah berupa saldo bruto senilai Rp177.000.516,00. Sisa saldo dana hibah dalam negeri tersebut telah disetor ke Kas Negara senilai Rp177.000.516,00 dan menyajikan saldo netto senilai Rp0,00.

Hibah barang pada Satker BRMP Buah berupa peralatan mesin Ekskavator sebanyak 1 unit dengan harga perolehan senilai Rp577.200.000,00 dan telah dicatat sebagai Aset Tetap.

Rincian hibah Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan dalam lampiran

F.5. CATATAN PENTING LAINNYA TERKAIT PIUTANG

Saldo temuan hasil pemeriksaan APIP pada Satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2024 senilai Rp8.102.186.140,14. Temuan Itjen Kementan totalnya Rp6.326.782.255,01 dengan rincian temuan Itjen regular yang senilai Rp4.180.322.366,81 memiliki SKTJM dan Rp14.000.000,00 tidak memiliki SKTJM, serta temuan Itjen Investigasi totalnya senilai Rp2.132.459.888,20 memiliki SKTJM dan Temuan BPK totalnya Rp1.775.403.885,13 dengan rincian senilai Rp1.024.108.978,15 memiliki SKTJM dan Rp751.294.906,98 tidak memiliki SKTJM. Semua temuan BPK ini tercatat pada Neraca Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementan, dan Itjen Kementan per 31 Desember 2025 total temuan hasil pemeriksaan APIP pada Satker lingkup Perakitan dan Modernisasi Pertanian senilai Rp5.900.665.552,11 dengan rincian:

1. Temuan Itjen Kementan totalnya Rp4.359.174.981,96 dengan rincian temuan Itjen regular yang senilai Rp2.261.248.758,76 memiliki SKTJM dan Rp72.334.535,00 tidak memiliki SKTJM, serta temuan Itjen Investigasi totalnya senilai Rp2.025.591.688,20 memiliki SKTJM.
2. Temuan BPK totalnya Rp1.541.490.570,15 dengan rincian senilai Rp961.867.498,15 memiliki SKTJM dan Rp579.623.072,00 tidak memiliki SKTJM. Semua temuan BPK ini tercatat pada Neraca Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Berdasarkan Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 total Piutang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian senilai Rp6.848.506.007,00 dengan rincian:

1. Piutang bukan pajak senilai Rp2.913.291.366,00.
2. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR senilai Rp16.463.314,00.
3. Piutang jangka panjang TP/TGR senilai Rp715.365.464,00.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya senilai Rp3.203.385.863,00

Secara nominal, apabila dibandingkan Total temuan APIP senilai Rp5.900.665.552,00 dengan total Piutang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang tercatat di neraca senilai Rp6.848.506.007,00 ada perbedaan senilai Rp947.840.455,00 yang disebabkan oleh piutang bukan pajak bukan temuan APIP yang tercatat di Neraca pada satker BPHPMP senilai Rp383.375.111,00, pada satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah senilai Rp14.877.000,00, pada satker Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian senilai Rp63.356.250,00, pada satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Sumatera utara senilai Rp148.656.720 dan pada satker BBP2MP senilai Rp409.909.906,00 tercatat pada neraca, dan Temuan Itjen Pada satker PRMP Perkebunan senilai Rp14.000.000,00 dan Satker Sekretariat BRMP senilai Rp58.334.532 belum BerSKTJM sehingga belum tercatat pada neraca.

Dari Total Piutang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang tercatat di neraca senilai Rp6.848.506.007,00 terdapat temuan yang ber Kategori Macet senilai Rp3.607.414.553,00.

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan Koreksi Internal terdapat koreksi pencatatan bertambah senilai Rp606.120.572,00 sehingga Total Piutang per 31 Desember 2025 Audited adalah senilai Rp7.454.626.579. Koreksi transaksi tersebut merupakan tidak lanjut Catatan Pemeriksaan BPK pada beberapa Satker Lingkup Badan Perakitan dan

Modernisasi Pertanian pada Piutang Lainnya (PNBP) senilai Rp601.352.628,00 dan pada Piutang TP/TGR senilai Rp4.767.944,00

Rincian Daftar Piutang per satker lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disajikan pada lampiran

F.6. PENYELESAIAN TLHP BPK

Per 31 Desember 2025 masih terdapat beberapa LHP Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dan memuat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian TA 2024 Nomor 21b/LHP/XVII/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan Kementerian Pertanian Tahun 2024. Dalam LHP ini terdapat 6 temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu:
 - a. Penerimaan Hasil Kerja Sama Satker BPSI TP pada BSIP dengan Pihak Ketiga Tidak Dianggarkan dan Tidak Dilaporkan Dalam Laporan Keuangan
 - b. Pengelolaan PNBP Tahun 2024 pada Setjen, BPSIP Jatim, dan BPSITAS Jatim Belum Memadai
 - c. Penganggaran dan Penggunaan Akun Belanja pada Ditjen TP, Setjen, dan BSIP Tidak Tepat
 - d. Pelaksanaan Belanja Barang Selain MAK 526 Tidak Sesuai Ketentuan
 - e. Penatausahaan Kas Tahun 2024 pada BSIP, Setjen, dan BPPSDMP Belum Tertib dan Belum Didukung Pengendalian yang Memadai
 - f. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Kementerian Pertanian Belum Optimal

Atas seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian / Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

F.7. REVISI DIPA

DIPA awal Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terbit tanggal 02 Desember 2024 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp929.038.379.000,00. Revisi DIPA/RKA-KL sampai dengan Triwulan IV TA 2025 telah dilakukan sebanyak 10 kali, meliputi:

DIPA awal Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terbit tanggal 02 Desember 2024 dengan total alokasi anggaran sebesar Rp929.038.379.000,00. Pada tahun anggaran berjalan, BSIP bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sehingga dilakukan penyesuaian pada nomenklatur satker lingkup BRMP. Revisi DIPA/RKA-KL sampai dengan Triwulan IV TA 2025 telah dilakukan antara lain :

- a. **Revisi DIPA ke-1 pada tanggal 20 Februari 2025 tentang Revisi Pencantuman Catatan Halaman IV.A DIPA Kode A (Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya) dalam rangka Efisiensi Belanja APBN sebesar Rp119.031.434.000,00.** Revisi ini sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Surat Menteri Keuangan Nomor: S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN TA. 2025, Surat Menteri Keuangan: S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja K/L dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA.2025, serta Memorandum Menteri Pertanian

Nomor: 36 /RC.110/M/01/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementan TA. 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu hanya perubahan total blokir BSIP dari semula sebesar Rp323.057.745.000,00 menjadi sebesar Rp350.514.981.000,00.

- b. **Revisi DIPA ke-2 pada tanggal 25 Maret 2025 tentang Revisi Penghapusan Blokir Efisiensi Belanja APBN dan pergeseran anggaran antar program antar satker pada kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian** dalam rangka mewujudkan swasembada sebesar Rp83.530.000.000,00. Dasar kebijakannya Surat Perintah Menteri Pertanian Nomor 135/RC.010/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang penugasan kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk melaksanakan kegiatan produksi benih sumber dan pendampingan dan/atau pengawalan terhadap kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Surat Persetujuan Menteri Pertanian Nomor 133/RC.110/M/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang usulan revisi anggaran berupa pergeseran anggaran antar Program lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan Surat Menteri Pertanian Nomor B-134/RC.110/M/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 Hal Usulan Revisi Pembukaan Blokir Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian TA 2025. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu hanya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program antar satker dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp350.514.981.000,00 menjadi sebesar Rp323.057.745.000,00.
- c. **Revisi DIPA ke-3 pada tanggal 30 April 2025 tentang Revisi Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir Anggaran BRMP**, yaitu 1) Pergeseran anggaran antar program antar satker dari Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (NTDSI) satker BRMP Padi sebesar Rp36.470.000.000,00 ke program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (KAKPB) satker BRMP Padi dan 22 satker lingkup BRMP Penerapan untuk kegiatan produksi benih sumber padi; 2) Pergeseran anggaran antar kegiatan antar RO pada Program NTDSI yaitu pada kegiatan sumber dana PLN (Rp130.000.000.000,00) dan PNPB (Rp17.558.197.000,00) sehubungan dengan adanya transformasi Lembaga sehingga perlu penyesuaian informasi kinerja; 3) Pada Kegiatan Dukman, terdapat pergeseran anggaran antar KRO/RO dari Layanan Umum sebesar Rp83.530.000.000,00 dan RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp3.240.000.000,00 ke RO Koordinasi Program Strategis Kementan; dan 4) Penghapusan blokir anggaran perbenihan, program strategis Kementan, dan dukungan manajemen satker. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu hanya mengakibatkan pergeseran anggaran antar program antar satker dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp323.057.745.000,00 menjadi sebesar Rp189.677.209.000,00.
- d. **Revisi DIPA ke-4 pada tanggal 1 Juli 2025 tentang Revisi Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir Anggaran pada Proyek *Integrated Corporation of Agriculture Resources Empowerment* (ICARE) pada Komponen A dan B di 10 PIU** sehubungan dengan adanya penyesuaian alokasi anggaran per PIU berdasarkan AWP dan diperolehnya NoL atas AWP. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp189.677.209.000,00 menjadi sebesar Rp133.697.004.000,00.
- e. **Revisi DIPA ke-5 pada tanggal 4 Juli 2025 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran** tentang pergeseran anggaran antar satker pada Program Dukungan Manajemen dalam rangka pemenuhan kekurangan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan roda 4 dan penambahan/pengalihan anggaran honorarium PNPB yang melibatkan tiga satker, yaitu Sekretariat BRMP, BBPM Pascapanen Pertanian, dan BPMP

Jakarta. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.

- f. **Revisi DIPA ke-6 pada tanggal 2 September 2025 tentang Revisi Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir Anggaran BRMP**, yaitu 1) Pergeseran anggaran antar jenis belanja antar satker dari Belanja Barang Operasional (002) ke Belanja Pegawai Operasional (001) sebesar Rp9.426.763.000,00 untuk pemenuhan gaji PPPK Tahap I; 2) Pergeseran anggaran antar program antar satker dari Program Dukungan Manajemen dialihkan ke Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp10.545.422.000,00 untuk perbenihan tiga komoditas strategis (kedelai, gandum, bawang putih); 3) Pergeseran anggaran antar RO dalam rangka penyesuaian RO; dan 4) Penghapusan blokir penyesuaian RO, Relaksasi Perjadin, dan Kegiatan ICARE (Komponen C dan Modal di Komponen A) sebesar Rp28.464.929.000,00. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan pagu total hanya perubahan pagu per program, per jenis belanja, dan per satker serta perubahan total blokir dari semula sebesar Rp133.697.004.000,00 menjadi sebesar Rp105.232.075.000,00.
- g. **Revisi DIPA ke-7 pada tanggal 19 September 2025 tentang Penyesuaian/Penambahan Pagu PNB dan Penghapusan Blokir anggaran BRMP**, yaitu 1) Pergeseran/Penyesuaian anggaran antar program dan/atau antar satker yang bersumber dari penerimaan PNB dan 2) Penghapusan blokir sumber dana PNB dan PLN sehubungan dengan telah adanya ijin penggunaan PNB BRMP, persetujuan relaksasi blokir anggaran perjalanan dinas, dan perhitungan PUPR lantai jemur BRMP Jawa Timur. Revisi ini mengakibatkan penambahan pagu BRMP dari semula sebesar Rp929.038.379.000,00 menjadi sebesar Rp931.868.811.000,00 dan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp105.232.075.000,00 menjadi sebesar Rp72.518.733.000,00.
- h. **Revisi DIPA ke-8 pada tanggal 3 Oktober 2025 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran tentang pergeseran anggaran antar satker** sehubungan dengan pemenuhan kekurangan anggaran belanja Operasional dan pemeliharaan gedung/ bangunan/ rumah dinas /mess /halaman/ pagar/jalan/ kandang dan saluran irigasi/kegiatan kerumahtanggaan satker, monitoring dan evaluasi serta kegiatan pendampingan Luas Tambah Tanam (LTT) dan produksi Benih Sumber Bawang Putih yang merupakan Program Strategis Kementerian Pertanian dalam rangka mencapai Swasembada Pangan yang melibatkan 63 satker. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.
- i. **Revisi DIPA ke-9 pada tanggal 30 Oktober 2025 tentang Realokasi Internal dan Penghapusan Blokir ICARE, PNB, dan RM Non Perjadin** meliputi kegiatan Matching Grant, Pengadaan APD Alsintan di 3 PIU, Pengadaan Kendaraan Fungsional, dan Penyesuaian Item Belanja yang diefisiensi. Revisi ini tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP hanya mengakibatkan perubahan total blokir dari semula sebesar Rp72.518.733.000,00 menjadi sebesar Rp27.785.707.000,00.
- j. **Revisi DIPA ke-10 pada tanggal 19 November 2025 ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran tentang Realokasi Internal** sehubungan dengan pemenuhan anggaran Belanja Pegawai (001) dan belanja barang operasional (002) untuk mengakomodir kekurangan gaji PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Tenaga Non ASN dan perbaikan jalan/drainase dampak dari banjir serta Belanja Barang Non Operasional untuk kegiatan koordinasi pengusulan penetapan lahan satker baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang melibatkan 39 satker Revisi ini

tidak mengakibatkan perubahan total pagu BRMP, hanya mengakibatkan perubahan pagu per satker.

Selain revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terdapat revisi penambahan pagu PNPB dan Hibah Langsung Luar/Dalam Negeri ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang dilakukan secara mandiri oleh beberapa satker, yaitu:

1. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (648716), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp129.500.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 10 November 2025;
2. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (648669), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp598.800.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 11 November 2025;
3. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu (633996), penambahan pagu PNPB sebesar Rp80.000.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 13 November 2025;
4. Satker Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar (648720), penambahan pagu PNPB sebesar Rp244.800.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 13 November 2025;
5. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang (411993), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp294.376.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 15 November 2025;
6. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian (237242), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.384.377.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 16 November 2025;
7. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta (633975), penambahan pagu PNPB sebesar Rp96.410.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 17 November 2025;
8. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias (411987), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.663.439.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 18 November 2025;
9. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik (237306), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp237.225.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 21 November 2025;
10. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (237572), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp217.380.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 25 November 2025;
11. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten (450831), penambahan pagu PNPB sebesar Rp245.184.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 27 November 2025;
12. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (237217), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp743.386.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 28 November 2025;
13. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi (237238), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp1.173.605.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 30 November 2025;

14. Satker Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan (567495), penambahan pagu PNPB sebesar Rp47.039.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 2 Desember 2025;
15. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (537628), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp549.550.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 9 Desember 2025;
16. Satker Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (648673), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp451.612.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 15 Desember 2025;
17. Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (237221), penambahan pagu Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp3.664.121.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 29 Desember 2025;
18. Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk (648680), penambahan pagu Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp3.384.696.000,00 dengan persetujuan DIPA tanggal 29 Desember 2025.

Penambahan pagu di atas mengakibatkan perubahan pagu total BRMP per 30 Desember 2025 menjadi sebesar Rp947.074.311.000,00 dengan blokir sebesar Rp27.785.707.000,00.

F.8. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

a. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan pada satker Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat terdapat belanja barang peralatan & Mesin berupa wireless presenter dari kegiatan ICARE bukan menggunakan akun 5218 tetapi menggunakan akun Belanja Barang Ekstrakomtabel yakni 5212 akan tetapi dibukukan pada aplikasi SAKTI Modul Persediaan yang seharusnya tidak dibukukan pada modul tersebut melainkan dibukukan pada modul Aset Tetap masuk/diakui sebagai barang ekstrakomtabel.

b. Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Milik Negara

Terdapat Ketidaksesuaian akun VS kode BMN berdasarkan BAST Non Kontraktual dan BAST Kontraktual pada satker BRMP sebagai berikut :

- BBPPMP

Ketidaksesuaian kode akun VS BMN senilai Rp498.561.772,00 ini disebabkan karena satker selaku UAKPA terdapat Aset Tetap Renovasi tetapi untuk pembiayaan nya menggunakan akun 533121: Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang seharusnya menurut KEP 311 menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111), dimana dalam Keputusan tersebut mengungkapkan bahwa Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat.

- Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat

Ketidaksesuaian senilai Rp4.472.160,00 ini disebabkan karena satker membelanjakan aset/barang ekstrakomtabel (dibawah nilai kapitalisasi) menggunakan akun 53 yang seharusnya utk brg ekstrakomtabel menurut PMK 181 tahun 2016 dan turunannya Kep 311/PB/2021 tentang BAS menjelaskan bahwa untuk belanja barang ekstrakomtabel agar menggunakan akun 52: 521252 (Belanja Alsin Ekstrakomtabel), 521253 (Belanja Gedung & Bangunan Ekstrakomtabel), 521254 (Belanja Aset Tetap Lainnya Ekstrakomtabel).

- Balai Perakitan dan Pengujian Serealia

Ketidaksesuaian kode akun VS Persediaan senilai Rp125.541.000,00 ini disebabkan karena satker selaku UAKPA mencatat belanja 521811 dalam modul komitmen namun melakukan pencatatan rincian kedalam aset tetap (peralatan dan mesin- 532111) oleh sebab itu dilakukan koreksi pencatatan dan diinput sebagai perolehan lainnya pada persediaan barang konsumsi

- BRMP Sulawesi Utara

Ketidaksesuaian kode akun VS BMN senilai Rp38.880.000,00 ini disebabkan karena satker selaku UAKPA mencatat belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam modul komitmen namun melakukan pencatatan rincian kedalam aset tetap (peralatan dan mesin) sehingga muncul aset tetap belum diregister oleh sebab itu dilakukan reklasifikasi keluar masuk ke aset yang seharusnya yaitu peralatan dan mesin serta akun Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada masyarakat

- BRMP Tanaman Hias

Ketidaksesuaian kode akun VS BMN ini disebabkan adanya pembelian aset berupa peralatan dan mesin, dan penambahan nilai bangunan dengan total Rp72.158.344,00 yang dicatat dengan akun 532111 untuk peralatan dan mesin dan akun 533121 untuk gedung dan bangunan yang seharusnya tercatat dengan akun 521252 untuk peralatan dan mesin dan 521253 untuk gedung dan bangunan dikarenakan nilai pembelian tersebut dibawah satuan minimum kapitalisasi.

- BRMP Nusa Tenggara Barat

Ketidaksesuaian akun VS BMN ini disebabkan adanya Pembelian barang modal senilai Rp651.949.999,00 yang seharusnya tercatat sebagai akun 532111 untuk Peralatan dan Mesin namun dilakukan pembelian dengan belanja barang persediaan bahan baku dengan akun 521811 senilai Rp650.000,00 dan menggunakan akun Belanja Peralatan dan mesin diserahkan kepada masyarakat dengan akun 526112 senilai Rp649.999.999,00 Koreksi Peralatan dan mesin dilakukan karena kesalahan pencatatan pada modul komitmen. Seharusnya BMN tersebut masuk ke aset namun masuk ke persediaan, atas kesalahan tersebut sudah dilakukan reklasifikasi keluar ke persediaan.

- LPP Ruminansia Kecil

Ketidaksesuaian akun VS BMN senilai Rp2.015.000,00 ini disebabkan adanya pembelian barang modal berupa hollow dibawah nilai kapitalisasi berupa pemeliharaan naungan kebun sumber benih dengan menggunakan akun Belanja Gedung dan Bangunan – Ekstrakomtabel 523123 namun tercatat di modul komitmen sebagai aset/jasa dikapitalisasi

- c. Hibah yang Belum Disahkan

Terdapat Hibah yang Belum Disyahkan senilai Rp577.200.000,00 pada satker BRMP Buah Peralatan dan Mesin dari PT. Pupuk Kaltim Satu unit peralatan mesin yaitu Ekskavator untuk pengolahan lahan kerjasama antara PT Pupuk Kalimantan Timur. Hal tersebut terjadi karena Memo Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa yang diusulkan ke KPPN seharusnya terbit sesuai periode TA 2025 namun terbit sebagai MPHLBJS TA 2026, terkait hal tersebut telah bertiket ke HAIDJPB dan dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Setelah dilaksanakan Audit BPK dan koreksi internal terdapat koreksi, sehingga saldo Hibah yang Belum Disahkan Tahun 2025 *Audited* adalah nihil.

2. KETEKORAN KAS AKIBAT HILANG/BENCANA DI BENDAHARA

Saat periode pelaporan keuangan per 31 Desember 2025, satker Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yakni Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara mengalami bencana pada Kas di Bendahara Pengeluaran TUP senilai Rp417.749.718,00 dikarenakan adanya penyalahgunaan dana oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 atas nama Juddy dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

a. Kronologis

Berdasarkan surat kronologis yang ditandatangani Kepala Balai selaku Kuasa Pengguna Anggaran TA. 2025 BBRMP Sulawesi Utara sejak tanggal 21-28 Desember 2025 telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdr. Juddy (Bendahara Pengeluaran) dengan menarik uang melalui ATM uang kantor yang bersumber dari dana APBN TA. 2025 ke rekening pribadi tanpa sepengetahuan KPA dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dugaan penyalahgunaan/penyelewengan uang TUP yang tidak dapat disetorkan senilai Rp. 417.749.718,00 diketahui setelah Sdr. Juddy tidak dapat dihubungi baik oleh pihak kantor maupun dari keluarga serta kerabat.

b. Nilai atas Ketekoran Kas

Saat periode Pelaporan Keuangan 31 Desember 2025 Unaudited, Satker Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yakni Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara (BRMP Sulawesi Utara) Kode Satker 018.09.1700.634022.KD masih terdapat Saldo di Kas Bendahara Pengeluaran pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Unaudited senilai Rp804.593.634,00. Pada Bulan Januari 2026 dilakukan beberapa kali penyetoran oleh Satker pada tanggal:

- 2 Januari 2026 disetorkan senilai Rp1.579.474,00 NTPN 9A3427NAV0PAMLVO (Setoran TUP PNBPN);
- 5 Januari 2026 disetorkan senilai Rp675.249,00 NTPN 739C7397D99K722P (Setoran TUP Pinjaman Luar Negeri);
- 7 Januari 2026 disetorkan senilai Rp374.859.576,00 NTPN 1FFCE0JUTPIF037I (Setoran TUP RM);
- 20 Januari 2026 disetorkan senilai Rp4.729.617,00 NTPN EC7282CQ01G2F2AS (Setoran TUP RM);
- 27 Januari 2026 disetorkan senilai Rp5.000.000,00 NTPN F5F5A2CQ01IEPC36 (Setoran TUP RM).

Total setoran senilai Rp386.843.916,00. Dengan demikian, terdapat tekor kas yang diakibatkan Bendahara Pengeluaran yang membawa lari uang senilai

Rp417.749.718,00. Berkenaan dengan permasalahan kas ini sesuai Bultek Nomor 20 tentang Akuntansi Kerugian Negara dan berdasarkan Nota Kesepakatan Final (NKF) Usulan Jurnal Koreksi, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TUP senilai

Rp417.749.718,00 dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Lainnya oleh satker, dimana hal ini didukung juga dengan Surat Pernyataan Kepala BBRMP Sulawesi Utara tentang Kesanggupan Sisa TUP Tahun Anggaran 2025 dan SK Kepala Badan Nomor: 394/Kpts/PW.210/H/04/2026 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Namun berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Itjen Nomor: R.016/PW.120/G.6/03/2026 Tanggal 4 Maret 2026 atas Dugaan Penyimpangan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran BRMP Sulut diperoleh fakta bahwa telah terjadi penyimpangan pengelolaan kerugian Negara oleh Sdr. Juddy selaku Bendahara Pengeluaran seluruhnya senilai Rp434.622.749,00.

- c. Status penyelesaian kasus ini sampai dengan periode laporan keuangan audited tahun 2025 masih dalam proses upaya penyelesaian antara lain yakni:

Sejak tanggal 30 Desember 2025, pihak BBRMP Sulawesi Utara membuat Pengaduan ke Polresta Manado. Selanjutnya tanggal 28 Januari 2026 pihak BBRMP Sulawesi Utara mendapatkan Surat dari Polresta Manado hal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan yang mana telah dilakukan gelar perkara dan meminta Audit investigasi/pemeriksaan khusus ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti. Tanggal 8 April 2026, Kepala BBRMP Sulawesi Utara menyampaikan Surat ke Kapolresta Manado hal meminta informasi perkembangan penanganan kasus Sdr. Juddy untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pertanian kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sehubungan dengan hasil pemeriksaan/audit khusus sesuai permintaan Kasat Reskrim Polresta Manado Polda Sulut. Surat Kepala BBRMP Sulawesi Utara selanjutnya dibalas oleh Kasat Reskrim Polresta Manado Polda Sulut pada tanggal 20 April 2026 yang isi suratnya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan hingga kini belum ada perkembangan lagi.

Berkenaan dengan TP/TGR, sesuai dengan Perka BPK No.03 2007, hingga saat ini SKTJM belum diperoleh mengingat keberadaan Sdr. Juddy tidak diketahui. Permohonan untuk tindak lanjut laporan pengaduan ke Polresta Manado oleh BBRMP Sulawesi Utara hingga saat ini belum diperoleh perkembangan terbaru. Selanjutnya, Kepala BRMP mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara (SKPS) yang membebani penggantian kerugian negara kepada Sdr. Juddy senilai Rp. 434.322.749 serta menugaskan kepala BBRMP Sulawesi Utara selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara untuk menagih dan meminta Sdr. Juddy menyetor ke kas negara besaran KN tersebut.

Rekening bank Sdr. Juddy telah dilakukan pemblokiran, pembayaran gaji tidak lagi diproses sejak Februari 2025 dan tunjangan kinerja sejak bulan Januari 2026 tidak lagi dibayarkan.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak diperoleh sampai dengan periode pelaporan keuangan audited tahun 2025, namun ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Nomor: 394/Kpts/PW.210/H/04/2026 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Berkenaan dengan pengenaan hukuman disiplin PNS Sdr. Juddy telah berproses sesuai dengan PP 94 Tahun 2021. Surat Sekretaris BRMP telah disampaikan ke Kepala Biro OSDMA dan diusulkan untuk diproses berupa Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri.

d. Perlakukan akuntansi dalam laporan Keuangan

Terkait dengan perlakuan akuntansi untuk permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran TUP senilai Rp417.749.718,00 berdasarkan Surat Direktorat PKN Nomor: S-177/PB.3/2026 Tanggal 6 Mei 2026 hal Tanggapan atas Pembukaan Menu Pengurangan Kas Tahun 2025 pada Satker BRMP Sulawesi Utara, maka dilakukan reklasifikasi saldo atas ketekoran kas dengan membukukan transaksi keluar kas atas ketekoran kas pada Menu Pengurangan Kas Akibat Hilang/Bencana pada Bendahara Pengeluaran pada Modul Bendahara diaplikasi SAKTI.

Surat Dit.PKN Ditjen Perbendaharaan tersebut atas tanggapan Surat Sekreatris BRMP hal pembukaan menu pengurangan kas tahun 2025 pada BRMP Sulawesi Utara melakukan telaah dan analisis bahwa:

- Permasalahan saldo kas di Bend pengeluaran TUP pada Neraca Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Satker BBRMP Sulawesi Utara yang tidak dapat disetorkan ke kas negara termasuk kategori ketekoran kas.
- Ketekoran kas di BBRMP Sulawesi Utara terindikasi kerugian negara yang penyelesaiannya tetap berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2027 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara.
- Mempedomani ketentuan akuntansi, PSAP, dan Buletin Teknis Nomor 20 tentang akuntansi piutang berbasis akrual dinyatakan bahwa terkait sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan harus digeser ke Aset Lainnya karena tidak menggambarkan posisi kas yang sebenarnya.

Selain itu berdasarkan Nota Kesepakatan Asersi Final (NKF) Usulan Jurnal Koreksi antara Kementerian Pertanian, BPK RI, dan Kementerian Keuangan, BRMP Sulawesi Utara melakukan reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran TUP ke akun Aset Lainnya. Proses rekasifikasi berupa pergeseran kas (hilang/bencana) di bendahara pengeluaran menjadi aset lainnya pada modul bendahara pada satker BBRMP Sulawesi Utara telah direkam pada jurnal penyesuaian pada aplikasi SAKTI. Atas transaksi tersebut di periode LK Audited 2025 hanya bersifat administratif dan tidak menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban ketekoran kas di BBRMP Sulawesi Utara untuk selanjutnya ditetapkan menjadi TP/TGR oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK-RI setelah diperoleh SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) untuk selanjutnya BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Piutang baru diakui ketika BPK mengeluarkan SKP2K

e. Langkah perbaikan pengendalian intern

- Berkaitan dengan permasalahan di BRMP Sulawesi Utara, Sekretaris BRMP telah menerbitkan Surat hal Penertiban Pelaksanaan Anggaran yang meminta kepada seluruh satker lingkup BRMP:
- Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Keuangan lainnya harus memiliki sertifikat kompetensi yang diampu dan diseleksi faktor integritasnya.
- Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, secara bertahap pembayaran mulai menggunakan sistem non tunai (Cashless).
- Bendahara Pengeluaran yang memegang Kartu Debet Virtual (ATM), saat pengambilannya harus mendapatkan persetujuan otorisasi KPA//PPK. Diupload.

- Secara rutin atau sewaktu-waktu melaksanakan Cash Opname dan Stock Opname.
- Memastikan Saldo Neraca Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2026 Nol (Rp0), supaya tidak terjadi temuan berulang.
- Melakukan rekonsiliasi kas dan pemeriksaan kas secara berkala dan insidental. Dilakukan cash dan stock opname setiap bulan.
- Monitoring setiap periode pertanggungjawaban terhadap posisi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran serta memperbaiki tata kelola administrasi keuangan yakni melakukan penertiban administrasi pertanggungjawaban belanja, pengarsipan dokumen keuangan, dan melakukan validasi dokumen sebelum pengajuan pembayaran.
- Melakukan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Anggaran seperti penyusunan mitigasi risiko dalam pengelolaan UP/TUP, pengendalian internal atas pengeluaran kas, dan pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran.
- Peningkatan komitmen pimpinan satker BRMP Sulawesi Utara untuk secara aktif melakukan pengawasan, monitoring terhadap tindak lanjut penyelesaian kasus, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan anggaran.

F.9. KELEBIHAN PEMBAYARAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

Saldo piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional pada satker Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.993.501.888,00. Dan Saldo per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp394.284.000,00; terdapat penurunan saldo senilai Rp1.599.217.888 atau 80,22% apabila dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2024. Rincian Piutang kelebihan Tunjangan Fungsional dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Transaksi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional
Per 31 Desember 2025

DATA PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		PER 31 DESEMBER 2025
	TAMBAH TA.2025 (JANUARI - DESEMBER 2025)	KURANG (JANUARI - DESEMBER 2025)	
1.993.501.888	14.970.000	1.614.187.888	394.284.000

Penjelasan antara lain:

1. Data Per 31 Desember 2024 senilai Rp1.993.501.888,00
2. Terdapat Mutasi Tambah TA 2025 periode Bulan Januari – Desember 2025 senilai Rp14.970.000,00 terdapat pada satker BRMP Sulut Senilai Rp500.000,00; dan BRMP Sulawesi Utara senilai Rp14.470.000,00.
3. Mutasi Kurang Senilai Rp1.614.187.888,00 merupakan setoran pembayaran baik cicilan maupun pelunasan.

Progres Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pegawai Eks Litbangjirap yang Tetap di Kementan Per 31 Desember 2025 disajikan dalam lampiran.

F.10. CAPAIAN OUTPUT

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-147/PB/2025 tanggal 4 Juli 2025, Kementerian/Lembaga agar memastikan seluruh satker telah merekam dan mengungkapkan capaian output per fungsi dalam CaLK. Capaian Output Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian TA 2025 (data MyIntress tanggal 24 Februari 2026) terealisasi sebesar 100% kecuali pada 3 output yaitu: Sarana Laboratorium Hortikultura Modern, Sarana Laboratorium Perkebunan Modern, dan Layanan Manajemen SDM. Realisasi capaian output per program:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas capaian output terealisasi 100%;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdapat 2 output yang tidak terealisasi 100% yaitu: Sarana Laboratorium Hortikultura Modern, Sarana Laboratorium Perkebunan Modern. Kedua output ini menggunakan anggaran yang bersumber dana dari PNBPN yang baru. mendapatkan persetujuan izin penggunaan dan buka blokir pada akhir triwulan III, sehingga berpengaruh pada keterlambatan proses pemenuhan setoran PNBPN dan pengadaan sarana laboratorium (waktu pengadaan terbatas);
3. Program Dukungan Manajemen, terdapat satu output yang tidak terealisasi 100% karena adanya anggaran blokir yang merupakan blokir efisiensi.

Adapun rincian laporan kinerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Semester 2 Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025									
Kementerian/ Lembaga			Kementerian Pertanian						
Unit Organisasi			Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian						
Fungsi			Ekonomi						
Sub Fungsi			Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan						
Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
1	2	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
3		4	5,00	6	7	8	9	10	
HA	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	47.015.422.000	46.360.653.426	98,61					
HA.7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	47.015.422.000	46.360.653.426	98,61					
HA.7912.RAG.101	Benih Sumber Tanaman Pangan	4.834.580.000	4.809.559.652	99,48	234	240	Unit		102,6
HA.7912.RAG.102	Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi	32.163.640.000	31.789.131.678	98,84	1.967	1991	Unit		101,2
HA.7912.RAG.103	Benih Sumber Tanaman Hortikultura	2.604.402.000	2.602.933.964	99,94	52	52	Unit		100,0
HA.7912.RAG.104	Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi	7.412.800.000	7.159.028.132	96,58	148	148	Unit		100,0
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	164.570.254.000	147.775.827.448	89,79					
EC.7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	164.570.254.000	147.775.827.448	89,79					
EC.7911.AEF.109	Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan	3.561.066.000	3.331.187.783	93,54	7669	8397	Orang		109,5
EC.7911.AEF.110	Hasil Standardisasi Instrumen Perkebunan yang disebarlu	361.260.000	359.344.985	99,47	903	903	Orang		100,0
EC.7911.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang didampingi	673.823.000	659.659.137	97,90	14	18	Lembaga		128,6
EC.7911.BJA.101	Laporan Hasil Uji Instrumen Tanaman Pangan	3.049.281.000	3.045.274.521	99,87	146	201	Produk		137,7
EC.7911.BJA.102	Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	3.505.571.000	3.407.741.249	97,21	455	455	Produk		100,0
EC.7911.BJA.103	Laporan Hasil Uji Instrumen Perkebunan	1.100.550.000	1.095.583.724	99,55	1308	1308	Produk		100,0
EC.7911.BJA.104	Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan H	3.036.332.000	3.033.585.562	99,91	2259	3293	Produk		145,8
EC.7911.BJA.105	Laporan Hasil Uji Instrumen Bioteknologi dan Sumber Da	3.726.536.000	3.713.987.544	99,66	15	15	Produk		100,0
EC.7911.BJA.106	Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen Pertanian	1.109.798.000	826.382.240	74,46	200	243	Produk		121,5
EC.7911.BJA.107	Laporan Hasil Uji Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	6.754.376.000	6.633.108.808	98,20	23771	23771	Produk		100,0
EC.7911.BJA.108	Laporan Hasil Uji Instrumen Alat dan Mesin Pertanian	2.512.485.000	1.973.787.133	78,56	125	125	Produk		100,0
EC.7911.BJA.109	Laporan Hasil Uji Instrumen Pertanian	715.880.000	690.063.392	96,39	582	582	Produk		100,0
EC.7911.CAG.101	Sarana Laboratorium Tanaman Pangan Modern	2.172.979.000	2.156.448.300	99,24	88	105	Unit		119,3
EC.7911.CAG.102	Sarana Laboratorium Hortikultura Modern	224.738.000	180.686.626	80,40	12	11	Unit		91,7
EC.7911.CAG.103	Sarana Laboratorium Perkebunan Modern	635.243.000	620.036.155	97,61	30	29	Unit		96,7
EC.7911.CAG.104	Sarana Laboratorium SDLP Modern	50.223.000	50.163.301	99,88	9	9	Unit		100,0
EC.7911.CAG.105	Sarana Laboratorium Pertanian Modern	1.380.113.000	1.308.532.801	94,81	106	106	Unit		100,0
EC.7911.QDB.101	Integrated Corporation of Agriculture Resources Empow	130.000.000.000	114.690.254.187	88,22	10	10	Lembaga		100,0
WA	Program Dukungan Manajemen	735.488.635.000	700.164.670.265	95,20					
WA.6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pe	735.488.635.000	700.164.670.265	95,20					
WA.6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian	72.215.648.000	49.331.658.666	68,31	63	63	Kegiatan		100,0
WA.6918.AEC.502	Layanan Kerjasama	17.933.549.000	17.793.187.411	99,22	2	2	Kegiatan		100,0
WA.6918.EBA.956	Layanan BMN	1.110.000.000	1.020.386.720	91,93	64	64	Layanan		100,0
WA.6918.EBA.957	Layanan Hukum	321.488.000	307.192.911	95,55	1	1	Layanan		100,0
WA.6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	2.129.053.000	1.537.913.128	72,23	64	64	Layanan		100,0
WA.6918.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	310.500.000	290.380.445	93,52	1	1	Layanan		100,0
WA.6918.EBA.962	Layanan Umum	18.382.650.000	15.553.760.356	84,61	64	64	Layanan		100,0
WA.6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	998.360.000	674.732.239	67,58	2	2	Layanan		100,0
WA.6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	605.980.634.000	600.383.696.342	99,08	64	64	Layanan		100,0
WA.6918.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.900.000.000	2.353.730.631	60,35	3501	2908	Orang		83,1
WA.6918.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	1.300.000.000	1.035.188.889	79,63	26	26	Orang		100,0
WA.6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4.427.250.000	4.357.101.943	98,42	5	5	Dokumen		100,0
WA.6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.325.443.000	3.395.183.008	78,49	74	74	Dokumen		100,0
WA.6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.550.000.000	1.544.560.955	99,65	3	3	Dokumen		100,0
WA.6918.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	429.060.000	414.721.097	96,66	1	1	Layanan		100,0
WA.6918.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	175.000.000	171.275.524	97,87	1	1	Layanan		100,0
	Subtotal	947.074.311.000	894.301.151.139	94,43					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)								
	Total	947.074.311.000	894.301.151.139	94,43					

F.11. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN 02 dari 8 PN yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing PN adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 02**, yaitu *Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*. Program Prioritas 10 - Swasembada Pangan, Kegiatan Prioritas 16 - Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif, Proyek Prioritas 03 - Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan, dan

rincian output *Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment* (018.EC.7911.QDB.101) yang tersebar di 10 satuan kerja dengan target output 10 Lembaga dengan pagu mencapai Rp130.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp114.690.254.187,00 dengan rincian sebagaimana terlampir.

No	Satuan Kerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
1	BBPPMP	57.710.208.000	49.672.468.538	86,07
2	BPMP Kalimantan Barat	8.480.597.000	8.442.633.002	99,55
3	BPMP Sulawesi Selatan	6.922.613.000	6.804.204.040	98,29
4	BPMP Jawa Timur	7.129.774.000	6.962.323.373	97,65
5	BPMP Sulawesi Tenggara	7.457.749.000	7.230.006.739	96,95
6	BPMP Jawa Barat	9.326.884.000	8.991.375.674	96,40
7	BPMP Lampung	6.882.929.000	6.611.738.081	96,06
8	BPMP Nusa Tenggara Barat	11.073.395.000	9.930.003.971	89,67
9	BPMP Jawa Tengah	4.875.638.000	3.763.252.366	77,18
10	BPMP Sulawesi Tenggara	10.140.213.000	6.282.249.403	61,95
Total		130.000.000.000	114.690.254.187	88,22

2. **Prioritas Nasional 02**, yaitu *Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru*. Program Prioritas 10 - Swasembada Pangan, Kegiatan Prioritas 11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati, Proyek Prioritas 01 - Input dan Pendukung Pengembangan Lokal dan Nabati dan rincian output 1) Benih Sumber Tanaman Pangan (018.HA.7912.RAG.101) yang tersebar di tiga satuan kerja dengan target output 234 Unit (Ton) dengan pagu mencapai Rp4.834.580.000,00, dan realisasi sebesar Rp4.809.559.652,00, 2) Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi (018.HA.7912.RAG.102) yang tersebar di 22 satuan kerja dengan target output 1.967 Unit (Ton) dengan pagu mencapai Rp32.163.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp31.789.131.678,00, 3) Benih Sumber Tanaman Hortikultura (018.HA.7912.RAG.103) yang tersebar pada satu satuan kerja dengan target output 52 Unit (Ton) dengan pagu mencapai Rp2.604.402.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.602.933.964,00, dan 4) Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi (018.HA.7912.RAG.103) yang tersebar pada tiga satuan kerja dengan target output 148 Unit (Ton) dengan pagu mencapai Rp7.412.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.159.028.132,00 dengan rincian sebagaimana terlampir.

Kode Satke	Nama Satker	Anggaran	Realisasi	%
Benih Sumber Tanaman Pangan		4.834.580.000	4.809.559.652	99,48
411993	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG	177.500.000	177.500.000	100,00
238080	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SEREALIA	350.720.000	339.065.101	96,68
237238	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN P	4.306.360.000	4.292.994.551	99,69
Benih Sumber Tanaman Pangan Spesifik Lokasi		32.163.640.000	31.789.131.678	98,84
450831	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN	896.300.000	1.706.451.573	190,39
567563	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT	1.707.860.000	1.233.796.290	72,24
634001	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI	1.242.080.000	1.542.961.053	124,22
634036	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN	1.552.600.000	2.122.256.325	136,69
567318	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	2.324.980.000	2.310.813.789	99,39
567495	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA SELATAN	2.328.900.000	1.551.286.500	66,61
567428	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA	1.552.600.000	759.442.165	48,91
567783	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR	776.300.000	1.533.728.730	197,57
567296	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT	2.346.435.000	2.346.007.700	99,98
567364	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR	2.324.980.000	2.317.739.990	99,69
648673	BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTA	1.026.300.000	1.025.468.572	99,92
567517	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN LAMPUNG	1.863.120.000	1.859.298.194	99,79
567627	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TIMUR	931.560.000	895.647.797	96,14
634015	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN	1.707.860.000	1.707.716.000	99,99
567570	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMATAN TENGAH	1.552.600.000	452.544.100	29,15
633996	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	465.780.000	923.270.625	198,22
634040	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARA	2.169.720.000	2.122.445.765	97,82
567392	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN ACEH	1.552.600.000	1.538.841.413	99,11
567830	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA	1.567.425.000	1.566.812.127	99,96
450840	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN BANGKA B	310.520.000	309.938.000	99,81
500957	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI BARAT	876.300.000	876.080.000	99,97
567460	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN RIAU	1.086.820.000	1.086.584.970	99,98
Benih Sumber Tanaman Hortikultura		2.604.402.000	2.602.933.964	99,94
237217	BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN	2.604.402.000	2.602.933.964	99,94
Benih Sumber Tanaman Hortikultura Spesifik Lokasi		7.412.800.000	7.159.028.132	96,58
634040	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN NUSA TENGGARA BARA	5.009.242.000	4.835.972.280	96,54
567318	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	2.005.658.000	1.925.633.902	96,01
567364	BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR	397.900.000	397.421.950	99,88
TOTAL		47.015.422.000	46.360.653.426	98,61

F.12. PENJELASAN SELISIH BELANJA MODAL DENGAN PENAMBAHAN ASET

Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dalam praktiknya, seringkali muncul perbedaan angka antara realisasi belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan nilai perolehan aset tetap pada Neraca. Perbedaan ini wajar terjadi karena adanya perbedaan basis pencatatan dan kriteria kapitalisasi. Namun, untuk menjaga integritas data dan opini audit, diperlukan koordinasi rekonsiliasi guna mengidentifikasi penyebab selisih tersebut secara rinci dan memastikan bahwa seluruh aset telah dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Adanya selisih antara belanja modal (LRA) dengan penambahan aset tetap (Neraca) jika tidak dijelaskan secara memadai dapat menimbulkan ketidakpastian nilai aset daerah/negara. Oleh karena itu, penjelasan selisih (rekonsiliasi) yang memadai sebagai pendukung laporan keuangan harus dilakukan guna memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan memitigasi temuan pemeriksa terkait ketidaksesuaian data antar laporan (*inter-report consistency*), sehingga dapat mendukung upaya pencapaian atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan penelusuran dokumen sumber, ditemukan selisih Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan belanja aset tetap yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penjelasan atas selisih Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut

NO	ODE SATKE	KODE AKUN	LRA	ASET VS PEMBELIAN	SELISIH	KETERANGAN
1	238080	521811	-	125.541.000	-125.541.000	Berupa Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya) (3080156999)
2	411987	532111	362.659.000	342.722.921	19.936.079	Barang Ekstrakomptibel berupa Alat Penarik Lainnya, Radar Lainnya, Unit Power Supply, Kabel, Amplifier, PH Meter (Alat Ukur Universal), Peralatan Pemancar Lainnya, Alat Bantu Lainnya, Alat Bantu Lainnya dan Stand
3	567563	532111	1.579.977.570	1.575.505.410	4.472.160	Barang Ekstrakomptibel berupa Peralatan dan Mesin berupa Tripod Camera (3060102045), Alat Laboratorium Uji Perangkat Lainnya (3080810999) dan External/ Portable Hardisk (3100203017)
4	634022	526112	-	38.880.000	-38.880.000	Berupa Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang (3020103008)
5	634040	526112	-	649.999.999	-649.999.999	Berupa Alat Panen Lainnya (3040103999)
	634040	532111	2.549.668.376	2.480.848.376	68.820.000	RPATA terkait Pengadaan Televisi
6	648673	532111	8.604.310.816	2.433.943.000	6.170.367.816	RPATA Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Sarana Laboratorium

2) Penjelasan atas selisih Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut

KODE SATKER	LRA	Aset VS Pembelian	SELISIH	KETERANGAN
411987	319.856.000	267.633.735	52.222.265	Barang Ekstrakomptibel berupa Gedung Kantor Lainnya sebanyak 4 unit (40101011999)
648673	498.561.772		498.561.772	Selisih tersebut berasal dari nilai Rp475.829.772,00 merupakan Aset Tetap Renovasi (ATR) yg tidak masuk pada klasifikasi gedung bangunan dan senilai Rp22.732.000 merupakan barang ekstrakomptibel berupa bangunan gedung kantor lainnya (40101011999)

F.13. PENJELASAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Sehubungan dengan hasil evaluasi laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, teridentifikasi bahwa pada lingkup BRMP terdapat 6 satker yang masih mencatatkan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang pembangunannya terhenti namun tetap dipertahankan karena menunggu alokasi anggaran tahun berikutnya serta tidak bisa

dimasukkan ke dalam aset lain-lain karena secara definisi dan standar akuntansi, KDP adalah **bagian dari aset tetap** yang sedang dalam proses pembangunan, bukan aset yang tidak terpakai atau tidak jelas peruntukannya.

Secara rinci perkembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) lingkup BRMP sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi	Nilai Perencanaan (Rp)	Nomor Surat Usul Penghapusan KDP	Status
1	(237306) BRMP TROA				65.718.000				
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	159	11/03/2020	65.718.000	BRMP Troa	65.718.000	Permohonan SK Penghapusan KDP Nomor B-17/PL.230/H/01/2026 tgl 5 Januari 2026 ke Setjen Kementan	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 189/Kpts/PL.320/A/02/2026 tanggal 23 Februari 2026 (Akan dikeluarkan dari Pencatatan SAKTI SM I TA 2026)
2	(412022) BRMP TANAMAN INDUSTRI				631.279.250				
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	18	15/05/2020	317.325.250	BRMP TRI Sukabumi	317.325.250	Usulan Penghapusan BMN berupa KDP dari Setjen Kementan ke KPKNL Kemenkeu Nomor B-4937/PL.320/A/10/2025 tgl 27 Oktober 2025	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 325/Kpts/PL.320/A/04/2026 tanggal 20 April 2026 (Akan dikeluarkan dari Pencatatan SAKTI SM I TA 2026)
	701010 1004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	4	17/03/2020	47.781.000	KP Cahaya Negeri Lampung	47.781.000		
	701010 1004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	5	17/03/2020	47.781.000	KP Cahaya Negeri Lampung	47.781.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	5	21/02/2020	33.411.000	KP Cahaya Negeri Lampung	33.411.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	6	21/02/2020	33.411.000	KP Cahaya Negeri Lampung	33.411.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	7	03/03/2020	32.751.000	KP Cahaya Negeri Lampung	32.751.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	8	17/03/2020	53.375.000	KP Cahaya Negeri Lampung	53.375.000		
	701010 1004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	1	27/03/2020	65.444.000	KP Cahaya Negeri Lampung	65.444.000		
3	(648669) BRMP PASCAPANEN				2.905.000				
	701010 1002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	27/06/2023	930.000	BRMP Pascapanen	930.000	Usulan dari Satker Permohonan Persetujuan Penghapusan KDP Nomor B3154/PL.320/H.9/11/2025 tgl 28 November 2025	Persetujuan Penghapusan telah disampaikan oleh Setjen ke KPKNL Bogor Nomor B-991/PL.320/A/03/2026 tanggal 9 Maret 2026. Saat ini menunggu surat balasan dari KPKNL Bogor ke Setjen, agar satker dapat membuat permohonan penerbitan penghapusan KDP
	701010 1002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	2	27/06/2023	880.000	BRMP Pascapanen	880.000		
	701010 1002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	3	27/06/2023	1.095.000	BRMP Pascapanen	1.095.000		
4	(648720) BRMP RUMINANSIA BESAR				138.947.868				
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	24	22/04/2020	19.145.621	Kantor BRMP Ruminansia Besar, Jl. Pahlawan No.02 Kec. Grati - Kab. Pasuruan, Jawa Timur	19.145.621	Permohonan Penetapan Keputusan Penghapusan BMN (KDP) Nomor B-2080/PL.320/H/12/2025 tgl 19 Desember 2025 ke Setjen Kementan	Telah terbit SK Penghapusan Nomor 256/Kpts/PL.320/A/03/2026 tanggal 10 Maret 2026 (Akan dikeluarkan dari Pencatatan SAKTI SM I TA 2026)
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	25	05/02/2021	101.663.650	Kantor BRMP Ruminansia Besar, Jl. Pahlawan No.02 Kec. Grati - Kab. Pasuruan, Jawa Timur	101.663.650		

Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tgl Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi	Nilai Perencanaan (Rp)	Nomor Surat Usul Penghapusan KDP	Status
	701010 1004	Jalan dan Jembatan Dalam Pengerjaan	2	27/01/2021	18.138.597	Kantor BRMP Ruminansia Besar, Jl. Pahlawan No.02 Kec. Grati - Kab. Pasuruan, Jawa Timur	18.138.597		
5	(567702) BRMP SULAWESI TENGGARA				1.316.454.414				
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	21	05/02/2013	115.702.250	BRMP SULTRA	115.702.250	Permohonan Persetujuan Penghapusan KDP Nomor B-194/PL.320/H/02/2026 tgl 02 Februari 2026 ke Setjen Kementan	Persetujuan Penghapusan telah disampaikan oleh Setjen Nomor B-1799/PL.320/A/04/2026 tgl 17 April 2026 ke KPKNL Kendari. Satker sedang menyiapkan permohonan penerbitan penghapusan KDP melalui SIMAN
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	43	17/11/2020	100.899.000	BRMP SULTRA	100.899.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	44	23/11/2020	42.955.000	BRMP SULTRA	42.955.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	46	31/01/2021	83.345.900	BRMP SULTRA	83.345.900		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	47	31/01/2021	67.650.000	BRMP SULTRA	67.650.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	49	31/01/2021	52.240.000	BRMP SULTRA	52.240.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	50	31/01/2021	441.605.500	BRMP SULTRA	441.605.500		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	54	31/01/2021	135.682.000	BRMP SULTRA	135.682.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	55	02/01/2022	12.049.000	BRMP SULTRA	12.049.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	56	02/01/2022	62.000.000	BRMP SULTRA	62.000.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	57	02/01/2022	40.480.000	KP WAWOTOBI	40.480.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	58	02/01/2022	40.500.000	KP ONEMBUTE	40.500.000		
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	59	29/08/2022	21.845.764	BRMP SULTRA	21.845.764		
	701010 1006	Irigasi Dalam Pengerjaan	1	31/01/2021	99.500.000	BRMP SULTRA	99.500.000		
6	(500957) BRMP SULAWESI BARAT				72.000.000				
	701010 1003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	18/04/2022	72.000.000	BRMP Sulbar	72.000.000	-	Dilanjutkan
	JUMLAH PER 31 DESEMBER 2025				2.227.304.532				

Pada tabel di atas, posisi pelaporan sd 31 Desember 2025, dari 6 satker yang masih mencatat KDP, 5 satker diantaranya telah melakukan usulan penghapusan, 3 satker akan mengeluarkan dari pencatatan SAKTI karena telah keluar SK Penghapusan yaitu satker BRMP Troa (237306), BRMP Tan. Industri (412022) dan BRMP Rumbes (648720). Sedangkan 2 satker telah melakukan usulan penerbitan SK penghapusan yaitu satker BRMP Pascapanen (648669) dan satker BRMP sultra (567702). Sehingga sd periode pelaporan TA 2025 (Audited) Mei 2026, 1 satker yang masih berstatus melanjutkan proses KDP yaitu satker BRMP Sulbar (500957) senilai 72.000.000,00.

Berikut penjelasan rinci mengapa KDP tidak diklasifikasikan sebagai aset lain-lain:

a) KDP Merupakan Aset Tetap (Bukan Aset Lainnya)

Berdasarkan kebijakan akuntansi, KDP diklasifikasikan sebagai salah satu jenis aset tetap (Konstruksi Dalam Pengerjaan) yang tidak mengalami penyusutan sampai konstruksi tersebut selesai. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak masuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, atau aset tetap. Karena KDP adalah aset tetap, ia tidak masuk ke kelompok "lain-lain".

- b) Tujuan Pembangunan Jelas
KDP dicatat karena ada proyek fisik (seperti gedung, jalan, atau mesin) yang belum selesai, tetapi sudah menyerap biaya. Setelah selesai, KDP akan langsung dipindahkan ke akun aset tetap definitif (misalnya Gedung dan Bangunan), bukan ke akun aset lain-lain.
- c) Karakteristik Beda
 - KDP: Aset fisik yang masih dalam proses pengerjaan dan akan digunakan untuk operasional.
 - Aset Lain-lain/Lainnya: Aset yang tidak lancar dan tidak memenuhi kriteria aset tetap, seperti kas yang dibatasi penggunaannya atau aset tak berwujud tertentu.

F.14. KONSEP HASIL PEMERIKSAAN (KHP) BPK RI TERKAIT LAHAN/TANAH

1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Biogen

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) NUP 5, nilai perolehan Rp163.036.673.000 (seratus enam puluh tiga miliar tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan luas 79.050 m² berdasarkan sertifikat hak pakai (SHP) nomor 7/Cipayung Jaya terkena program strategis nasional berupa pembangunan jalan tol Depok-Antasari seluas 17.433 m², dengan nilai penggantian wajar untuk tanah senilai Rp53.379.846.000 (lima puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan penggantian wajar untuk bangunan senilai Rp625.765.511 (enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah). Proses penggantian tanah masih berjalan, BBPM Biogen telah bersurat kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari berdasarkan surat nomor S-8925/PL.020/H.11/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 hal Tindaklanjut Musyawarah Bentuk dan Penyampaian Nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari. Pada tanggal 30 Juni 2025, telah diajukan permohonan penghapusan BMN berupa tanah dan bangunan berdasarkan surat Nomor: B-4373/PL.320/H.6/06/2025 ke BRMP, yaitu tanah seluas 17.433 m² senilai Rp35.954.690.850 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan Riwayat tiket pada aplikasi SIMAN diketahui bahwa per tanggal 19 Desember 2025, proses penghapusan sudah masuk dalam tahap Penetapan di Koordinator PKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Adapun Surat Persetujuan Penghapusan karena Perundang-undangan Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Pertanian Nomor S-787/MK/KN/2025 telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan secara sistem pada tanggal 6 Februari 2026. Pada tanggal 18 Februari 2026 telah terbit Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 182/Kpts./PL.320/A/02/2026 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada BRMP Biogen. Salinan/fotocopy Surat Keputusan

Penghapusan tersebut telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Jalan Tol Depok-Antasari, sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengajuan Surat Perintah Pembayaran Ganti Kerugian (SPP-GK) yang diajukan oleh PPK Pengadaan tanah ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pada tanggal 4 Februari 2026 telah dilakukan penunjukkan rencana lokasi tanah pengganti yang disampaikan melalui surat nomor: S-1115/PL.320/H.6/02/2026 kepada PPK Pengadaan Jalan Tol Depok-Antasari.

Sedangkan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (2010104001) NUP 4 dengan nilai perolehan Rp5.659.150.000,00 saat ini masih dalam proses pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Luasan aset tersebut pada neraca telah disesuaikan (berkurang) sebagai tindak lanjut atas alih status penggunaan sebagian lahan kepada Kementerian Agama, sesuai dengan Berita Acara Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara Nomor 678/PL.330/A/03/2023 tanggal 1 Maret 2023. Berdasarkan koordinasi terakhir pada 16 April 2026, pihak kuasa melaporkan bahwa saat ini progres berada pada tahap penyusunan berkas kelengkapan sebelum diajukan secara resmi ke Kantor Pertanahan Kota Depok.

2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang

Terdapat koreksi luasan aset tanah untuk aset tanah NUP 10 dengan perolehan sebesar Rp75.972.150.000,00 berlokasi di Kec. Ngale Kab. Ngawi yang diukur ulang oleh BPN dikarenakan adanya pembangunan jalan toll pada BRMP Aneka Kacang. Untuk proses penggantian sesuai dengan BAST beserta RAB dari PUPR senilai Rp5.378.484.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai dari BA PUPR (Rp)	Aset yang Dapat Dicatat (Rp)	Sarana Fasilitas Umum (Rp)
1	Frontage Road	338.749.168		338.749.168
2	Underpass	1.104.028.952		1.104.028.952
3	Saluran Drainase Lewat Bawah Toll	507.998.414		507.998.414
4	Pagar	612.783.201	612.783.201	
5	Saluran Drainase Luar Kanan Kiri Toll	342.003.838		342.003.838
6	Saluran Drainase Pinggir Jalan Raya KP Ngale	455.652.946	455.652.946	
7	Perkerasan Blok Beton dan Kerb	774.292.619	774.292.619	
8	Pekerjaan Embung	1.034.734.987	1.034.734.987	
9	Pekerjaan Lain-Lain (Diesel, Panel, Pengkabelan)	208.240.160	208.240.160	
Jumlah		5.378.484.285	3.085.703.913	2.292.780.372

Berdasarkan tabel diatas masih terdapat kekurangan penggantian sebesar Rp. 2.292.780.372

F.15. PENGELOLAAN PNBP

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pada Pasal 29, Ayat (3) yang menyatakan bahwa Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian pada Pasal 8, yang menyatakan bahwa Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian wajib disetor ke Kas Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada Pasal 29, Ayat (7), yang menyatakan bahwa Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang paling sedikit memuat:
 - a) Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b) Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c) Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d) Hak dan kewajiban para pihak;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBP.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
Pasal 1, Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis PNBP yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian meliputi penerimaan dari:
 - a) jasa layanan pengujian dan analisis serta sertifikasi;
 - b) jasa pengolahan data dan reproduksi peta;
 - c) jasa standardisasi dan diseminasi teknologi;
 - d) jasa pelatihan sumber daya manusia pertanian; dan
 - e) perolehan dari hasil pertanian;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 yang telah diubah dengan PMK Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementan.

b. Proses Bisnis Penetapan Harga Produk Perolehan dari Hasil Pertanian (PPHP) pada satker BRMP sebagai berikut:

- 1) Usulan Harga dari Kepala Satker lingkup BRMP secara berjenjang kepada Pimpinan Unit Eselon I (Kepala Badan BRMP) yang didasarkan pada harga pasar (pembandingan minimal 2 pasar terdekat/dokumen Pemda) dan/atau kualitas produk. Jika produk dihasilkan secara eksklusif oleh Satker, usulan didasarkan pada biaya produksi dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- 2) Pemeriksaan oleh Unit Eselon I (Kepala Badan BRMP) atas usulan satker BRMP untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan data, yang dituangkan pada Lembar Verifikasi. Apabila sudah diverifikasi, maka usulan harga PPHP tersebut diteruskan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN;
- 3) Verifikasi dan perolehan rekomendasi Sekretariat Jenderal berupa Surat Rekomendasi Persetujuan atau Surat Penolakan yang diterbitkan paling lambat 14 hari sejak usulan diterima yang akan disampaikan kepada Kepala Satker pengusul dengan tembusan kepada Kepala Badan BRMP;
- 4) Penetapan SK Tarif oleh Kepala Satker atas harga PPHP melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja yang minimal berisi jenis, satuan, dan besaran harga produk dan salinan keputusan yang telah ditetapkan tersebut wajib disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan dan BMN serta Kepala Badan BRMP;
- 5) Penetapan Dokumen Penjualan (Kontrak Kerja Sama) dalam rangka Pelaksanaan Tarif PPHP yang telah ditetapkan dalam SK yang isinya minimal memuat identitas para pihak, maksud dan tujuan, volume dan satuan, nilai nominal (sesuai harga yang ditetapkan), serta jangka waktu, ditandatangani oleh Kepala Satker. Namun, untuk nilai kontrak di bawah Rp200.000.000,00, penandatanganan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

c. Perubahan Nomenklatur

Sehubungan dengan adanya transformasi organisasi semula Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), maka izin penggunaan PNBP harus diusulkan juga perubahannya. Proses perubahannya memerlukan waktu yang cukup panjang, dimana Ijin penggunaan PNBP pada Satker lingkup BRMP baru keluar pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan Nomor S-225/MK/AG/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian. Nilai besarnya sama dengan izin pada BSIP yaitu 73%.

d. Realisasi dan Kendala PNBP

Realisasi penyeteroran PNBP sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp42.932.206.730,00 dari target sebesar Rp29.722.246.000,00 atau sebesar 144,44%.

Menindaklanjuti keluarnya besaran izin penggunaan PNBP pada tanggal 31 Agustus 2025, maka pada Bulan September Satker lingkup BRMP melakukan revisi target dan pagu penggunaan PNBP.

Total target secara keseluruhan untuk PNBPN Umum tetap tidak berubah yaitu sebesar Rp934.858.000,00 sedangkan PNBPN Fungsional semula senilai Rp19.283.755.000,00 setelah revisi menjadi sebesar Rp28.787.388.000,00 sehingga total target umum dan target fungsional menjadi Rp29.722.246.000,00.

Dengan adanya revisi target tersebut, maka Pagu penggunaan PNBPN di DIPA senilai Rp21.102.062.000,00 realisasi penggunaannya Rp19.639.488.223,00 (93,07%). Hal tersebut cukup besar, karena blokir anggaran dan revisi pagu, baru disetujui pada akhir Bulan September 2026. Dengan demikian Satker lingkup BRMP baru melakukan realisasi sekitar Bulan Oktober (Triwulan IV).

Dengan adanya blokir anggaran dan ijin penggunaan PNBPN baru keluar di TW IV TA 2025, maka Satker kesulitan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

e. Langkah Perbaikan Pengendalian Intern Berkaitan dengan Permasalahan PNBPN

- 1) Meningkatkan pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran (atasan langsung Bendahara Penerimaan) Satker Lingkup BRMP dalam pengelolaan PNBPN yang menjadi kewenangannya serta belum memahami ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan fungsi penatausahaan penerimaan dan pemanfaatan aset yang berada dibawah kewenangannya;
- 2) Meningkatkan kepatuhan Bendahara Penerimaan terhadap ketentuan pengelolaan kas, sehingga melakukan pencatatan secara tertib, dan lengkap, serta melakukan rekonsiliasi dengan Petugas Pencatat Penerimaan di Lapangan dalam rangka penatausahaan PNBPN yang menjadi tanggungjawab jabatannya. Dengan demikian, Bendahara Penerimaan mampu menyusun Buku Kas Umum (BKU) dan buku pembantu lainnya secara lengkap, tertib, dan tepat waktu guna memastikan seluruh transaksi terekam secara kronologis sesuai ketentuan.
- 3) Menugaskan Petugas Pencatat Penerimaan di Lapangan (Pengeloa Mess dan Aula, Petugas Laboratorium, Petugas UPBS) untuk menjalankan kewajibannya dengan menatausahakan PNBPN secara tertib dengan menyetorkan keseluruhan dan tepat waktu PNBPN yang diterima;
- 4) Meningkatkan pembinaan serta pengawasan melekat oleh atasan langsung (KPA/PPK) terhadap kinerja Bendahara Penerimaan guna meminimalisir risiko kesalahan administratif.
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM dengan melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan intensif terkait penatausahaan PNBPN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 6) Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola APBN, maka seluruh Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan harus memiliki sertifikat kompetensi jabatan yang diampu dan diseleksi faktor integritasnya.

F.16. PROGRAM ICARE KEMENTERIAN PERTANIAN

a. Pendahuluan

ICARE adalah Program Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Bank Dunia yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian secara berkelanjutan dan inklusif di lokasi-lokasi terpilih. Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian yang berkelanjutan mengandung arti dukungan terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Inklusivitas mengandung pengertian keterlibatan integratif petani (*smallholder*) dan usaha agribisnis berskala mikro, kecil dan menengah dalam pengelolaan rantai nilai komoditas pertanian, serta menjamin keterlibatan petani wanita dan petani muda dalam implementasi program ICARE.

ICARE merupakan Program yang diusulkan sebagai implementasi prioritas pembangunan sektor pertanian yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian. RPJMN 2020-2024 menyebutkan bahwa korporasi petani dan nelayan merupakan salah satu prioritas strategis (*major proyek*) yang diamanatkan kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, badan usaha (BUMN/Swasta), dan Perguruan Tinggi. Pada kurun waktu tahun 2020-2024 ditargetkan terbangun sebanyak 350 korporasi petani dan nelayan dengan target manfaat program meningkatnya pendapatan petani/nelayan rata-rata 5% per tahun (sesuai target *Sustainable Development Goals*) dan meningkatnya produktivitas komoditas rata-rata 5% per tahun. Secara khusus, Program ICARE juga dirancang untuk merespon amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa (i) petani perlu keluar dari *on farm* menuju *off farm* dengan memberikan nilai tambah melalui pengolahan produk pertanian, dan (ii) mendorong pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian (termasuk petani) untuk berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya dan membentuk korporasi.

Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw mengamanatkan sejumlah Program yang harus dilaksanakan Kementerian Pertanian. Sebagai contoh, terdapat Lima program yang harus dilaksanakan Kementerian Pertanian, yaitu:

- (1) Pembangunan pusat pembenihan dan pengembangan kawasan sentra produksi tanaman lada,
- (2) Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman jeruk yang menerapkan Teknologi Buah Berjenjang Sepanjang Tahun (BUJANGSETA),
- (3) Pengembangan budidaya padi rawa dan padi inbrida,
- (4) Pengembangan kawasan sentra produksi tanaman padi untuk menghasilkan beras premium dan
- (5) Pengembangan kawasan sentra produksi kelapa.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi, mendefinisikan Korporasi petani (KP) sebagai lembaga ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi, Badan Usaha Milik Petani, Perseroan Terbatas, Usaha Dagang dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki petani. Kementerian Pertanian juga telah menerbitkan Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pada pengembangan kawasan pertanian tersebut kegiatan pembangunan dilakukan mulai dari aspek hulu hingga hilir yang dikelola dalam satu manajemen kawasan berbasis Korporasi dan inovasi pertanian dengan melibatkan masyarakat petani, industri/swasta, pemerintah, dan akademisi. Selanjutnya, Program ICARE berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian program strategis pertanian yang difokuskan untuk:

- (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui gerakan nasional yang disertai pengembangan SDM pertanian. Kenaikan produksi dan produktivitas untuk komoditas utama minimal 7% dan kehilangan hasil harus ditekan maksimal 5%;
- (2) Menurunkan biaya usaha pertanian menjadi lebih efisien salah satunya dengan upaya pengembangan kawasan pertanian berbasis inovasi dan Korporasi;
- (3) Pengembangan dan implementasi mekanisasi pertanian, dan percepatan pemanfaatan teknologi pertanian;

Program ICARE juga menyasar modernisasi, digitalisasi, dan adopsi konsep pertanian modern dan digital tersebut di tingkat petani untuk menjadi salah satu pendekatan utama dalam transformasi sektor pertanian. Penguasaan dan penerapan teknologi modern telah menjadi prioritas dalam transformasi sektor pertanian Indonesia. Digitalisasi, otomatisasi, dan penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) diprediksi akan mampu memberikan lompatan efisiensi dan daya saing sektor pertanian. Sebagai contoh, aplikasi sensor memungkinkan pengumpulan data dari lahan pertanian secara akurat dan *real time* untuk berbagai parameter, seperti, suhu, kelembaban (tanah dan udara), CO₂, O₂, cahaya, level air, status hara dan bahkan kondisi pertanamannya; pemanfaatan aplikasi digital untuk penanganan kesehatan hewan, formulasi ransum pakan, serta penanganan reproduksi ternak; sistem *monitoring* gudang penyimpanan hasil pertanian berbasis *Internet of Things* (IoT) memungkinkan petani/pelaku usaha pertanian untuk memantau dengan mudah kondisi penyimpanan dan mutu hasil pertaniannya melalui perangkat *smartphone*. Data dan informasi yang dikumpulkan secara cepat melalui teknologi tersebut, selanjutnya dapat menjadi landasan yang akurat dan presisi dalam penyusunan kebijakan, keputusan, tindakan praktis yang diperlukan di lapangan untuk mengoptimalkan produktivitas dan/atau meningkatkan efisiensi. Modernisasi pertanian juga diharapkan mampu mendorong minat generasi muda untuk menjadi petani-petani milenial.

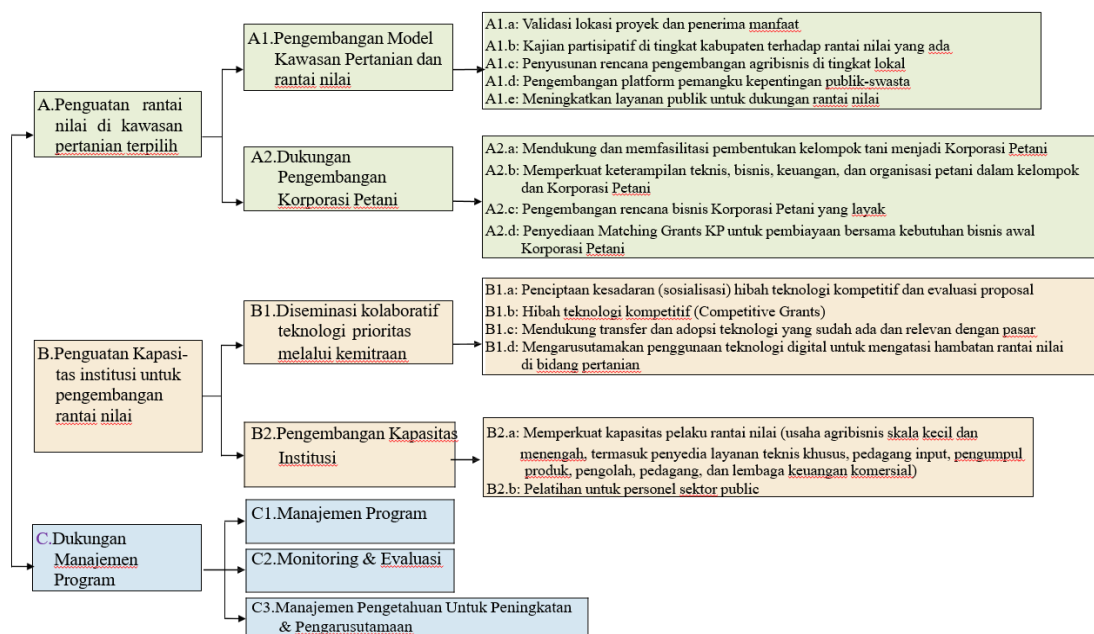
Program ICARE difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai tinggi untuk mengantisipasi jumlah impor yang terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan mendorong ekspor. Secara lengkap daftar lokasi dan komoditas pertanian yang diusulkan untuk tahap awal pembinaan Program ICARE ditampilkan dalam Tabel 1 berikut. Lokasi dan komoditas yang dibina dapat berubah seiring dengan progres pengembangan rencana bisnis kawasan di masing-masing Provinsi, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha, ketersediaan peluang pasar, kesesuaian agro-ekologi, kesiapan kapasitas petani, dan kebutuhan sistem usaha pertanian setempat (rotasi tanam, tanaman pendukung, dan seterusnya).

Tabel 1. Lokasi dan komoditas program

N o	Provinsi	Kabupaten	Komoditas
1	Lampung	Tanggamus, Lampung Selatan, Tulangbawang Barat, Lampung Utara, Mesuji	Kopi, ternak, kambing, padi
2	Jawa Barat	Garut	Kentang, ternak Domba
3	Jawa Tengah	Brebes	Pisang, Padi
4	Jawa Timur	Pasuruan	Jagung, Mangga
5	Kalimantan Barat	Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang	Jeruk, Padi
6	Sulawesi Selatan	Gowa, Soppeng, Enrekang, Barru	Kentang, Sapi Potong, Padi
7	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	Jagung, Ternak Ayam
8	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Kelapa, Jagung
9	Sulawesi Tenggara	Kolaka Timur	Kakao, Sapi Potong

- Kegiatan ICARE terdiri dari tiga komponen yaitu:
Komponen A: Penguatan Rantai Nilai di Kawasan Pertanian Terpilih,
Komponen B: Penguatan Kapasitas Institusi untuk Pengelolaan Rantai Nilai,
Komponen C: Dukungan Manajemen Program.

Ketiga komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

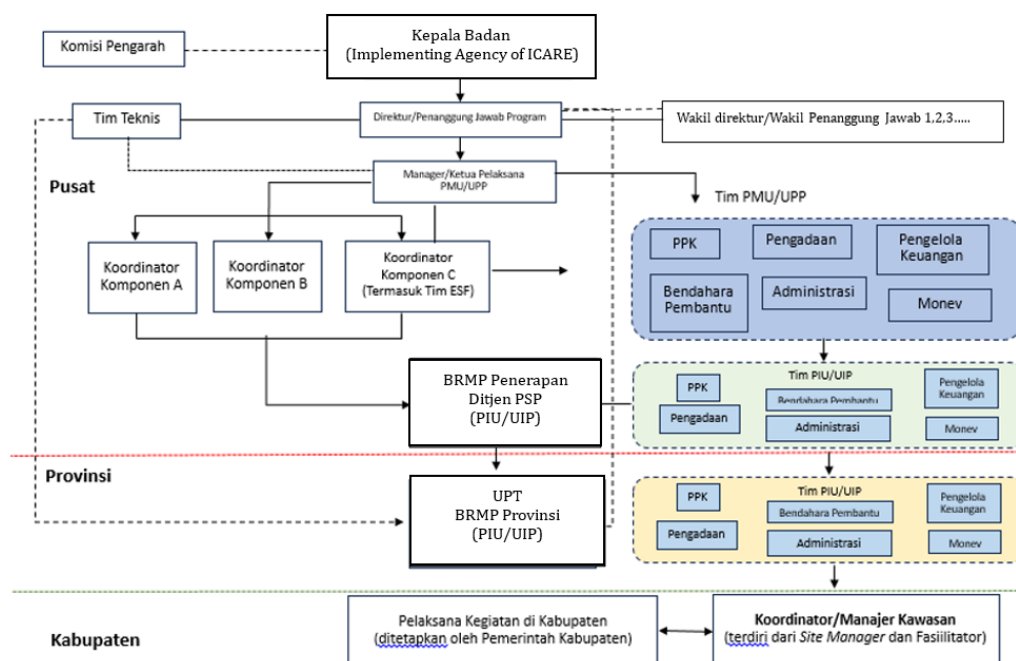


b. Nomor Register Program

ICARE : IBRD No. 9341-ID

c. Struktur Organisasi dan Manajemen Proyek

Pelaksanaan Program ICARE merupakan gabungan beberapa organisasi yang ada di tingkat Pusat sampai ke daerah di masing-masing lokasi Korporasi Petani. Secara ringkas dan sistematis, struktur organisasi pelaksanaan Program ICARE tertuang dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur organisasi pelaksanaan Program ICARE Pelaksana Tingkat Pusat

Organisasi pelaksana Program ICARE adalah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), BRMP Penerapan, BRMP Provinsi, dan Ditjen PSP. Pelaksana di tingkat Pusat berada dalam koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) melalui Sekretariat Badan dan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Penerapan). Fungsi manajemen project diimplementasikan oleh Tim Unit Pengelola Program (UPP) atau *Project Management Unit/PMU* di Sekretariat BRMP, sedangkan fungsi Koordinasi Tim Unit Implementasi Program (UIP) atau Project Implementation Unit/PIU diimplementasikan di Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Penerapan) dan Ditjen PSP. Pelaksanaan kegiatan diimplementasikan oleh masing-masing Tim Unit Implementasi Program (UIP) atau Project Implementation Unit/PIU di 9 Provinsi lokasi kawasan oleh masing-masing Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP Provinsi).

d. Target Tahunan Program

Target tahunan Project Development Objective (PDO) disusun untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan proyek agar selaras dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta menjadi dasar pemantauan dan evaluasi capaian kinerja. Adapun target tahunan tersaji pada tabel dibawah ini:

No	Indikator	Target PDO	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	End Project
I.	Untuk mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial								
1	Proporsi anggota Korporasi Petani yang didukung proyek yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial	80	%	0	0	10	50	80	80
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak terpilih dari penerapan teknologi pertanian cerdas iklim di antara penerima manfaat proyek	30	%	0	0	10	20	30	30
3	Jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek	30	jumlah	0	0	9	9	18	36
4	Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian	90.000	jumlah	1250	8100	12500	33750	34000	90000
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Perempuan	22.500	jumlah	180	1800	4160	8200	8160	22500
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Pemuda	30.000	jumlah	360	3240	5200	10600	10600	30000
	- lainnya	37.500	jumlah	0	0	11250	18750	7500	37500
II.	Komponen A. Memperkuat rantai nilai di Kawasan Pertanian (klaster zona pertanian) terpilih								
1	Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai	13	jumlah	0	0	9	4	0	13
2	Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (matching grants)	61	jumlah	0	0	16	26	19	61
3	Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2 tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping	10	jumlah	0	0	0	1	9	10
4	Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani	80	%	10	20	30	60	80	80
	Persentase petani yang dilatih kemampuan bisnis/usahanya di Korporasi Petani – Perempuan	80	%	10	20	30	70	80	80
5	Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani	25	%	0	10	25	0	0	25
6	Persentase petani di Korporasi Petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung oleh proyek	80	%	0	10	20	60	80	80

No	Indikator	Target PDO	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	End Project
7	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek	80	%	0	0	25	50	80	80
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – perempuan	80	%	0	0	25	50	80	80
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – laki-laki	80	%	0	0	25	50	80	80
III	Komponen B: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan rantai nilai								
1	Proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh perwakilan petani dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif (competitive grant)	30	%	0	0	30	0	0	30
	Proporsi perempuan di antara perwakilan petani yang menduduki kursi dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif	50	%	0	0	50	50	0	50
2	Jumlah hibah kompetitif yang diberikan untuk adaptasi dan diseminasi teknologi	150	jumlah	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah teknologi yang diproduksi dan disebarluaskan melalui kemitraan kolaboratif	120	jumlah	0	18	27	48	27	120
4	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik	70.000	jumlah	0	900	8000	32600	28500	70000
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik - Perempuan	18.750	jumlah	0	360	1870	9000	7520	18750
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik – laki-laki	51.250	jumlah	0	450	2700	24300	23800	51250
5	Luas lahan pertanian di mana praktik-praktik yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diterapkan	7.200	Ha	0	45	900	3600	2655	7200
6	Jumlah pelaku rantai nilai dan pekerja UKM agribisnis di rantai nilai terpilih yang dilatih dan didukung	500	jumlah	0	45	90	189	180	504
7	Jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian	5.000	jumlah	0	270	900	900	2934	5004
8	Porsi proposal hibah kompetitif teknologi (competitive technology grant) yang disetujui yang mencakup partisipasi dan investasi sektor swasta	70	%	0	0	20	30	20	70

No	Indikator	Target PDO	Satuan	2023	2024	2025	2026	2027	End Project
IV	Komponen C: Manajemen Proyek								
1	Persentase Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang ditangani dari total klaim yang diterima	80	%	0	80	80	80	80	80
2	Jumlah produk-produk pengetahuan yang disusun dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendiseminasi pembelajaran proyek	30	jumlah	0	0	9	18	9	36

e. Kebijakan Akuntansi

Beberapa kebijakan akuntansi untuk Loan IBRD No 9341-ID yang dilaksanakan pada Program ICARE antara lain:

1. Perlakuan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dilakukan atas dasar kas (*Cash Basis*) pada saat terjadinya transaksi berdasarkan reksus;
2. Periode akuntansi dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, sesuai dengan tahun anggaran yang digunakan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah dengan pembebanan *US Dollar* dilakukan berdasarkan Kurs *Dollar* pada saat pembebanan rekening khusus oleh Kementerian Keuangan;
4. Penyusunan laporan keuangan berpedoman pada *Projek Operation Manual* (POM) tanggal 26 Oktober 2018 dari Proyek ICARE *Loan Agreement* tanggal 7 Juli 2022 antara Pemerintah Republik Indonesia dan *International Bank for Reconstruction and Development* (Bank Dunia) dengan Loan No. 9341-ID
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 1995, atas penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari Loan tidak dipungut PPN. Dengan demikian, nilai perolehan aktiva yang dibiayai dari Loan tidak termasuk PPN;
6. Penerimaan pembayaran dari rekening khusus dicatat berdasarkan SP2D yang dicairkan melalui rekening khusus pada Bank Indonesia, sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut komponen dan sub-komponennya.

Tata cara pencairan dan pembebanan pada proyek Loan No. 9341-ID ini menggunakan mekanisme rekening khusus dan dilaksanakan sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bapennas No 185/KMK.03/1995 dan KEP 031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 dan Loan IBRD No. 9341-ID ICARE.

Pencairan dan Pembebanan dilakukan sesuai dengan spesifikasi pinjaman sebagai berikut:

Nomor Perjanjian PHLN : IBRD 9341-ID
 Nomor Register : 1LAVQJMA
 Tanggal Penandatanganan : 7 Juli 2022
 Tanggal Efektif Perjanjian PHLN : 5 September 2022 (No. Surat CD145/WB/IX/2022)
 Closing date : 30 Juni 2027
 Jumlah Pinjaman : USD 100.000.000,00
 Jumlah Initial Deposit : USD 1.026.845,64

Tata cara penarikan dana melalui rekening khusus merupakan tata cara penarikan dana pinjaman luar negeri melalui rekening pemerintah di Bank Indonesia yang disediakan khusus untuk menampung dana yang merupakan initial deposit dan dana pengisian kembali (replenishment). Pembayaran yang membebani rekening khusus pada BI akan mengurangi saldo rekening khusus yang bersangkutan, sehingga untuk mengisi kembali rekening khusus tersebut dilakukan melalui prosedur pengajuan aplikasi replenishment kepada Bank Dunia yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman. Aplikasi replenishment diajukan dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa *Interim Financial Report* (IFR). Proses pengisian initial deposit dalam rekening khusus dilakukan setelah *Loan Agreement* efektif dan program telah siap dilaksanakan.

f. Capaian Target dan Kendala yang dihadapi; dan

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Target 2025	Target Kumulatif 2025	Capaian 2025	Keterangan
I.	Untuk mendukung rantai nilai pertanian yang inklusif dan berkelanjutan secara lingkungan dan finansial						
1	Proporsi anggota Korporasi Petani yang didukung proyek yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial	80	%	10	10	7.44%	Belum Tercapai
2	Persentase peningkatan produktivitas tanaman dan ternak terpilih dari penerapan teknologi pertanian cerdas iklim di antara penerima manfaat proyek	30	%	10	10	13%	Tercapai
3	Jumlah kemitraan yang difasilitasi oleh proyek	30	jumlah	9	9	56	Tercapai
4	Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian	90.000	jumlah	12500	21850	36790	Tercapai
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Perempuan	22.500	jumlah	4160	6140	8861	Tercapai
	- Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Pemuda	30.000	jumlah	5200	8800	12894	Tercapai
	- lainnya	37.500	jumlah	0	0	15036	Tercapai
II.	Komponen A. Memperkuat rantai nilai di Kawasan Pertanian (klaster zona pertanian) terpilih						
1	Jumlah rencana pengembangan agribisnis lokal yang dikembangkan dan didanai	13	jumlah	9	9	18	Tercapai
2	Jumlah rencana bisnis/usaha Korporasi Petani yang didukung melalui hibah pendamping (matching grants)	61	jumlah	16	16	45	Tercapai
3	Jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah 2	10	jumlah	0	0	0	Belum Tercapai

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Target 2025	Target Kumulatif 2025	Capaian 2025	Keterangan
	tahun diberikannya pembiayaan hibah pendamping						
4	Persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangannya di Korporasi Petani	80	%	30	30	24.57%	Belum Tercapai
	Persentase petani yang dilatih kemampuan bisnis/usahanya di Korporasi Petani – Perempuan	80	%	30	30	16.92%	Belum Tercapai
5	Proporsi perempuan di struktur kepemimpinan dan manajemen Korporasi Petani	25	%	25	25	31.84%	Tercapai
6	Persentase petani di Korporasi Petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung oleh proyek	80	%	20	20	11.81%	Belum Tercapai
7	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek	80	%	25	25	78.77%	Tercapai
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – perempuan	80	%	25	25	74.42%	Tercapai
	Persentase klien sasaran yang puas dengan layanan pertanian yang difasilitasi oleh proyek – laki-laki	80	%	25	25	73.9%	Tercapai
III	Komponen B: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengembangan rantai nilai						
1	Proporsi jumlah kursi yang diduduki oleh perwakilan petani dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif (competitive grant)	30	%	30	30	50%	Tercapai
	Proporsi perempuan di antara perwakilan petani yang menduduki kursi dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif	50	%	50	50	36.4%	Belum Tercapai
2	Jumlah hibah kompetitif yang diberikan untuk adaptasi dan diseminasi teknologi	150	jumlah	0	0	83	Tercapai
3	Jumlah teknologi yang diproduksi dan disebarluaskan melalui kemitraan kolaboratif	120	jumlah	27	45	96	Tercapai
4	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik	70.000	jumlah	8000	8900	9414	Tercapai
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik -Perempuan	18.750	jumlah	1870	2230	2879	Tercapai
	Petani mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik – lakilaki	51.250	jumlah	2700	3150	6380	Tercapai

No	Indikator	Target PDO	Satuan	Target 2025	Target Kumulatif 2025	Capaian 2025	Keterangan
5	Luas lahan pertanian di mana praktik-praktik yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diterapkan	7.200	Ha	900	945	1841.62	Tercapai
6	Jumlah pelaku rantai nilai dan pekerja UKM agribisnis di rantai nilai terpilih yang dilatih dan didukung	500	jumlah	90	135	1373	Tercapai
7	Jumlah pejabat publik dan penyuluh pertanian yang dilatih untuk memfasilitasi pengembangan rantai nilai dan memberikan layanan pertanian	5.000	jumlah	900	1170	3458	Tercapai
8	Porsi proposal hibah kompetitif teknologi (competitive technology grant) yang disetujui yang mencakup partisipasi dan investasi sektor swasta	70	%	20	20	82%	Tercapai
IV	Komponen C: Manajemen Proyek						
1	Persentase Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) yang ditangani dari total klaim yang diterima	80	%	80	80	91%	Tercapai
2	Jumlah produk-produk pengetahuan yang disusun dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendiseminasi pembelajaran proyek	30	jumlah	9	9	31	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 80% target telah tercapai, sementara 20% target belum tercapai hingga periode pelaporan. Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan operasional yang mempengaruhi tingkat pencapaian indikator. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain:

1. Keterbatasan sistem manajemen data di tingkat PIU.
Beberapa PIU belum memiliki sistem manajemen data yang terintegrasi, sehingga proses perhitungan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih data, khususnya dalam perhitungan berbasis *unique number*, yang berdampak pada akurasi pelaporan capaian indikator.
2. Persentase rendah pada indikator proporsi anggota Korporasi Petani yang mengalami peningkatan penjualan melalui saluran komersial.
Rendahnya persentase ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah anggota koperasi, sehingga denominator meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan jumlah anggota yang telah berhasil meningkatkan penjualan, yang secara statistik menurunkan persentase capaian indikator.
3. Indikator jumlah Korporasi Petani yang memperoleh keuntungan setelah dua tahun menerima pembiayaan hibah pendamping belum dapat dihitung.
Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *matching grant* yang baru dimulai pada Triwulan IV tahun 2025, sehingga periode dua tahun evaluasi keuntungan belum terpenuhi dan capaian bersifat outcome sehingga perhitungan dilakukan setelah project selesai.

4. Indikator persentase petani yang dilatih keterampilan bisnis dan keuangan di Korporasi Petani dipengaruhi oleh dinamika keanggotaan dan keterlibatan peserta pelatihan. Peningkatan jumlah anggota Korporasi Petani serta penerapan sistem perhitungan berbasis *unique number* mempengaruhi persentase capaian. Selain itu, partisipasi petani dalam kegiatan pelatihan juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat keingintahuan terhadap materi bisnis dan keuangan serta keterbatasan waktu petani untuk mengikuti kegiatan.
5. Indikator persentase petani perempuan yang dilatih keterampilan bisnis/usaha di Korporasi Petani masih rendah.
Rendahnya minat partisipasi petani perempuan disebabkan oleh struktur peran gender di tingkat rumah tangga, di mana aktivitas budidaya umumnya dilakukan oleh laki-laki (suami). Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan khusus bagi perempuan, seperti penyampaian materi hilirisasi produk, pengolahan hasil, dan kewirausahaan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT).
6. Indikator persentase petani yang memperoleh manfaat dari infrastruktur yang didukung proyek belum terlaporkan secara optimal.
Kendala utama adalah belum tersedianya sistem manajemen data yang memadai untuk mencatat dan memverifikasi penerima manfaat infrastruktur secara akurat.
7. Proporsi perempuan dalam komite evaluasi proposal hibah kompetitif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah perempuan yang memiliki kapasitas teknis dan pengalaman yang memadai untuk menduduki posisi tersebut.

Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi lebih bersifat teknis dan sistemik, khususnya terkait manajemen data, dinamika keanggotaan Korporasi Petani, serta faktor sosial-budaya dalam partisipasi gender. Oleh karena itu, capaian indikator perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan perubahan denominator, tahapan implementasi program, dan keterbatasan periode evaluasi dampak.

g. Alokasi DIPA dan Realisasi TA 2025

Program/Kegiatan/Output				Pagu	Realisasi	%
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			449.342.539.000	114.834.319.779	25,56%
	7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian		449.342.539.000	114.834.319.779	25,56%
		7911.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	449.342.539.000	114.834.319.779	25,56%
		7911.QDB.001	Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment	449.342.539.000	114.834.319.779	25,56%
Sub Total				449.342.539.000	114.834.319.779	25,56%
Total				449.342.539.000	114.834.319.779	25,56%

Berdasarkan tabel diatas alokasi anggaran Program ICARE sebesar Rp. 449.342.539.000 dialokasikan pada DIPA BRMP senilai Rp. 129.785.739.000 dan DIPA Ditjen PSP senilai Rp320.000.000.000,00 (untuk mendukung program Swasembada Pangan melalui proyek ICARE).